

**PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF
COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN
BUTON UTARA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister**



OLEH :

La Ode Al Ihlas

(186030100111027)

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KEKHUSUAN MANAJEMEN PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN BUTON UTARA

Oleh :


LA ODE AL IHLAS
NIM. 186030100111027

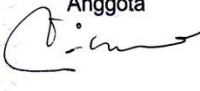
Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 17 Juni 2021
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

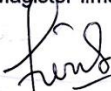
Ketua

Anggota


Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D
NIP. 19670217 199103 1 010


Wike, S.Sos., M.Si, DPA
NIP. 19701126 200212 2 005

Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Publik


Firda Hidayati, S.Sos, MPA., DPA
NIP. 19711013 200003 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya


Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D
NIP. 19670217 199103 1 010

LEMBAR PENGESAHAN

JURNAL

PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF
COLLABORATIVE GOVERNANCE
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara)

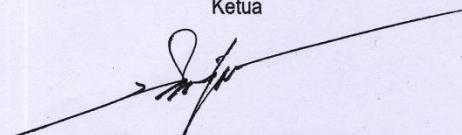
Oleh :

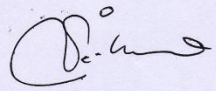
La Ode Al Ihlās
186030100111027

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D
NIP 19670217 199103 1 010


Wike, S.Sos., M.Si, DPA
NIP 19701126 200212 2 005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik



Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA
NIP 19711013 200003 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsu-unsust PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 30 Juli 2021

Mahasiswa



Nama : La Ode Al Ihlal

NIM : 186030100111027

PS : Magister Ilmu Administrasi Publik

UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak ada kata yang lebih pantas diucapkan pada kesempatan ini selain ungkapan puji syukur kepada Tuhan Sang Maha Pemilik Ilmu, sehingga karya tesis ini dapat terselesaikan. Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik peminatan Manajemen Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa sangat banyak pihak yang akan diberikan terima kasih, karena telah banyak membantu penulis baik melalui proses bimbingan tesis dengan para dosen pembimbing dan penguji, diskusi dengan teman sejawat, proses wawancara dengan para informan, dan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan tulus hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga khususnya ayah dan ibu yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan studi Magister Administrasi Publik
2. Bapak Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi dan Ibu Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan prima dalam proses studi penulis
3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D dan Ibu Wike, S.Sos, M.Si, DPA selaku dosen pembimbing yang telah memberi saran, mengarahkan dan membimbing penulis demi kelancaran proses penulisan tesis ini
4. Bapak Dr. Bambang Santoso Haryono, MS dan Dr. Alfi Hariswanto, SAP, M.AP.MMG selaku dosen penguji tesis mulai dari ujian seminar proposal yang telah banyak memberikan masukan demi penyempurnaan penulisan tesis ini
5. Ibu Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA dan Dr. Alfi Hariswanto, SAP, M.AP selaku dosen penguji tesis saat ujian komprehensif yang memberikan masukan pada proses ujian komprehensif peneliti.
6. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, hingga staf dan petugas lapangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UMKM, Sekretaris tim penggerak PKK,

Lurah, dan masyarakat di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara yang telah bersedia untuk meluangkan waktu melakukan wawancara secara mendalam dan intensif dengan penulis dalam proses pengumpulan data tesis ini.

7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmunya dalam proses pengajaran di kelas sejak awal semester satu dan semester dua sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penulisan tesis ini.
8. Teman-teman penulis di program Magister Administrasi Publik angkatan 2018 yang sering memberikan saran yang konstruktif kepada penulis.
9. Teman-teman alumni di luar program Magister Administrasi Publik yang turut andil dalam memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan tesis ini hingga selesai.
10. Semua pihak yang turut membantu penulisan tesis ini yang mana tidak dapat disebut satu per satu.

Akhir kata penulis mendoakan semoga Tuhan menerima amalan dan memberikan balasan yang lebih banyak atas ilmu, jasa, motivasi, dukungan, dan seluruh pengorbanan yang diberikan kepada penulis.

Malang, 30 Juli 2021

Penulis



La Ode Al Ihlis

RIWAYAT HIDUP

La Ode Al Ihlas, Lahir di Kulisusu Buton Utara pada tanggal 9 Juli 1983, merupakan putra keempat dari bapak La Ode Abdul Wazir dan Ibu Siti Harapiah. Memulai jenjang pendidikan formal SDN 1 Lipu, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Kulisusu, selanjutnya menepuh pendidikan menengah atas di SMAN 1 Kulisusu. Pada tahun 2006 memulai pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haluoleo Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahun 2018 menempuh pendidikan Strata dua (S2) pada program studi Magister Ilmu Administrasi Publik dengan kekhusuan manajemen publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Pengalaman kerja pada tahun 2011 memulai karir sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkup pemerintahan Kabupaten Buton Utara pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dan mutasi tahun 2016 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

Malang, 30 Juli 2021

Penulis,

La Ode Al Ihlas

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kesempatan izinnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif *Collaborative Governance* di Kabupaten Buton Utara”**. sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Tesis ini membahas mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara (DLH) dalam perspektif *collaborative governance*. Penulis berusaha untuk mengetahui penyebab kurang optimalnya pelayanan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara serta mencari solusi untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah dengan pendekatan *collaborative governance*. Sehingga akan menemukan suatu rekomendasi pengelolaan sampah dalam usaha mewujudkan pengelolaan sampah yang baik di Kabupaten Buton Utara.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat dibutuhkan oleh penulis demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi pembaca dan kebutuhan akademik dan praktik pengelolaan sampah dengan cara kolaborasi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu dalam proses penulisan tesis ini.

Malang, 30 Juli 2021

Penulis

La Ode Al Ihlās

RINGKASAN

La Ode Al Ihlas, Program Magister Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. **“Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif *Collaborative Governance*, di Kabupaten Buton Utara”**. Komisi Pembimbing: Ketua: Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D, Anggota: Wike, S.Sos., M.Si, DPA.

Sampah masih menjadi masalah di setiap kota di Indonesia yang tak kunjung usai sehingga memerlukan penanganan yang serius. Pertumbuhan jumlah penduduk serta pola hidup dan gaya konsumtif masyarakat membawa dampak bertambahnya jumlah dan karakteristik sampah dari hari ke hari. Pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara dirasakan belum maksimal sementara permasalahan dalam pengelolaan sampah dan jumlah timbunan sampah semakin banyak. Disisi lain pemerintah mempunyai keterbatasan sehingga membutuhkan dukungan dari pihak lain guna mengatasi persoalan sampah yang semakin bertambah. Pemerintah perlu memusatkan perhatian kepada masyarakat sebagai penghasil utama sampah dan tujuan utama pelayanan, sehingga masyarakat perlu dilibatkan langsung dalam pengelolaan sampah. Selain itu perlu dukungan sumberdaya dan pengetahuan dengan melibatkan berbagai *stakeholders*. Kolaborasi adalah salah satu terobosan dalam mengatasi ketidak mampuan dalam mengatasi persoalan sektor publik dengan pendekatan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis : 1) Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buton Utara, 2) Pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara dari perspektif *collaborative governance*, 3) Faktor yang penghambat dan pendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi, dan menggunakan teknis analisis data Miles, Huberman dan Saldana yang meliputi *consensation data; display data; dan conclusion*.

Hasil penelitian ditinjau dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara masih belum maksimal yang nampak pada teknik pengelolaan sampah dengan menggunakan pola kumpul, angkut, buang, dan belum ada upaya pemilahan dari sumber timbulan sampah. Selain itu pengelolaan sampah masih terpusat pada DLH sebagai regulator dan eksekutor dan belum ada keterlibatan masyarakat dan pihak lain dalam pengelolaan sampah. Cakupan pelayanan hanya sebatas satu kecamatan saja dari enam kecamatan yang ada di

Kabupaten Buton Utara. Penanganan sampah menurut fungsi perwilayahan secara umum masih menggunakan pola individual dan individual langsung. Dalam menjalankan tugas sebagai pengelola sampah DLH masih terkendala dengan kurangnya sarana dan prasarana dan sumberdaya seperti, sumberdaya manusia, anggaran, dan organisasi kelembagaan. Ditinjau dari produksi sampah dan sampah yang dapat dikelola menunjukan angka yang sangat jauh dari harapan sehingga mengakibatkan sampah tidak terangkut dengan baik, terjadi pencemaran, dan menurunnya nilai estetika kota.

Pengelolaan sampah dengan perspektif *collaborative governance* di Kabupaten Buton Utara diawali dengan mengidentifikasi *stakeholders* yang akan terlibat dalam pengelolaan sampah. *Stakeholders* yang terlibat terdiri dari *stakeholders* internal dan eksternal yang kemudian diidentifikasi lagi mengenai *stakeholders* yang terlibat langsung maupun tidak langsung sehingga dapat menguatkan proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini semua *stakeholders* merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga semua *stakeholders* saling mendukung secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sampah. Dalam upaya kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara menunjukan adanya peluang yang baik dipandang dari perspektif *collaborative governance* yang nampak pada upaya DLH menjadi inisiator dengan mengadakan pertemuan awal untuk bekerjasama dengan *stakeholders* lain. Gagasan dari DLH ini akan menjadi salah satu faktor pendorong terlaksananya kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Dalam pertemuan awal ini hanya membahas tentang kesediaan dari berbagai *stakeholders* belum membahas sumberdaya dan kegiatan kerjasama yang akan diadakan. Kesediaan dari beberapa *stakeholders* karena DLH masih diberikan kepercayaan dan komitmen untuk memperbaiki pengelolaan sampah yang saat ini tidak maksimal karena kurangnya beberapa aspek seperti, aspek prosedural, kepemimpinan, pengetahuan dan sumberdaya yang harus ditingkatkan. Peluang yang baik juga nampak pada kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan daur ulang sampah yang sudah diadakan oleh masing-masing *stakeholders* yang akan terlibat langsung dalam pengelolaan sampah. Kegiatan tersebut menjadi peluang yang sangat besar bagi DLH untuk dijadikan dalam kegiatan kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Dengan adanya kolaborasi pengelolaan sampah diharapkan hasil yang akan diperoleh berupa perubahan kualitas dan kuantitas dalam aspek ekonomi, lingkungan hidup, sosial masyarakat, dan politik.

Adapun faktor penghambat dalam teknis operasional terdapat pada tingkat dan daerah pelayanan serta timbunan sampah dan pewadahan. Selain itu ditinjau dari aspek kelembagaan status dan kapasitas lembaga pengelolaan kebersihan masih belum memadai sehingga perlu ditingkatkan lagi. Dari aspek hukum

peraturan daerah ketentuan penanganan persampahan dan peraturan daerah retribusi belum ada, masih sebatas diusulkan namun belum terealisasi sampai saat ini. Disisi lain anggaran salah satu penyebab lemahnya sistem pengelolaan sampah antara lain karena minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan kebersihan kota. Minimnya peran serta dan tingkat kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sampah. Beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan sampah adalah, tersedianya lahan TPA yang luas, peluang ekonomi dengan daur ulang sampah, peluang penerapan tenaga kerja, peluang peningkatan kesehatan masyarakat, peluang kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dan membayar retribusi pengelolaan sampah.

Kata kunci: Pengelolaan sampah, *collaborative governance*



SUMMARY

La Ode Al Ihlas, Master Program Faculty of Administrative Sciences in Brawijaya University Malang. **“Waste Management of Collaborative Governance Perspective in North Buton Regency”**. Supervisory commission: Chief: Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D, Advisory: Wike, S.Sos., M.Si, DPA.

Garbage is a problem every city in Indonesia that never ends, so it requires serious handling. Today Population growth as well as the lifestyle and consumptive style of the community have the impact of increasing the amount and characteristics of waste. Waste management in North Buton Regency is felt to be not optimal while problems in waste management and the amount of waste piles are increasing. On the other hand, the government has limitations so that it requires support from other parties to overcome the increasing waste problem. The government needs to focus on the community as the main producer of waste and the main purpose of service, so that the community needs to be directly involved in waste management. In addition, it is necessary to support resources and knowledge by involving various stakeholders. Collaboration is one of the breakthroughs in overcoming the inability to overcome public sector problems with a collaborative governance approach in waste management.

This study aims to identify and analyze: 1) Waste management carried out by the Department of Environment (DLH) of North Buton Regency, 2) Waste management in North Buton Regency in a collaborative governance perspective, 3) The inhibit and support factors waste management in North Buton Regency. This research was conducted with a qualitative descriptive approach with data collection techniques interview, documentation, and observation, and using data analysis techniques Miles, Huberman and Saldana which includes consensation data; data display; and the conclusion.

Results of the study in terms of waste management carried out by the Department of the Environment (DLH) show that waste management in North Buton Regency is not optimal, which can be seen in waste management techniques using collection, transport, and disposal patterns, and there has been no effort to sort out the sources of waste generation. . In addition, waste management is still centered on DLH as a regulator and executor and there is no involvement of the community and other parties in waste management. Service coverage is only limited to one sub-district of the six sub-districts in North Buton Regency. Waste management according to regional functions in general still uses individual and direct individual patterns. In carrying out its duties as a waste manager, DLH is still constrained by the lack of facilities and infrastructure and resources such as human resources, budgets, and institutional organizations. Judging to the production of waste and waste that can be managed, the numbers are so far from

expectations, resulting in waste not being transported properly, pollution, and decreasing the aesthetic value of the city.

Waste management with collaborative governance perspective in North Buton Regency begins with identifying stakeholders who will be involved in waste management. The stakeholders involved consist of internal and external stakeholders who are then identified again regarding the stakeholders involved directly or indirectly so that they can strengthen the collaborative process in waste management. In this case, all stakeholders are an inseparable unit so that all stakeholders support each other directly or indirectly in waste management. Collaborate of waste management in North Buton Regency, it shows there is a good opportunity in a collaborative governance perspective, which can be seen in DLH efforts to become the initiator by holding initial meetings to collaborate with other stakeholders. DLH idea will be one of the driving factors for the implementation of waste management collaboration in North Buton Regency. The first meeting, it only discussed the willingness of various stakeholders, but did not discuss the resources and cooperation activities that would be held. The willingness of several stakeholders because DLH is still given the trust and commitment to improve waste management which is currently not optimal due to the lack of several aspects such as procedural aspects, leadership, knowledge and resources that must be improved. Good opportunities also appear in the socialization, training, and waste recycling activities that have been held by each stakeholder who will be directly involved in waste management. This activity is a big opportunity for DLH to be used in collaborative waste management activities in North Buton Regency. With the collaboration in waste management, it is hoped that the results will be in the form of changes in quality and quantity in economic, environmental, social and political aspects.

The inhibiting factors in technical operations are at the service level and area as well as waste dumps and containers. In addition, in terms of institutional aspects, the status and capacity of the sanitation management institution is still inadequate, so it needs to be improved again. From the legal aspect of regional regulations, the provisions for handling waste and regional regulations for retribution do not yet exist, they are still only proposed but have not been realized so far. On the other hand, the budget is one of the causes of the weakness of the waste management system, among others, due to the lack of budget allocated for the management of city cleanliness. The lack of participation and level of public awareness is one of the inhibiting factors in waste management. Some of the supporting factors in waste management are the availability of a large landfill area, economic opportunities by recycling waste, opportunities for the application

of labor, opportunities to improve public health, opportunities for community willingness to participate and pay waste management fees.

Keywords: Waste management, collaborative governance



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu	18
2.2. Perkembangan Ilmu Administrasi Publik	37
2.2.1 <i>Old Public Administration</i> (OPA)	40
2.2.2 Kelemahan <i>Old Public Administration</i>	42
2.2.3 <i>New Public Management</i> (NPM)	44
2.2.4 <i>New Public Service</i> (NPS)	46
2.3. <i>Collaborative Governance</i>	47
2.3.1 Konsep Dasar <i>Governance</i>	47
2.3.2 Makna Kolaborasi	50
2.3.3 Definisi <i>Collaborative Governance</i>	52
2.3.4 Model <i>Collaborative Governance</i>	56
2.3.4.1 Dinamika Kolaborasi	59

2.3.4.2 Kegiatan Kolaborasi	62
2.3.4.3 Hasil Kolaborasi	63
2.3.4.4 Adaptasi	63
2.3.5 Tujuan Melaksanakan <i>Collaborative Governance</i>	63
2.4. Sampah dan Pengelolaanya	66
2.4.1. Sampah Berdasarkan Sumber, Jenis, dan Golongannya ...	66
2.4.2. Sistem Pengelolaan Sampah	69
2.4.3. Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3-R	72
2.4.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Sampah	73
2.4.4.1 Aspek Peraturan/Hukum	74
2.4.4.2 Aspek Kelembagaan dan Organisasi	75
2.4.4.3 Aspek Teknik Operasional	76
2.4.4.4 Aspek Pembiayaan	79
2.4.4.5 Aspek Peran Serta Masyarakat	80
2.5. Kerangka Pikir Penelitian	84
BAB III ANALISIS SOSIAL SETTING	
3.1. Kondisi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Buton Utara	88
3.2 Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif <i>Collaborative Governance</i> di Kabupaten Buton Utara	92
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1. Jenis Penelitian	95
4.2. Fokus Penelitian	96
4.3. Lokasi dan Situs Penelitian	97
4.4. Sumber Data Penelitian	98
4.5. Teknik Pengumpulan Data	99
4.5.1 Wawancara	100
4.5.2 Dokumentasi	101
4.5.3 Observasi	102
4.6. Teknik Analisis Data	102
4.7. Keabsahan Data	105

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian108

5.1.1. Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Buton Utara108

5.1.1.1. Pola Penanganan Sampah dan Cakupan Wilayah108

5.1.1.2. Analisis Sumberdaya Pengelolaan Sampah Kabupaten

Buton Utara112

5.1.1.2.1. Analisis Sumberdaya Sarana dan Prasarana112

5.1.1.2.1.1. Analisis Pewadahan Sampah112

5.1.1.2.1.2. Analisis Alat Angkut117

5.1.1.2.1.3. Analisis Kebutuhan Lahan TPA119

5.1.1.2.2. Analisis Sumberdaya Manusia121

5.1.1.2.3. Analisis Sumberdaya Anggaran124

5.1.1.2.4. Analisis Organisasi Kelembagaan127

5.1.1.3. Capaian Hasil Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari

Jumlah Produksi Sampah dan Sampah Terlayani di

Kabupaten Buton utara132

5.1.2. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perspektif *Collaborative*

Governance133

5.1.2.1. Identifikasi *Stakeholders* yang Terlibat Dalam

Pengelolaan Sampah133

5.1.2.2. Model *Collaborative Governance*143

5.1.2.2.1 Dinamika Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sampah143

5.1.2.2.1.1 Penggerakan Prinsip Bersama (*Principle Engagement*)

.....143

5.1.2.2.1.2. Motivasi Bersama (*Shared Motivation*)145

5.1.2.2.1.2.1. Pengembangan Kepercayaan145

5.1.2.2.1.2.2. Komitmen Dalam Proses147

5.1.2.2.1.3. Kapasitas Untuk Melakukan Tindakan Bersama

(*Capacity For Joint Action*)148

5.1.2.2.1.3.1. Aspek Prosedural Dalam Dinamika Kolaborasi

.....148

5.1.2.2.1.3.2. Aspek Kepemimpinan Dalam Dinamika Kolaborasi	150
5.1.2.2.1.3.3. Aspek Pengetahuan Dalam Dinamika Kolaborasi	151
5.1.2.2.1.3.4 Aspek Sumberdaya Dalam Dinamika Kolaborasi	153
5.1.2.2.1.3.4.1. Sumberdaya Manusia.....	154
5.1.2.2.1.3.4.2. Sumberdaya Anggaran.....	155
5.1.2.2.1.3.4.3. Fasilitas Atau Teknologi Yang Tersedia	155
5.1.2.2.2. Kegiatan Kolaborasi Pengelolaan Sampah.....	156
5.1.2.2.2.1. Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah.....	157
5.1.2.2.2.2 Kegiatan Pelatihan dan Daur Ulang Sampah.....	159
5.1.2.2.3. Hasil Kolaborasi Pengelolaan Sampah.....	162
5.1.2.2.3.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.....	162
5.1.2.2.3.2. Perubahan Kondisi Sosial Masyarakat	163
5.1.2.2.3.3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Kebersihan Lingkungan.....	164
5.1.2.2.3.4. Membangun Legitimasi Politik Masyarakat Terhadap Pemerintah	165
5.1.2.2.4. Adaptasi	166
5.1.3 Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Sampah di Kabupaten Buton Utara.....	166
5.1.3.1 Faktor Penghambat.....	166
5.1.3.1.1 Aspek Teknis Operasional.....	167
5.1.3.1.2 Aspek Kelembagaan dan Organisasi.....	168
5.1.3.1.3 Aspek Peraturan Hukum.....	169
5.1.3.1.4 Aspek Pembiayaan	170
5.1.3.1.5 Aspek Peran Serta Masyarakat.....	171
5.1.3.2 Faktor Pendukung Pengelolaan Sampah	173
5.2. Pembahasan	174

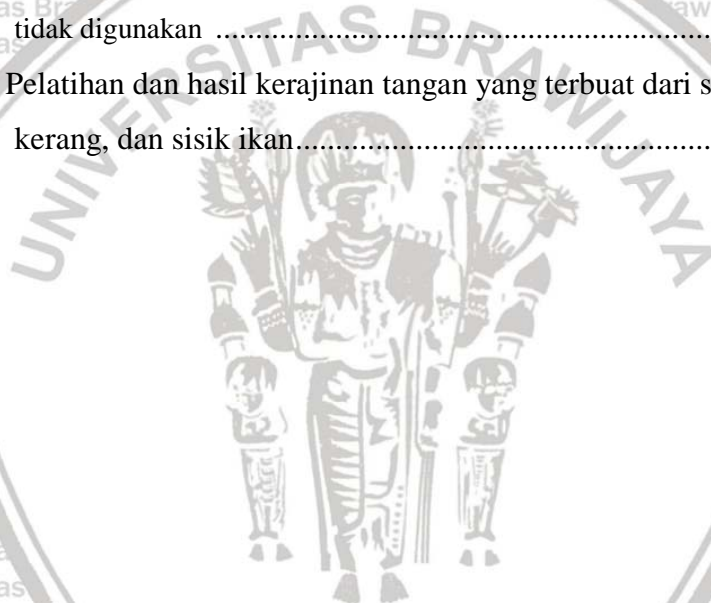
5.2.1. Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Buton Utara	174
5.2.1.1. Pola Penanganan Sampah dan Cakupan Wilayah	174
5.2.1.2. Analisis Sumberdaya Pengelolaan sampah Kabupaten Buton Utara	178
5.2.1.3. Capaian Hasil Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Jumlah Produksi Sampah dan Sampah Terlayani di Kabupaten Buton utara	188
5.2.2. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perspektif <i>Collaborative Governance</i>	185
5.2.2.1. Identifikasi <i>Stakeholders</i> yang Terlibat Dalam Pengelolaan Sampah	185
5.2.2.2. Komponen Model <i>Collaborative Governance</i>	189
5.2.2.2.1. Dinamika Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sampah	194
5.2.2.2.2. Kegiatan Kolaborasi Pengelolaan Sampah	202
5.2.2.2.3. Hasil Kolaborasi Pengelolaan Sampah	208
5.2.2.2.4. Adaptasi	211
5.2.3 Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Sampah di Kabupaten Buton Utara	212
5.2.3.1 Faktor Penghambat	212
5.2.3.2 Faktor Pendukung Pengelolaan Sampah	218
5.2. Implikasi Penelitian	219
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	228
6.2 Saran	230
DAFTAR PUSTAKA	232

DAFTAR TABEL

1.1 Penanganan Sampah Per Kecamatan Tahun 2016 - 2018.....	7
1.2 Jumlah TPS Berdasarkan Kecamatan	9
2.1 Penelitian Terdahulu	27
5.1 Jumlah Kelurahan dan desa di Kecamatan Kulisusu yang mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah	110
5.2 Jumlah Kapasitas TPS Kabupaten Buton Utara.....	113
5.3 Jumlah alat angkut sampah dan kondisinya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara	117
5.4 Kondisi SDM Aparatur DLH Kab. Buton Utara berdasarkan golongan/kepengkatan	121
5.5 Kondisi SDM DLH Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 berdasarkan jabatan	121
5.6 Kondisi SDM Aparatur DLH Kab. Buton Utara berdasarkan tingkat Pendidikan	122
5.7 Jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.....	123
5.8 Jumlah alokasi anggaran pengelolaan sampah.....	124
5.9 Jumlah personil dan besaran gaji perbulan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.....	125
5.10 Jumlah Produksi Sampah Menurut Fungsi Perwilayahan.....	132
5.11 Identifikasi <i>stakeholders</i> kolaborasi pengelolaan sampah	134
5.12 Identifikasi <i>stakeholders</i> yang terlibat langsung kolaborasi pengelolaan sampah.....	138
5.13 Jumlah kelurahan, desa, dan lingkungan di Kecamatan Kulisusu	140
5.14 Pengadaan tong sampah setiap Kelurahan di Kecamatan Kulisusu tahun anggaran	141
5.15 Pemetaan Kewenangan, dan Kepentingan Dialog antar <i>stakeholders</i>	144

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Kerja <i>Collaborative Governance</i>	59
2.2 Model Kerangka Pikir.....	87
4.1 Gambar Teknik Analisis Data Model Interaktif.....	103
5.1 Jenis tempat sampah yang telah rusak	113
5.2 Keadaan tempat pembuangan sampah di pasar	115
5.3 Pembuangan sampah masyarakat di tempat umum dan dipinggir pantai	116
5.4 Kondisi TPA di Kabupaten Buton Utara	120
5.5 Model Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	128
5.6 Pelatihan pembuatan keranjang dari rotan, tempat tisu dari plastik dan sisa kayu yang tidak digunakan	139
5.7 Pelatihan dan hasil kerajinan tangan yang terbuat dari sampah plastik, kulit kerang, dan sisik ikan.....	142





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor penting yang menopang kemajuan suatu bangsa adalah pertumbuhan ekonomi sehingga suatu negara dapat meneruskan cita-cita yang diinginkan. Memasuki era globalisasi seluruh negara di dunia berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mensejahterakan masyarakat dan berusaha mensejajarkan diri dengan negara-negara maju. Dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi taraf kehidupanpun ikut meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan pola konsumsi dan produksi yang akan berdampak pada peningkatan jumlah, jenis, dan karakteristik timbunan sampah. Dalam data statistik lingkungan hidup Indonesia (2018: 3) *World Bank* menyatakan bahwa pertambahan jumlah timbunan sampah sangat cepat, pada tahun 2002 dengan 2,9 miliar penduduk perkotaan menghasilkan sekitar 0,64 kg per orang per hari (0,68 miliar ton per tahun) dan pada tahun 2012 jumlah ini telah meningkat menjadi sekitar 3 miliar penduduk yang menghasilkan 1,2 kg per orang per hari (1,3 miliar ton per tahun). Diperkirakan sampah ini akan terus bertambah dan diprediksikan pada tahun 2025 akan mencapai 4,3 miliar penduduk perkotaan yang menghasilkan sekitar 1,42 kg per orang per hari sampah kota (2,2 miliar ton per tahun).

Fenomena sampah telah menjadi sebuah pelajaran yang berharga akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Pada tahun 2030 setiap negara secara

substansial mengurangi timbulan sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Hal ini merupakan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk dapat menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Menurut Hoelman (2016: 4) *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs. Masa berlakunya 2015-2030 dengan dokumen 35 halaman yang disepakati oleh 190 negara berisikan 17 *goals* dan 169 sasaran pembangunan. Harus dilakukan suatu upaya agar Target SDGs 12.5 yang menyatakan negara secara substansial mengurangi timbulan sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali dapat dicapai.

Sampah menjadi topik yang patut diperbincangkan dan menjadi isu besar hampir diseluruh dunia khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam pertumbuhan jumlah populasi Indonesia menempati urutan keempat di dunia sehingga tidak bisa terelakan dari masalah sampah dan termasuk dalam kategori negara yang mempunyai masalah persampahan yang cukup memprihatinkan. Tahun 2025 perkiraan jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 284.829.000 orang atau bertambah 23.713.544 dari tahun 2016. Jika diasumsikan jumlah sampah yang dihasilkan per tahun adalah sama maka jumlah sampah yang akan bertambah adalah sebesar 5.928.386 ton. Tahun 2016 jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 65.200.000 ton per tahun dengan penduduk sebanyak 261.115.456 orang. Sementara itu dalam data statistik Indonesia (2018: 5) saat ini Indonesia masuk dalam kategori *lower middle income* sebagai negara yang perekonomiannya terus membaik, maka timbulan sampah

yang dihasilkan akan terus bertambah. Meningkatnya volume sampah dari tahun ketahun bukan hanya diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi dan kegiatan penduduk tetapi, juga disebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang pesat.

Proyeksi penduduk Indonesia menunjukkan angka penduduk yang terus bertambah dan tentunya akan meningkatkan jumlah timbunan sampah. Langkah pemerintah tertuang dalam Pepres 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSRT) yang menargetkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30 persen dan penanganannya sebesar 70 persen. Target SDGs dan Pepres di atas merupakan salah satu upaya penanganan timbunan sampah khususnya di daerah perkotaan (Statistik lingkungan hidup Indonesia, 2018: 3).

Di Indonesia pengelolaan sampah telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pengertian sampah dalam undang-undang tersebut adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang padat. Menurut Manik (2003: 67) sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Sedangkan menurut Badan Standarisasi Nasional dalam tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan mendefinisikan sampah sebagai limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3 Tentang

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah Rumah tangga, bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Peraturan tersebut mengisyaratkan bahwa seharusnya pengelolaan sampah diperlukan usaha yang kuat dalam membentuk sistem secara menyeluruh dan pada gilirannya diperlukan penanganan secara rutin dan berkesinambungan dalam memperkuat sistem yang ada.

Sampah dan pengelolaannya dari hari kehari menjadi sorotan yang patut untuk diprioritaskan dan menjadi masalah yang kian mendesak di berbagai daerah di Indonesia, sebab apabila masalah pengelolaan sampah terabaikan akan mengakibatkan berbagai ancaman yang akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan (Tuti Kustiah, 2005: 1). Oleh sebab itu perlu dilakukan pengurangan dan penanganan sampah karena banyak permasalahan yang diakibatkan dari sampah, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pencemaran air, udara, dan tanah; meningkatkan gas rumah kaca (GRK), sumber penyakit seperti diare; bencana banjir; dan permasalahan lainnya. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah yang akan menimbulkan kerusakan dan mengganggu kesehatan masyarakat sebagai dampak negatif dari sampah yang tidak dikelola dengan baik diperlukan penanganan dan pengendalian terhadap sampah. Dengan pengelolaan yang baik maka sampah bukanlah persoalan yang perlu dikhawatirkan sehingga

definisi sampah akan berubah menjadi sesuatu yang berguna dan memiliki nilai ekonomis.

Beberapa jenis sampah padat bisa didaur ulang menjadi sumberdaya yang memiliki nilai ekonomis. Proses daur ulang menjadi produk baru sangat membantu dalam mengurangi timbunan sampah karena sampah atau bahan buangan diolah menjadi barang baru yang mempunyai bentuk dan dapat dimanfaatkan kembali. Beberapa jenis limbah padat yang bisa didaur ulang seperti plastik, kaca, kertas besi, tembaga, dan aluminium. Untuk mendapatkan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam penanganan sampah di kota, maka dalam pengelolaannya harus cukup layak diterapkan yang sekaligus disertai upaya pemanfaatannya sehingga diharapkan mempunyai nilai tambah. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu pemilihan cara dan teknologi yang tepat, perlu partisipasi aktif dari masyarakat darimana sumber sampah berasal dan kerjasama antar lembaga pemerintah terkait. Disamping itu perlu aspek legal untuk dijadikan pedoman berupa peraturan-peraturan mengenai lingkungan demi menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 5 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggarakannya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Sejalan dengan itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan sampah dijelaskan mengenai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk pengelolaan sampah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dengan adanya PERMENDAGRI Nomor 33

Tahun 2010, maka masing-masing daerah membuat kebijakan dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara instansi yang berwenang dalam pengelolaan kebersihan/persampahan di Kabupaten Buton Utara adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bernaung dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kabupaten Buton Utara terdiri dari 6 kecamatan dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi di Kabupaten Buton Utara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan data penduduk tahun 2010 sebanyak 54.736 jiwa, tahun 2016 sebanyak 61.124 jiwa dan tahun 2017 62.088 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buton Utara selama kurun waktu 2010-2017 sebesar 11,67 % dan antara 2016 dan 2017 sebesar 2,25%. Salah satu kecamatan yang terpadat penduduknya adalah kecamatan Kulisusu sebesar 23.545 jiwa pada tahun 2017 dari total keseluruhan penduduk di Kabupaten Buton Utara (Kabupaten Buton Utara dalam angka, 2018).

Laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buton Utara mengakibatkan banyaknya aktifitas dan perubahan pola konsumsi yang terjadi di Kabupaten Buton Utara yang mengakibatkan permasalahan lingkungan dan menimbulkan bertambahnya volume sampah setiap tahunnya. Masalah persampahan terjadi antara lain karena semrawutnya pola pemukiman dan pesatnya penambahan jumlah penduduk. Maka salah satu aspek yang sedang

diupayakan adalah sarana dan prasarana yang memadai sebagai media utama untuk pengelolaan persampahan (Rizal, 2011:156). Berikut analisis terhadap jumlah sampah yang dihasilkan di Kabupaten Buton Utara setiap tahunnya mengalami kenaikan, ini dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk di Buton Utara sehingga dapat dihitung perubahan kenaikan sampah pertahunnya menggunakan SNI 19-3964-1994 (Kategori Kota Kecil) yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penanganan Sampah Per Kecamatan Tahun 2016 - 2018

Kecamatan	Produksi Sampah (M ³)			Sampah yang Ditangani (M ³)			Ket
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
Kulisusu	56.720	57.975	58.863	4.380	4.380	4.380	
Kulisusu Utara	21.012,5	21.542,5	21.818	-	-	-	
Kulisusu Barat	15.630	15.965	16.200	-	-	-	
Bonegunu	21.042,5	21.445	21.843	-	-	-	
Kambowa	16.945	17.420	17.663	-	-	-	
Wakorumba	18.097,5	18.462,5	18.835	-	-	-	
Total	148.447,5	152.810	155.222	4.380	4.380	4.380	

Standar Timbunan Sampah = 2,5 Liter/orang/hari

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara (2019)

Seperti yang termuat dalam tabel diatas timbunan sampah yang terbanyak berada di Kecamatan Kulisusu sebagai kecamatan yang terpadat di Kabupaten Buton Utara, produksi sampah dan penanganannya masih sangat jauh dari

harapan. Dari hasil observasi sementara bahwa sampah di Kabupaten Buton Utara khususnya di kecamatan Kulisusu masih sangat memprihatinkan, sampah bertebaran dimana-mana dan tempat penampungan sementara (TPS) sudah banyak yang rusak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2013, tempat penampungan sementara (TPS) adalah tempat dimana sebelum sampah diangkut untuk dilakukan pendauran ulang, pengolahan dan tempat pengolahan sampah terpadu. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) adalah tempat pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Masyarakat di Kabupaten Buton Utara khususnya di Kecamatan Kulisusu menghadapi persoalan buangan sampah khususnya sampah rumah tangga, sehingga persoalan sampah masih menjadi polemik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Suwerda (2012: 9) mengatakan bahwa setiap hari sampah dihasilkan dari keluarga/rumah tangga yang dari sisi kuantitas/jumlah biasanya menempati posisi tertinggi, sampah rumah sakit dan industri yang sangat berbahaya, juga sampah dari tempat-tempat umum misalnya terminal, pasar, tempat hiburan, sekolah, kantor, dan lain lain. Masyarakat di Kabupaten Buton Utara khususnya di Kecamatan Kulisusu menghadapi persoalan buangan sampah khususnya sampah rumah tangga, sehingga persoalan sampah masih menjadi polemik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pengolahan sampah melibatkan pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana antara lain menempatkan sampah pada wadah yang sudah tersedia, proses pengumpulan sampah, pemindahan, dan pengangkutan sampah, serta

pengolahan sampah hingga pada proses pembuangan akhir (Sahil, 2016: 478).

Dari hasil observasi tempat pembuangan akhir (TPA) belum berfungsi sebagaimana mestinya khususnya di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton

Utara, sehingga sampah dari tempat penampungan sementara sering terbengkalai yang mengakibatkan pembusukan dan pencemaran udara yang tidak sehat.

Akibat dari pengelolaan teknis yang tidak tepat mengakibatkan banyaknya tempat penampungan sementara (TPS) yang telah dihancurkan oleh masyarakat sebab tidak terangkutnya sampah dalam beberapa hari menyebabkan bau yang tidak sedap dilingkungan masyarakat.

Tabel 1.2 Jumlah TPS Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah TPS		
	2016	2017	2018
Bonegunu	-	-	-
Kulisusu	51	95	101
Kulisusu Utara	-	-	-
Kulisusu Barat	-	-	-
Kambowa	-	-	-
Wakorumba Utara	-	-	-
Jumlah	51	95	101

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara (2019)

Pada tabel diatas menunjukan bahwa tiap tahun jumlah TPS di Kecamatan Kulisusu mengalami kenaikan sementara di kecamatan lain tidak ada sama sekali TPS yang dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup. Masyarakat yang belum memiliki TPS di kecamatan lain mengelola sampah mereka dengan menyediakan

sendiri tempat pembuangan disekitar rumah masing-masing atau dengan cara membakar dan membuang ditempat lain seperti disungai maupun dilaut. Hasil wawancara sementara dengan Kepala Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan bahwa TPS yang tersisa dari tahun 2018 sampai tahun 2019 berjumlah 24 unit. Seperti yang dikatakan oleh Sahil (2016: 483) bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi pengolahan sampah yang dianggap sebagai penghambat sistem adalah penyebaran dan kepadatan penduduk, sosial ekonomi dan karakteristik lingkungan fisik, sikap, perilaku serta budaya yang ada di masyarakat. Dengan merusak tempat penampungan sementara (TPS) semakin menambah masalah dalam pengelolaan sampah. Seperti pada umumnya masyarakat yang tidak mempunyai tempat pembuangan sampah maka sampah tersebut akan dibuang disembarang tempat, baik di pinggir jalan, di laut, maupun sungai yang mengakibatkan sampah bertebaran dimana-mana sehingga keindahan dan kebersihan lingkungan tidak terjaga lagi.

Pengolahan sampah seharusnya menerapkan konsep *Reuse, Reduce* dan *Recycle* (3-R) sehingga tempat pengolahan sampah harus tersedia untuk mengurangi timbunan sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA) masih menggunakan paradigma pengelolaan sampah kumpul-angkut-buang sehingga menambah beban di lokasi sekitar TPA. Pengelolaan tersebut belum mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2014-2019 yaitu meningkatkan jumlah sampah terangkut 75% hingga akhir tahun 2019 serta meningkatkan kinerja pengelolaan

TPA yang berwawasan lingkungan pada semua kota-kota metropolitan, kota besar dan kota sedang.

Menurut Damanhuri (2010: 11) Sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dikeluarkan, kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum di Indonesia memposisikan bahwa pengelolaan sampah perkotaan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari lima komponen sub sistem, yaitu: (1) Peraturan/hukum, (2) Kelembagaan dan organisasi (3) Teknik operasional, (4) Pembiayaan, (5) Peran serta masyarakat.

Kelima komponen tersebut menjadi tanggung jawab yang harus dikelola dengan baik oleh Dinas Kebersihan dan menjadi sebuah tanggapan, mengingat pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara belum mencapai hasil yang diinginkan. Dalam menerapkan hal tersebut memerlukan waktu, contoh dan teladan yang positif serta konsisten dari pihak pengambil kebijakan dalam memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat.

Sangat penting menetapkan kejelasan pengaturan kewenangan strategi bidang hukum yang terkait dengan pengelolaan sampah, mengingat kewenangan dalam investasi peralatan, penagihan, kewenangan dalam penerapan sangksi dan lainnya. Dari aspek peraturan hukum belum adanya aturan yang berlaku tentangan penagihan atau retribusi serta sangksi aturan bagi yang membuang sampah disembarang tempat maka akan lemah ketika berbicara tentang fungsi dan kewenangan dalam mengatasi persoalan sampah. Dari aspek kelembagaan dan organisasi, saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara mempunyai dua fungsi dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai regulator dan operator,

sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik. Dengan berbagai peran yang dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup maka proses pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara tidak berjalan dengan baik, dalam hal ini Dinas Lingkungan hidup mendominasi dalam proses pengelolaan sampah. Sedangkan sumberdaya yang dimiliki sangat terbatas untuk mengatasi masalah sampah yang saat ini kian marak di lingkungan masyarakat. Selain itu status dan kapasitas lembaga pengelolaan kebersihan masih ada dibawah Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup.

Penetapan kejelasan tanggung jawab lebih terarah pada lingkup tugas secara operasional. Belum terangkutnya sampah secara maksimal di beberapa tempat merupakan kendala yang dihadapi oleh petugas dalam menangani sampah sehari-hari. Untuk itu diperlukan efektifitas kerja yang tinggi serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung operasional pengelolaan sampah secara menyeluruh. Menurut penuturan kasubag perencanaan belum optimalnya manajemen di setiap fungsi dinas menjadi penyebab kelemahan ini. Penyebab lemahnya pengelolaan sampah antara lain karena minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan kebersihan kota. Alternatif untuk pembiayaan salah satunya adalah retribusi kebersihan dari masyarakat, namun gagasan tersebut belum terealisasi sehingga biaya masih menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, mengutip dari Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kabupaten Buton Utara (PTMP) bahwa, kinerja sistem operasional pengelolaan sampah Kabupaten Buton Utara tidak akan mencapai tingkat optimum tanpa adanya peran aktif masyarakat. Masyarakat

bukan lagi sebagai obyek pelayanan, tetapi harus dipandang sebagai salah satu *stakeholders* yang dituntut peran aktifnya dalam pengelolaan sampah (PTMP, 2017: 84)

Seiring dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Buton Utara dalam pengelolaan sampah, maka pemerintah sulit berdiri sendiri, sehingga persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab berbagi pihak. Keterlibatan masyarakat maupun swasta dalam pengelolaan sampah menjadi solusi dalam penanganan sampah secara komprehensif, sehingga pemerintah tidak bisa mendominasi sebagai regulator, eksekutor, dan pengawas dalam pengelolaan sampah demi terlaksananya pengelolaan sampah yang baik.

Dalam perkembangan ilmu administrasi publik dominasi pemerintah dalam pengelolaan kepentingan publik harus memikirkan tentang perkembangan dan kemajuan ekonomi dan globalisasi, sehingga pemerintah perlu bekerjasama dengan aktor lain, seperti masyarakat dan pihak swasta yang dikenal dengan istilah *governance*. Dalam konsep *governance*, pemerintah atau *government* merupakan salah satu aktor dan bukan menjadi aktor tunggal dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan. *Governance* hanya akan terwujud jika muncul kolaborasi, kemitraan, dan jejaring antar elemen-elemen *governance*, yaitu negara, sektor swasta dan masyarakat sipil. Jejaring menjadi ciri penting dari pengembangan organisasi modern saat ini, baik organisasi swasta atau publik (Setyowati, 2015: 141). Salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi sebuah program adalah adanya

kerjasama/kolaborasi antar aktor untuk mengatasi masalah keterbatasan yang dihadapi oleh suatu lembaga atau institusi.

Menurut Ansell dan Gash (2008: 2) *collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset. *Collaborative governance* muncul seiring dengan pergeseran paradigma baru dalam administrasi publik untuk meningkatkan kerjasama berbagai *stakeholders* dalam menyelesaikan masalah-masalah publik. Dalam prakteknya penerapan model kolaborasi telah banyak dilakukan beberapa daerah di Indonesia. Seperti *collaborative governance* dalam pengelolaan bank sampah di Kabupaten Bandung. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah yang dibahas dalam penelitian ini adalah semakin meningkatnya volume sampah dari hari kehari karena tidak terangkut dan tidak tertangani dengan baik. Maka dibutuhkan solusi yang inovatif dalam mengurangi volume sampah dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang membutuhkan peran pemerintah, pihak swasta dan aktor utama yaitu masyarakat (Fauziah, 2018: 8). Selain itu model kolaborasi *stakeholders* dalam pengelolaan ruang terbuka hijau taman bungkul kota Surabaya merupakan salah satu model kolaborasi yang cukup berhasil dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.

Melihat beberapa contoh diatas, dengan segala keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dalam implementasi sebuah kebijakan membutuhkan sistem kelembagaan yang mampu menggerakkan partisipasi diberbagai pihak dalam berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Praktek implementasi dengan melibatkan ragam *stakeholders* merupakan bukan hal yang mudah dan membutuhkan beberapa prasyarat seperti jejaring yang kuat, tingkat kepercayaan yang memadai hingga akuntabilitas dari masing-masing aktor yang terlibat.

Namun masalah tersebut akan lebih sulit jika dilakukan tanpa adanya kepedulian dari berbagi pihak. Maka dari itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Buton Utara yaitu dengan pendekatan *Collaborative governance*. Model tersebut penting diterapkan untuk mengatasi masalah lemahnya pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Dengan pendekatan *collaborative governance* maka sistem kelembagaan akan lebih mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan lainnya dan juga menciptakan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan sampah. Pemerintah dapat berperan sebagai regulator, sementara eksekutor dan pengawasan dilakukan bersama-sama dalam menjaga lingkungan yang bersih dan bebas sampah.

Melihat dari permasalahan diatas peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara. Dengan penelitin ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan merubah paradigma lama dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara. Sehingga akan terjadi kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan yang diharapkan dapat menjadi

solusi yang baik dan berkelanjutan. Untuk itu penelitian ini berjudul
**“Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif *Collaborative Governance* di
 Kabupaten Buton Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara ?
2. Bagaimanakah pengelolaan sampah berdasarkan perspektif *collaborative governance* di Kabupaten Buton Utara ?
3. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara dari perspektif *collaborative governance*.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang penghambat dan pendukung dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan dua manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dalam ilmu administrasi publik khususnya dibidang manajemen publik terkait dengan pengelolaan sampah dalam perspektif *collaborative governance*.

2. Manfaat praktis

Untuk memberikan masukan/kotribusi kepada pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara khususnya bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yang baik, dengan melibatkan langsung masyarakat dan swasta untuk dijadikan pedoman dan ucuan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, bebas sampah, dan membuat sampah menjadi sesuatu yang berguna dan bisa dimanfaatkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian perspektif *governance* dalam pengelolaan sampah yang menjadi bahan acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Hanna Fauziah (2018) dalam penelitiannya “Analisis *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kabupaten Bandung” permasalahan dari penelitian ini berusaha untuk menganalisis kerjasama atau kolaborasi antar *stakeholders* dalam mengelola bank sampah agar berjalan dengan optimal dengan tujuan melihat faktor-faktor keberhasilan kolaborasi yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan bank sampah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu peneliti berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi dilapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil dalam penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengelolaan bank sampah masih belum berhasil dengan baik, dikarenakan ada beberapa faktor yang belum optimal dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung. Faktor yang harus ditingkatkan antara lain faktor komunikasi, pembuatan keputusan konsensus, tujuan, kepemimpinan, pembagian sumberdaya, dan modal sosial pada isu kepercayaan.

Deny Irawan (2017) Dalam penelitiannya berjudul “*Collaborative Governance* (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)” meneliti tentang proses kolaborasi yang dilakukan pemerintah dan pihak swasta dalam pengendalian pencemaran udara di Surabaya dengan menggunakan 8 komponen konsep *network governance* menurut Devee (2007) dalam Sudarmono (2010) yakni *networked structure, commitmen to purpose, trust to among participant, governance, acces to authority, distributive accountability/responsibility, information sharing, dan acces to resource*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses tata kelola kolaboratif dalam pemeliharaan polusi udara di Kota Surabaya

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan, dapat disimpulkan bahwa proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu *Identifying Obstacles and Opportunities, Debating Strategies for Influence*, dan *Planning Collaborative Actions* belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari kriteria pemerintahan kolaboratif yang masih belum terpenuhi terutama kriteria *Distributive Accountability dan Access to Resources* pada tahap *Debating Strategies for Influence*. Kriteria tersebut menunjukkan kurangnya keterlibatan *stakeholders* lain di dalam forum kolaborasi, dan ketersediaan sumber keuangan yang masih belum mencukupi. Pada kriteria ketersediaan sumber daya keuangan masih menjadi kendala utama karena minimnya penyediaan anggaran yang diatur dalam RAPBD

untuk penanganan masalah pencemaran udara di Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan masih kurangnya komitmen dari pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Imelda Merry Melyanti (2014) dalam jurnalnya berjudul “Pola Kemitraan Pemerintah, *Civil Society*, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo” meneliti tentang usaha merevitalisasi pasar tradisional di Pasar Baru dalam bentuk fisik dan program peningkatan kesehatan lingkungan yang disebut bank sampah. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pola kemitraan pemerintah, *civil society*, dan swasta dalam program bank sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo, bagaimana perannya, proses apa saja yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kemitraan, dan manfaat yang diperoleh masing-masing aktor dan kelompok sasaran dari adanya kemitraan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pola kemitraan yang terjadi adalah mutualistis kemitraan. Pemerintah sebagai penguat komitmen, mendampingi, dan berkontribusi baik fisik maupun non fisik. Untuk pihak swasta berperan dalam memberikan bantuan fisik maupun non fisik dan *civil society* sebagai pihak yang mengoperasikan bank sampah. Selain itu, manfaatnya untuk pemerintah pasar menjadi bersih, masyarakat sipil mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan juga pendapatan tambahan, bagi pedagang dapat memperoleh penghasilan tambahan dan pengunjung dapat berbelanja dengan nyaman.

Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko, dan Moh. Imron (2017) dengan judul penelitian “*Collaborative Governance* Dalam Penguatan Kelembagaan

Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) Di Kabupaten Banyumas". Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi program

Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas yang belum mampu mencapai tujuan kebijakan. Indikasinya adalah aksesibilitas masyarakat terhadap program yang belum merata serta tata kelola kelembagaan yang belum efektif. Hal tersebut disebabkan sistem kelembagaan program belum mampu mengelola interaksi sosial diantara berbagai pihak yang terlibat.

Akibatnya mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan program belum dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem kelembagaan yang mampu mengelola interaksi sosial diantara berbagai pihak.

Model yang tepat bagi penguatan kelembagaan program SLBM adalah model sistem kelembagaan yang mampu membangun *administrative network* yang sinergis dan luas antar berbagai *stakeholders*. Berdasarkan kondisi tersebut,

penelitian ini menghasilkan model bagi penguatan kelembagaan melalui pendekatan *collaborative governance*. Penelitian ini berupaya menggalang persoalan

kelembagaan pada implementasi sebuah program. Dengan menggunakan instrumen yang pernah disampaikan Ansell dan Gash (2007) penelitian ini dapat

menghasilkan sebuah alternatif model pengelolaan kelembagaan yang berbasis pada *collaborative governance*. Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya

partisipasi masyarakat dan pelaksanaan program yang masih bercorak *top-down* membuat kinerja kelembagaan pada program SLBM di Kabupaten Banyumas

masih belum optimal. Upaya yang dilakukan adalah kerjasama kolaboratif di antara segenap *stakeholders* untuk membuat pelaksanaan program berbasis

masyarakat lebih efektif sesuai harapan masyarakat. Pemerintah daerah perlu membuat pedoman implementasi program yang jelas mulai dari proses kesepakatan bersama sampai dengan sistem akuntabilitas berdasarkan peran masing-masing *stakeholders*. Terakhir, proses belajar masyarakat dalam pengelolaan program untuk menjamin keberlangsungan program juga harus terus dikawal sampai terwujudnya sistem pengelolaan yang ideal.

Slamet Rosyadi dan Erna Lestianingrum (2013) dengan penelitian yang berjudul “Permodalan Sampah Permukiman Berbasih Manajemen Kolaborasi (Studi Kasus di Desa Palimanan Barat Kabupaten Cirebon)”. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan mendeskripsikan pola kolaborasi antara pihak swasta dan masyarakat dalam membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah yang dihasilkan di wilayah permukiman warga dengan menggunakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi diantaranya komitmen, partisipasi aktif semua aktor, profesionalisme dan transparansi. Kolaborasi yang dilakukan melibatkan antara sektor publik dan swasta. Sektor publik yakni pihak Pemerintah Desa Palimanan Barat dan BUM Desa bersama PT Indocement Tungal Prakasa Tbk. Hasil-hasil yang diperoleh dari kolaborasi *public-private* ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui BUMDES, peningkatan kapasitas institusi lokal, dan perbaikan lingkungan permukiman.

Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq (2017) judul penelitian *Collaborative governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar *Stakeholders* Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Dalam penelitian ini membahas tentang kolaborasi antar *stakeholders* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam

pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses tata kelola kolaboratif terkait dengan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo, dan juga kendala dalam implementasi proses kolaborasi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, proses kolaborasi dalam pengembangan minapolitan di wilayah Sidoarjo telah berjalan cukup baik. Karena kolaborasi telah dilakukan melalui keterlibatan yang berprinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk aksi bersama. Kemudian, proses dilanjutkan dengan tindakan kolaboratif yang dapat memengaruhi dampak sementara. Penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi meliputi: tantangan dalam pembentukan kelompok bisnis menjadi badan hukum, kurangnya keberlanjutan kolaborasi, peran pemerintah yang terbatas dalam memfasilitasi alternatif pemasaran bagi kelompok usaha, dan terakhir, kurangnya keterlibatan pihak swasta dalam semua kegiatan kolaborasi.

Nachalida Yukalang, Beverley Clarke, and Kirstin Ross (2018) dengan judul penelitian *“Solid Waste Management Solutions for a Rapidly Urbanizing Area in Thailand: Recommendations Based on Stakeholders Input”*. Dalam jurnal ini membahas pengelolaan sampah padat kota di timur laut Thailand, studi kasus di *Tha Khon Yang Sub-district Municipality (TKYSM)* Provinsi Maha Sarakham. pertumbuhan populasi dan ekonomi yang cepat menyebabkan peningkatan penggunaan barang-barang konsumen sehingga memicu peningkatan limbah padat kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi yang baik terhadap upaya permasalahan pengelolaan sampah di TKYSM, sehingga

dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk daerah lain yang menghadapi masalah serupa.

Hasil dari penelitian ini bahwa pengelolaan sampah padat dapat dicapai dengan melibatkan para pemangku kepentingan, staf dari *Tha Khon Yang Sub-district Municipality* (TKYSM), akademisi dan administrator. Salah satu kendala dalam pengelolaan sampah padata di TKYSM adalah masalah biaya. Membangun tempat pembuangan limbah baru bukanlah pilihan yang tepat karena tidak berkelanjutan. Sebagai solusi dalam permasalahan ini diupayakan sistem sederhana yang didasarkan pada daur ulang dan penggunaan kembali sampah yang diolah. Peraturan dan regulasi harus jelas dan dikembangkan dengan pendekatan bottom-up untuk memastikan bahwa perubahan tersebut sesuai dengan kebutuhan budaya lokal yang berbeda di daerah tersebut.

Carlos Martin Rios , Christine Demen Meier , Stefan Gossling, Clemence Cornuz (2018) dengan judul penelitian "*Food waste management innovations in the foodservice industry*". Dalam penelitian ini membahas tentang inovasi pengelolaan sampah makanan dalam industri jasa makanan. Sisa makanan sering dibuang begitu saja tanpa ada pengolahan berkelanjutan sehingga menjadi sampah yang tidak berguna. Mengolah sisa makanan adalah tantangan bagi industri jasa makanan dan masih sedikit literatur yang membahas tentang inovasi pengelolaan sampah makanan. Jurnal ini menggunakan manajemen inovasi dan konstruksi sosial untuk menyelidiki hubungan timbal balik ketentuan layanan makanan dan inovasi dalam pengelolaan limbah. Jurnal ini menyajikan berbagai inisiatif pengelolaan limbah, yang menunjukkan bahwa implementasinya dalam sektor

jasa makanan bervariasi tergantung pada keyakinan, pengetahuan, tujuan, dan tindakan manajemen. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau pendekatan terhadap pemborosan manajemen dalam industri jasa makanan dengan tujuan untuk mengidentifikasi inovasi dan untuk membahas implikasinya bagi pengelolaan limbah.

Temuan utama adalah bahwa banyak perusahaan tidak aktif berinovasi dalam pengelolaan sampah. Namun mereka semakin sadar dari kepentingan ekonomi dan sosial dari pengelolaan limbah. Organisasi yang serius dalam pengelolaan sampah akan mendapatkan manfaat yang baik dengan bermitra dengan perusahaan pihak ketiga. Pada sisi negatifnya, industri jasa makanan tidak memberikan peluang yang besar dalam inovasi. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini, hanya ada beberapa restoran tanpa limbah, dan beberapa koki yang membuat makanan dari sisa makanan. Kurangnya definisi dan konsistensi yang sama dan umum di seluruh studi mungkin menjadi salah satu alasan di mana sektor jasa makanan tertinggal dari industri lain dalam hal pengelolaan limbah makanan. Ini juga membutuhkan alat dan konsep untuk mendesain praktik inovatif yang mendukung sistem pengelolaan limbah yang efektif.

Jecton Anyango Tocho dan Timothy Mwololo Waema (2013) dalam penelitiannya berjudul *"Towards an e-waste management framework in Kenya"*.

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan kerangka kerja peraturan yang ideal untuk *e-waste* manajemen dalam menangani pengumpulan, transportasi, pemrosesan, daur ulang, pembuangan dan pemantauan aliran baru sampah padat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Infrastruktur dalam

pengumpulan limbah elektronik, transportasi, perawatan, penyimpanan, pemulihan dan pembuangan perlu ditingkatkan di tingkat nasional dan/atau regional untuk pengelolaan limbah elektronik yang berwawasan lingkungan.

Disamping itu perlu ada kolaborasi yang kuat di antara semua pemangku kepentingan dalam menangani masalah *e-waste*. Tingkat kebijakan intervensi harus mencakup pengembangan peraturan limbah elektronik, kontrol impor dan ekspor limbah elektronik, memelihara registrasi limbah elektronik nasional dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur. Universitas dan institusi akademis lainnya harus memainkan peran aktif dalam penciptaan kesadaran, pelatihan, penelitian limbah elektronik dan transfer teknologi. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk menetapkan target pengumpulan dan penggunaan kembali/daur ulang.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Pengarang/Tahun/ Judul	Permasalahan dan Tujuan Penelitian	Teori Dalam Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan penelitian yang dilakukan	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
1.	Hanna Fauziah (2018) dalam penelitiannya Analisis <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kabupaten Bandung	Bagaimana mengatasi permasalahan sampah khususnya tentang program bank sampah agar berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat faktor- faktor keberhasilan kolaborasi yang perlu di tingkatkan dalam pengelolaan bank sampah	Collaborative Governance	Metode penelitian kualitatif dengan tekni k analisis deskriptif.	Hasil dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan bank sampah masih belum berhasil dengan baik, dikarenakan ada beberapa faktor yang belum optimal dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung. Faktor yang harus ditingkatkan antara lain faktor komunikasi, pembuatan keputusan konsensus, tujuan, kepemimpinan, pembagian sumberdaya, dan modal sosial pada isu kepercayaan.	Pengelolaan dengan pendekatan <i>collaborative governance</i>	Menganalisis pengelolaan bank sampah

2.	Irawan (2017). Dalam penelitiannya berjudul <i>Collaborative Governance</i> (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)	Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan pemerintah dan pihak swasta dalam mengendalikan pencemaran udara disurabaya. Tujuannya untuk mendeskripsikan dan mengetahui proses tata kelola kolaboratif dalam pemeliharaan polusi udara di Kota Surabaya	<i>Collaborative Governance</i>	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif	Proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya yang dilakukan melalui tiga tahapan belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari kriteria pemerintahan kolaboratif yang masih belum terpenuhi terutama kriteria <i>Distributive Accountability dan Access to Resources</i> pada tahap Debating Strategies for Influence, Karena kurangnya keterlibatan <i>stakeholders</i> lain di dalam forum kolaborasi dan dana yang terbatas.	Penggunaan teori <i>Collaborative Governance</i> dalam membahas permasalahan	Dalam penelitian ini menggunakan 8 komponen konsep <i>network governance</i> menurut DeVee (2007) dalam Sudarmono (2010) yakni <i>networked structure, commitment to purpose, trust to among participant, governance, acces to authority, distributive accountability/responsibility, information sharing, dan acces to resource</i>
3.	Merry Melyanti	Permasalahan	Teori	Peneliti	Pola kemitraan yang	Pembahasan	Dalam

(2014) dalam jurnalnya berjudul Pola Kemitraan Pemerintah, <i>Civil Society</i> , dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo	yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pola kemitraan pemerintah, <i>civil society</i> , dan swasta dalam program bank sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo, bagaimana perannya, proses apa saja yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kemitraan, dan manfaat yang diperoleh masing-masing aktor dan kelompok sasaran dari adanya kemitraan. Dengan tujuan untuk mengetahui pola kemitraan yang terjadi	Kemitraan	menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif	terjadi adalah mutualistis kemitraan. Pemerintah sebagai penguat komitmen, mendampingi, dan berkontribusi baik fisik maupun non fisik. Untuk pihak swasta berperan dalam memberikan bantuan fisik maupun non fisik dan <i>civil society</i> sebagai pihak yang mengoperasikan bank sampah. Selain itu, manfaatnya untuk pemerintah pasar menjadi bersih, masyarakat sipil mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan juga pendapatan tambahan, bagi pedagang dapat memperoleh penghasilan tambahan dan pengunjung dapat berbelanja dengan nyaman.	tentang pola kemitraan yaitu kerja sama antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan program bank sampah	pembahasan untuk mengetahui pola kemitraan yang telah terjadi antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
---	--	-----------	--	---	--	---

		dalam program bank sampah					
4.	Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko, dan Moh. Imron (2017) dengan judul penelitian “ <i>Collaborative Governance</i> Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) Di Kabupaten Banyumas”	Penelitian ini bermaksud menganalisa kinerja Kelembagaan kelompok swadaya masyarakat (KSM) serta aspek yang mampu mendukung dan menghambat kinerja kelembagaan KSM. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang kinerja kelembagaan KSM dalam program Slmb di Kabupaten	<i>Collaborative Governance</i>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Kurangnya partisipasi masyarakat dan pelaksanaan program yang masih bercorak <i>top-down</i> membuat kinerja kelembagaan pada program SLBM di Kabupaten Banyumas masih belum optimal. Upaya yang dilakukan adalah kerjasama kolaboratif di antara segenap <i>stakeholders</i> dan Pemerintah daerah perlu membuat pedoman implementasi program yang jelas mulai dari proses kesepakatan bersama sampai dengan sistem akuntabilitas berdasarkan peran masing-masing <i>stakeholders</i> .	Pembahasan tentang kolaborasi sebagai solusi dalam memecahkan persoalan	Membahas tentang kolaborasi dalam Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)

		Banyumas					
5.	Slamet Rosyadi dan Erna Lestianingrum (2013) dengan penelitian yang berjudul Permodelan Sampah Permukiman Berbasis Manajemen Kolaborasi (Studi Kasus di Desa Palimanan Barat Kabupaten Cirebon).	Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakan kolaborasi antara swasta dan masyarakat dalam membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola kolaborasi antara pihak swasta dan masyarakat dalam membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah yang dihasilkan di wilayah	Manajemen Kolaborasi	Penelitian ini memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap mengenai pola kolaborasi dalam pengelolaan sampah permukiman	Kolaborasi antara masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan baik Hasil-hasil yang diperoleh dari kolaborasi <i>public-private</i> ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui BUMDES, peningkatan kapasitas institusi lokal, dan perbaikan lingkungan permukiman	Kolaborasi yang terjalin antara pemerintah dan pihak swasta dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah yang dihasilkan di wilayah permukiman warga.	Kolaborasi telah dilakukan oleh swasta dan masyarakat dalam membantu pemerintah untuk mengatasi masalah sampah

		permukiman warga					
	Penelitian oleh Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq (2017) Kolaborasi antar <i>stakeholders</i> (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo	Dalam penelitian ini membahas tentang Kolaborasi antar <i>stakeholders</i> (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses tata kelola kolaboratif terkait dengan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo, dan juga kendala dalam implementasi	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	<i>Collaborative Governance</i>	Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kolaborasi dalam pengembangan minapolitan di Sidoarjo telah berjalan cukup baik. kolaborasi telah dilakukan melalui keterlibatan yang berprinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk aksi bersama. Temuan lain bahwa hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi meliputi: tantangan pembentukan kelompok bisnis menjadi badan hukum, kurangnya keberlanjutan kolaborasi, peran pemerintah yang terbatas dalam memfasilitasi alternatif pemasaran bagi kelompok usaha, dan kurangnya keterlibatan pihak swasta dalam semua kegiatan kolaborasi.	Penggunaan teori yang ada dalam penelitian ini menyangkut <i>collaborative governance</i>	Dalam penelitian ini kolaborasi telah terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga fokus penelitian tentang bagaimana kolaborasi antara <i>stakeholders</i> dalam pengembangan kawasan minapolitan

		proses kolaborasi.					
7.	Penelitian oleh Nachalida Yukalang, Beverley Clarke, dan Kirstin Ross (2018) <i>Waste Management Solutions for a Rapidly Urbanizing Area in Thailand: Recommendations Based on Stakeholders Input</i>	Dalam jurnal ini membahas tentang pengelolaan limbah padat, studi kasus di Kotamadya Tha Khon Yang Kotamadya (TKYSM) di Provinsi Maha Sarakham Thailand. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi yang layak dalam pengelolaan limbah di TKYSM, dan diharapkan akan memberikan dampak positif ke tempat lain yang mempunyai	Teori pengelolaan sampah	Metode penelitian kualitatif	Pengelolaan sampa padat dapat dicapai dengan melibatkan para pemangku kepentingan, staf dari <i>Tha Khon Yang Sub-district Municipality</i> (TKYSM), akademisi dan administrator. Salah satu kendala dalam pengelolaan sampah padata di TKYSM adalah masalah biaya. Membangun tempat pembuangan limbah baru bukanlah pilihan yang tepat karena tidak berkelanjutan. Sebagai solusi dalam permasalahan ini diupayakan sistem sederhana yang didasarkan pada daur ulang dan penggunaan kembali sampah yang diolah. Peraturan dan regulasi harus jelas dan dikembangkan dengan	Pengelolaan sampah dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya dalam usaha menangani masalah sampah	Lebih fokus dalam teori pengelolaan sampah bukan teori kolaborasi

		masalah yang sama.			pendekatan <i>bottom-up</i> untuk memastikan bahwa perubahan tersebut sesuai dengan kebutuhan budaya lokal yang berbeda di daerah tersebut.		
8.	Carlos Martin Rios, Christine Demen Meier, Stefan Gossling, Clemence Cornuz, (2018) <i>Food waste management innovations in the foodservice industry</i>	Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengelola sampah makanan dalam industri jasa makanan. Dengan tujuan untuk mencari solusi dan berinovasi dalam mengurangi sampah makanan.	Teori pengelolaan sampah	Metode penelitian kualitatif	Temuan utama adalah banyak perusahaan tidak aktif berinovasi dalam pengelolaan sampah khususnya sampah makanan. Namun mereka semakin sadar akan pentingnya dari segi ekonomi dan sosial dari pengelolaan sampah. Hanya ada sedikit restoran yang mengelola sampah makanan, seperti yang dilakukan oleh beberapa juru masak mengolah makanan berasal dari sisa makanan. Sektor jasa makanan tertinggal dari industri lain dalam hal pengelolaan sampah, sehingga membutuhkan alat dan konsep untuk	Bagaimana mengelola sampah sehingga dapat berguna dan mempunyai nilai dengan cara memanfaatkan kembali sisa buangan sampah	Fokus dalam teori manajemen sampah makanan bukan teori kolaborasi yang membahas tentang inovasi dalam pengelolaan sampah makanan sehingga sampah yang dihasilkan dapat bermanfaat.

					mendesain praktik inovatif dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang efektif.		
9.	Penelitian Jecton Anyango Tocho dan Timothy Mwololo Waema (2013) dengan judul <i>Towards an e-waste management framework in Kenya</i>	Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan limbah elektronik (e-waste) di Kenya. Selain itu untuk menganalisis bagaimana negara lain mengelola limbah elektronik dan mengidentifikasi pelajaran apa yang bisa diambil dari mereka. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan	Teori pengelolaan sampah	Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif	Infrastruktur kelembagaan untuk pengumpulan sampah elektronik, transportasi, perawatan, penyimpanan, pemulihan dan pembuangan perlu ditetapkan di tingkat nasional dan regional untuk pengelolaan limbah elektronik yang berwawasan lingkungan. Diperlukan kolaborasi yang kuat di antara semua pemangku kepentingan dalam menangani masalah <i>e-waste</i> . Universitas dan institusi akademis lainnya harus memainkan peran aktif dalam	Membahas tentang pengelolaan sampah dan mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah pengelolaan sampah.	Pengelolaan sampah yang membahas tentang sampah elektronik

		gambaran umum praktik manajemen limbah elektronik (e-waste) dan mengembangkan kerangka peraturan yang ideal untuk pengelolaan e-waste di Kenya.		penciptaan kesadaran, pelatihan, penelitian limbah elektronik dan transfer teknologi. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk menetapkan target pengumpulan dan penggunaan kembali / daur ulang		
--	--	---	--	--	--	--

2.2 Perkembangan Ilmu Administrasi Publik

Dalam perkembangannya Ilmu Administrasi Publik mengalami beberapa kali pergeseran paradigma yang berawal dari paradigma *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM) dan juga *New Public Service* (NPS) yang berkembang sejak pertengahan tahun 1990an hingga sekarang. Pengertian administrasi secara luas menurut Siagian yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011:3) mengatakan, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya. Menurut Siagian (2002: 2) administrasi adalah, keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari beberapa definisi tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dalam administrasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan diperlukan suatu kemampuan dan motivasi untuk mendorong orang-orang dan diri sendiri untuk melaksanakan dan menggerakkan suatu organisasi pemerintah. Sementara itu, *public* merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*public*". Yang berarti orang banyak (umum). Sementara administrasi publik adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *public administration* yang sering juga diterjemhakan kedalam Bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan. (Sjamsiar, 2016: 105)

Dalam perkembangan ilmu administrasi negara mengalami perdebatan antara beberapa ilmuwan dan praktisi administrasi negara dan administrasi bisnis, sehingga

perlu mengembangkan teori dan pendekatan yang berbeda dengan administrasi bisnis.

Karena karakteristik antara birokrasi pemerintahan dan organisasi swasta sangat berbeda. Sehingga identitas ilmu administrasi negara makin jelas dengan

menempatkan proses administrasi sebagai pusat perhatian (fokus) dan lembaga pemerintah sebagai tempat praktik (lokus). Menurut Thoah (2008: 66)

mengemukakan bahwa, di Indonesia kita mengenal selama ini istilah *public administration* selalu dialih bahasakan kedalam bahasa Indonesia dengan sebutan administrasi negara. Terjemahan ini sekarang banyak dipertanyakan oleh beberapa kalangan akademisi, berbarengan dengan gejolak perubahan masyarakat yang semakin dinamis. Publik lebih ditekankan pada pemahaman negara. Oleh karena itu, corak sarwa negara lebih menonjol dibandingkan corak yang bersarwa masyarakat atau rakyat.

Warsito (2005: 7) berpendapat bahwa, sesungguhnya telah terjadi perubahan makna *public* sebagai negara, menjadi *public* sebagai masyarakat. bukan lagi terlalu berorientasi kepada aktivitas oleh negara, tetapi menjadi oleh, untuk dan kepada masyarakat. pendekatan tidak lagi kepada negara tetapi lebih kepada masyarakat. Dan hal ini juga sesuai dengan tuntutan perubahan dari *government* yang lebih menitikberatkan kepada otoritas menjadi *governance* yang lebih menitikberatkan kepada kompatibilitas. Hal tersebut sejalan dengan Thoah (2008: 67) bahwa pemahaman istilah *public* seperti yang diletakan sebagai predikat pada istilah *administration* hendaknya dipahami sebagai predikat terhadap proses keperintahan (*governance*) yang selaras dengan perubahan paradigma tersebut.

Dengan demikian, istilah administrasi publik dapat diartikan sebagai administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, Chander dan Plano dalam Keban (2004: 3) mengemukakan bahwa, administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam publik. Pendapat lain dikemukakan oleh Henry dalam Harbani Pasolong (2008: 8) administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Perubahan paradigma dalam administrasi negara membawa pengaruh yang besar sekali dalam tata kehidupan pemerintahan. Salah satu pengaruhnya antara lain adalah ditematkannya rakyat pada posisi yang utama dalam mengukur keberhasilan pelayanan birokrasi pemerintahan. Manajemen pemerintahan tidak lagi berorientasi pada aspek pemerintahan (*government*) akan tetapi beralih kepada aspek tata pemerintahan (*governance*) (Thoha, 2008: 94). Dari perubahan paradigma dalam administrasi publik menepatkan *focus* dari ilmu administrasi publik adalah teori organisasi dan ilmu manajemen. Sedangkan *locus* dari administrasi publik adalah kepentingan publik (*public interest*) dan urusan publik (*public affair*). Beberapa pengertian tentang administrasi publik selalu menekankan bagaimana mengelola pemerintahan semata-mata tertuju pada kepentingan masyarakat. Dalam memahami

administrasi publik segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah tertuju pada isu-isu untuk menangani persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga jiwa dari ilmu administrasi publik eksistensinya hanya untuk melayani kepentingan masyarakat.

2.2.1 Old Public Administration (OPA)

Paradigma administrasi negara tradisional atau klasik merupakan paradigma yang berkembang pada awal kelahiran ilmu administrasi negara. Tokoh paradigma ini adalah antara lain adalah pelopor berdirinya ilmu administrasi negara Woodrow Wilson dengan karyanya "*The Study of Administration*"(1887) serta F.W. Taylor dengan bukunya "*Principles of Scientific Management*". Thoha (2008: 72) mengungkapkan bahwa, administrasi publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Woodrow Wilson seorang mantan presiden amerika AS dan Guru Besar Ilmu Politik di Princeton University AS mengatakan bahwa melaksanakan konstitusi itu lebih sulit ketimbang membuatnya. Selain itu dia juga menyatakan bahwa bidang administrasi itu adalah sama dengan bidang bisnis. Oleh karena itu wilson memberikan saran agar pemerintahan itu mempunyai struktur mengikuti model bisnis yakni mempunyai eksekutif otoritas, pengendalian, yang amat penting mempunyai struktur hierarki, dan upaya untuk melaksanakan kegiatan mewujudkan tujuan itu dilakukan secara efisien. Konsep seperti ini yang kemudian dikenal sebagai "*the old public administration*".

Ada dua tema kunci memahami administrasi negara seperti yang fondasinya telah diletakan oleh Woodrow Wilson. Pertama, ada perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. Perbedaan itu dikaitkan dengan akuntabilitas yang harus dijalankan oleh pejabat terpilih dan kompetensi yang netral dimiliki oleh administrator. Kedua, adanya perhatian untuk menciptakan struktur dan strategi pengelolaan administrasi yang memberikan hak organisasi publik dan manajernya yang memungkinkan untuk menjalankan tugas-tugas secara efisien dan efektif.

Konsep "*the old public administration*" ini dalam perjalanan sejarah memperoleh juga perkembangannya dengan konsep-konsep baru. Salah satu diantaranya timbulnya konsep rasional model yang dikemukakan oleh Herbert Simon melalui tulisannya tentang *Administrative Behavior*. Demikian juga konsep tentang *public choice* (Thoha, 2008: 73)

Adapun *mainstream* dari ide inti *the old public administration* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang.
2. *Public policy* dan *administration* berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik.
3. Adiministrasi publik hanya memainkan peran yang lebih kecil dari proses pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah ketimbang upaya untuk melaksanakan kebijakan publik.

4. Upaya memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik dan yang diberikan diskresi terbatas untuk melaksanakan tugasnya.
5. Para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis.
6. Program-program kegiatan diadministrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh para pejabat dari hierarki atas organisasi.
7. Nilai-nilai utama dari administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.
8. Administrasi dijalankan sangat efisien dan sangat tertutup, karena itu warga negara keterlibatannya sangat terbatas
9. Peran dari administrasi publik dirumuskan secara luas seperti *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting*. (Thoha, 2008: 73-74)

Ide konsep *the old public administration* ini bisa berlangsung pada semua sektor kehidupan pemerintahan, mulai dari hal atau sektor pertahanan, kesejahteraan rakyat, pendidikan transportasi, kesehatan masyarakat dan lain-lainnya.

2.2.2 Kelemahan *Old Public Administration*

Berdasarkan uraian diatas pembahasan tentang *old public administration* (OPA) mempunyai beberapa kekurangan dan mendapatkan kritikan dari beberapa para ahli. Kritik yang ditujukan terhadap Administrasi Publik model klasik seringkali

dikaitkan dengan karakteristik yang dianggap lamban, tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, penggunaan sumber daya publik yang sia-sia akibat hanya berfokus kepada proses dan prosedur dibandingkan kepada hasil. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan jiwa ilmu administrasi negara yang sejak pertama kali dikembangkan dan tujuan eksistensinya untuk melayani kepentingan masyarakat pada umumnya. Dalam pemahaman seperti itu maka kekuasaan yang selama ini berada pada penguasa sebenarnya adalah titipan yang seharusnya berdomisili pada masyarakat (Thoha, 2008: 67).

Beberapa kelemahan OPA diantaranya adalah karena struktur organisasi yang bersifat *top down* belum *bottom up* yaitu keputusan yang telah dibuat oleh legislator harus dilakukan oleh eksekutor tanpa melihat dan memahami keluhan, dan kendala dari pihak implementator (*bottom up*). Selain itu dengan menerapkan sistem rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat berhasil. Namun hal tersebut hanya fokus bagaimana menjalankan administrasi sesuai dengan perintah atasan dan aturan yang telah disepakati, sehingga terkesan tidak ada umpan balik dalam proses administrasi. Dalam penerapan *old public administration* tidak demokratis karena sifatnya tertutup dan tidak memberikan keterlibatan/partisipasi dari masyarakat. Artinya segala sesuatu masih diatur oleh pemerintah dan tidak ada pihak lain, tanpa adanya keterlibatan *stakeholders*. Dalam OPA karena masih kuatnya kewenangan penuh oleh pemerintah dalam membuat kebijakan, sifatnya pemerintah masih sangat kaku dan dirasa hanya menguntungkan

pemerintah dan tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Sehingga kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberi pelayanan kepada publik.

Dalam *old public administration* karakteristik formalisme birokrasi sering kali dikendalikan oleh hubungan-hubungan informal dan birokrasi hanya dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan rutin. Untuk itu diperlukan sebuah perubahan dalam administrasi publik dalam penyelenggaraan negara yang tertuju pada *public oriented*. Seperti yang dikatakan oleh Warsito (2005: 8) bahwa proses sistem prosedur *hierarchi*, atau *lawfull state* tidak lagi merupakan acuan yang utama meskipun tetap diketahui dan merupakan *skill*. Itulah sebabnya administrator dituntut untuk tidak saja memiliki *responsibility*, dan *accountability* tetapi juga harus memiliki *responsiveness*, *transparant*, *integrity* dan *impartiality*. Oleh karena itu paradigma OPA kurang relevan lagi dalam menempatkan persoalan-persoalan publik karena memiliki landasan filosofis dan ideologis yang kurang sesuai dengan administrasi Negara yakni menerapkan prinsip keterbukaan dan *responsiveness*, sehingga perlu dibuatnya paradigma baru.

2.2.3 New Public Management (NPM)

Dalam perjalanan administrasi publik telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (*Old Public Administration*) ke model manajemen publik baru (*New Public Management*). Konsep *New Public Management* (NPM) merupakan isu penting dalam reformasi sektor publik. Reformasi manajemen sektor publik muncul karena adanya kritik yang

ditunjukkan kepada organisasi sektor publik yang menimbulkan pergerakan untuk adanya perubahan dibidang administrasi publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik itu adalah munculnya konsep *New Public Management* yang dapat mempengaruhi proses perubahan organisasi sektor publik secara komprehensif di hampir seluruh dunia. Istilah *New Public Management* pada awalnya dikenalkan oleh Christoper Hood pada tahun 1991 yang kemudian disingkat dengan istilah NPM. Apabila dilihat melalui perspektif historis, pendekatan modern terhadap manajemen sektor publik tersebut awalnya muncul dari negaranegara Eropa sekitar tahun 1980-an dan 1990-an.

Menurut Thoha (2008 :74) tema pokok dalam *New Public Management* ini antara lain bagaimana menggunakan mekanisme pasar dan terminologi disektor publik. Bahwa dalam melakukan hubungan antara instansi-instansi pemerintah dengan pelanggannya dipahami sama dengan proses bubungan interaksi yang dilakukan oleh mereka dunia pasar. Dengan mentransformasikan kinerja pasar sperti ini makan dengan kata lain akan mengganti kebiasaan kinerja sektor publik dari tradisi berlandaskan aturan dan proses yang menggantungkan pada prioritas pejabat menjadi orientasi pasar, dan dipacu untuk berkompetisi sehat. Di dalam konsep *New Public Management* semua pimpinan didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal. Mereka tidak lagi melakukan *rowwing* melainkan melakukan *steering* membatasi terhadap pekerjaan atau fungsi mengendalikan, memimpin mengarahkan yang strategis saja. Konsep *New Public Management* ini dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin

menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah dengan mewiraswastakan birokrasi pemerintah. Ada sepuluh prinsip mewiraswastakan birokrasi pemerintah antara lain: pemerintah harus bersifat katalis, pemerintah milik masyarakat, pemerintah berorientasi misi, pemerintah berorientasi pada hasil, pemerintah berorientasi pada pelanggan, pemerintah berorientasi kewiraswastaan, pemerintah bersifat antisipatif, pemerintah melaksanakan desentralisasi, pemerintah berorientasi pada pasar, dan pemerintah bersifat kompetitif (Thoha, 2008: 78). Sepuluh prinsip ini dalam rangka melakukan pembaruan birokrasi pemerintah mencoba mengubah kinerja yang tidak produktif bisa berproduksi yang baik.

2.2.4 *New Public Service* (NPS)

New Public Service merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Denhard. Dalam pandangan NPM, organisasi pemerintah diibaratkan sebagai sebuah kapal sehingga paradigma steering rather than rowing ala NPM dikritik oleh Denhardt dan Denhardt sebagai paradigma yang melupakan siapa sebenarnya pemilik kapal. NPS adalah cara pandang baru dalam administrasi negara yang mencoba menutupi kelemahan-kelemahan paradigma OPA dan NPM. Menurut Thoha (2008: 84) Lahirnya *new public service* tidak bisa dipisahkan dengan pendahulunya. Ide dasar dari konsep ini dibangun dari konsep-konsep teori democratic citizenship, model komunitas dan civil society, organisasi humanism, post modern administrasi publik.

Empat konsep ini yang membangun ilmu administrasi negara pada babakan ketiga yang disebut *new public service*.

Perspektif *new public service* melihat dari sudut pandang atas warga negara dan posisinya sangat penting bagi pemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang sebagai semata persoalan kepentingan pribadi namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan dan mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama. Menurut Denhardt (2003: 15) administrasi publik dalam *New Public Service* harus memenuhi kriteria yakni melayani warga masyarakat, bukan pelanggan, Mengutamakan kepentingan publik, lebih menghargai kewarganegaraan daripada kewirausahaan, berpikir strategis dan bertindak demokratis, menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah, lebih menitikberatkan pada pelayanan daripada mengendalikan, Menghargai publik bukan dari produktivitas semata.

2.3 Collaborative Governance

2.3.1 Konsep Dasar Governance

Sebelum membahas istilah *collaborative governance* lebih jauh perlu dijelaskan mengenai arti dari *governance* itu sendiri sebagai dasar dari konsep *collaborative governance*. Dalam teori administrasi publik, *collaborative*

governance merupakan bagian dari konsep *governance* atau dengan kata lain Istilah *governance* merupakan dasar dari konsep *collaborative governance*. *Collaborative governance* merupakan salah satu pengembangan konsep dan keilmuan dari *Governance* yang bermanfaat untuk mencapai tujuan pemerintahan dalam pembangunan. Dalam aspek studi ilmu pemerintahan sering muncul istilah *government* dan *governance*, kedua istilah tersebut hampir serupa namun sebenarnya memiliki arti yang berbeda. *Government*, lebih mendominasi dan tertutup sehingga tidak ada keleluasaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan bersifat kaku, masyarakat pasif dan tidak ada andil dalam mencapuri urusan pemerintahan. Sedangkan *governance* melibatkan seluruh aktor, baik publik maupun *private* (swasta) dalam menjalankan tugas yang dijalankan oleh pemerintah sehingga bisa menempatkan pengaturan kebijakan sesuai kebutuhan fungsionalitasnya.

Governance berasal dari kata “*govern*” yang berarti mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Rewansyah (2010: 80) menjelaskan bahwa meskipun antara dua kata tersebut terdapat hubungan yang erat, tetapi pengertian yang terkandung dalam kata *governance* jauh lebih luas dari kata *government* meskipun kata asalnya sama, yaitu *to govern*. Menurut Kooiman dalam Kurniawan (2017: 148) *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Pada konteks ini, *governance* dapat diartikan

dengan bagaimana hubungan pemerintah dengan berbagai aktor yang terlibat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Sehingga, institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2003: 5).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa dalam konsep *governance*, dominasi pemerintah sebagai aktor tunggal menjadi sempit, sehingga dalam mengatur dan mengalokasikan sumberdaya harus bersama dengan aktor-aktor lain seperti sektor swasta dan masyarakat. Dengan adanya *governance* urusan-urusan publik menjadi hak dan tanggung jawab bersama menjadikan pemerintah tidak lagi dominan dan menciptakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan urusan-urusan publik.

Governance hanya akan terwujud jika muncul kolaborasi, kemitraan, dan jejaring antar elemen-elemen *governance*, yaitu negara, sektor swasta dan masyarakat sipil. Jejaring menjadi ciri penting dari pengembangan organisasi modern saat ini, baik organisasi swasta atau publik. Peran negara tidak lagi hanya menjalankan fungsi-fungsi regulatif, melainkan hanya menjalankan fungsi fasilitatif. Dengan demikian, *governance* menurut versi Bank Dunia hanya bisa ditegakkan dengan jalan melibatkan aktor-aktor non negara seluas-luasnya dan dengan membatasi intervensi pemerintah. Pratikno dalam (Setyowati dkk, 2015: 141). Sehubungan dengan keterlibatan multi aktor dalam *governance*, Stoker dalam (Ulum dan Ngindana, 2017:

6) merumuskan parameter penerapan konsep *governance* yang dirangkumnya ke dalam 5 aspek sebagai berikut:

1. *Governance* mengacu pada seperangkat institusi dan aktor yang diambil dari pemerintah maupun pihak di luar pemerintah;
2. *Governance* mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi;
3. *Governance* mengidentifikasi keterkaitan kekuatan dalam hubungan antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif;
4. *Governance* adalah mengenai jaringan aktor pemerintahan yang otonom;
5. *Governance* mengakui kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan atau menggunakan otoritas pemerintah.

Uraian diatas menjelaskan bahwa ketiga aktor saling berkolaborasi dan bersinergi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, jejaring berbagai aktor diupayakan untuk mengatasi persoalan sosial ekonomi masyarakat. *Governance* mengharuskan adanya kinerja kolektif dengan berbagai aktor seperti dalam urusan pengelolaan sampah, pemerintah membuat kebijakan dalam mengatur jalannya program pengelolaan sampah, swasta berkontribusi dengan dukungan finansialnya, sedangkan masyarakat aktif menjaga kebersihan lingkungan seperti pengurangan dan pemilahan sampah serta membayar retribusi dalam pengelolaan sampah.

2.3.2 Makna Kolaborasi

Terma kedua yang mendukung konsep *collaborative governance* yaitu kolaborasi. Secara epistemologi, kata kolaborasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *co-labour* yang artinya bekerja bersama. Pada abad ke-19 kata kolaborasi mulai digunakan ketika industrialisasi makin berkembang. Organisasi pada masa itu makin kompleks. Divisi-divisi dalam pembuatan struktur organisasi mulai dibuat untuk pembagian tugas bagi tenaga kerja dalam organisasi tersebut. Kompleksitas organisasi menjadi titik awal sering digunakannya kolaborasi dalam berbagai organisasi. Dalam buku John W. Waddock, Thompson dan Perry mendefinisikan kolaborasi sebagai upaya bekerjasama atau bekerja bersama pihak lain yang melibatkan berbagai aktor individu, grup atau organisasi untuk mewujudkan tujuan tertentu (Waddock, 2008: 3).

Margherum dalam Nabatchi dan Emerson (2015: 16) secara lebih spesifik mendefinisikan kolaborasi sebagai sebuah pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks oleh beragam *stakeholders* yang otonom dengan musyawarah untuk menghasilkan suatu konsensus dan mengembangkan *network* atau jejaring. Pendapat ini lebih menekankan pada kolaborasi dalam aspek suatu kegiatan perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah dan konsensus. Sink dalam Dwiyanto (2011: 253) menjelaskan kerjasama kolaboratif sebagai sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri.

Fosler dalam Dwiyanto (2011: 254) menjelaskan konsep kolaborasi dengan mengatakan bahwa kerjasama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama yang intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan alignment dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda membangun visi bersama (*shared vision*) dan berusaha mewujudkan secara bersama-sama. Untuk itu mereka menyatukan atau setidaknya melakukan aliansi secara vertikal mulai dari sasaran, strategi sampai dengan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan bersama yang mereka yakin lebih bernilai dari tujuan yang dimiliki oleh masing-masing. *Shared vision* menjadi dasar bagi masing-masing pihak dalam merumuskan tujuan, strategi, alokasi sumber daya, dan aktivitas masing-masing sehingga kesemuanya memiliki kontribusi terhadap terwujudnya *shared vision* tersebut.

Dari berbagai definisi dan pendapat tentang kolaborasi maka dapat disimpulkan bahwa, kolaborasi dilakukan sebagai suatu upaya kerjasama dalam membuat aturan bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan melibatkan berbagai aktor untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan bersifat saling menguntungkan.

2.3.3 Definisi *Collaborative Governance*

Salah satu bentuk konsep penyelenggaraan *governance* disebut konsep *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Dari penjabaran tentang tema yang mendukung dan menjadi dasar *collaborative*

governance, maka kali ini perlu mengidentifikasi beberapa pendefinisian dari *collaborative governance* sebagai sebuah konsep. Paradigma *governance* menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*). Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya, maupun jaringan, yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan (Purwanti, 2016: 174).

Menurut Ansell dan Gash (2008: 2) definisi *collaborative governance* adalah “a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets”. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud dari *collaborative governance*

untuk mengatur satu atau lebih lembaga publik dan terlibat dengan beberapa aktor dalam proses pengambilan keputusan bersama dengan bermusyawarah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan publik. Sehingga dalam mengambil keputusan harus bersikap bijak untuk kepentingan bersama dan tidak merugikan salah satu pihak. Donahue (2011: 18) mengatakan kebijaksanaan bersama itu adalah ciri khas tata kelola kolaboratif dapat menambah kapasitas pemerintah untuk menyelesaikan misi publik dan tingkatkan fleksibilitas dengan misi yang ditempuh. Menurut Donahue dan Zeckhauser (2011: 4) *collaborative governance* merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu.

Disamping pendapat tersebut, pendapat lain mengenai *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Jung, et.al dalam Kurniasih (2017: 3) *collaborative governance* sebagai proses pembentukan, mengemudikan, memfasilitasi, mengoperasionalisasikan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik sendiri. Ketiga hubungan diantara institusi-institusi yang terlibat harus bersifat strategis, artinya bahwa setiap institusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transparansi tersebut, Donahue dalam (Mutiarawati, 2011: 5). Dwiyanto menjelaskan secara terperinci bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara pihak mereka masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara

independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama (Dwiyanto, 2011: 251)

Pendapat lain dikemukakan oleh Emerson dan Nabatchi (2015: 17) bahwa *collaborative governance* tidak menekankan pada pemerintah sebagai inisiator. Lebih lanjut *collaborative governance* atau pemerintahan kolaboratif menurut Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012: 3) dapat dimaknai sebagai proses dan struktur pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan pihak-pihak dalam lingkup dan level atau tingkatan dalam instansi-instansi pemerintahan dan atau sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengelola kepentingan atau kebutuhan masyarakat sehingga dapat tercapai. *Collaborative Governance* juga memungkinkan adanya keterlibatan atau partisipasi *civili society* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Collaborative Governance berbasis pada tujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terkait. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerjasama diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Dalam perumusan tujuan, visi-misi, norma dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan masing-masing pihak bersifat setara yakni

memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun terikat pada kesepakatan bersama (Purwanti, 2016: 178).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* adalah forum lintas sektoral yang membuat kesepakatan bersama bersifat saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, dalam praktiknya kolaborasi haruslah menjunjung tinggi nilai deliberatif atau musyawarah dan konsensus antar tiap aktor atau *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi tersebut, sehingga dalam kolaborasi interaksi yang muncul bersifat egaliter yaitu seluruh aktor mempunyai kedudukan yang sama.

2.3.4 Model Collaborative Governance

Beberapa ahli menggambarkan proses kolaborasi sebagai sebuah tahapan yang linear yang berlangsung dalam beberapa tahapan mulai dari pengenalan masalah hingga implementasi sebuah program dan kegiatan. Seperti model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007: 8) terdiri dari empat variabel utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaboratif. Tahapan pada proses kolaboratif meliputi dialog *face-to-face*, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, memahami bersama dan hasil sementara. Semua *collaborative governance* dibangun atas dialog *face-to-face* antar para *stakeholders*. Sebagai suatu proses konsensus, dialog langsung diperlukan para *stakeholders* untuk mengidentifikasi peluang untuk keuntungan bersama. Berbeda dengan Emerson dan Nabatchi melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus

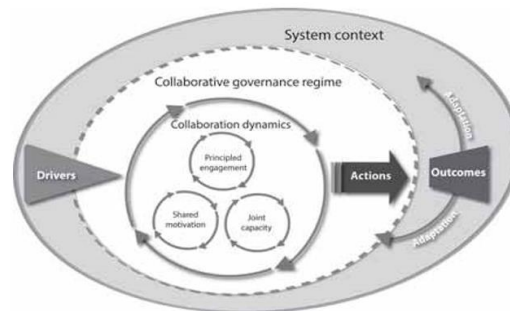
yang dinamis dan terus berlanjut dalam proses kolaborasi. Menurut Emerson dan Nabatchi (2015: 27) Komponen dari model *collaborative governance* terdiri atas dinamika kolaborasi, kegiatan kolaborasi, hasil kolaborasi, dan adaptasi. Keseluruhan aspek tersebut saling mempengaruhi kinerja dari kolaborasi yang dilaksanakan oleh para aktor atau *stakeholders* yang terlibat.

Menurut Emerson dan Nabatchi (2015: 39-40) kolaborasi lintas batas tidak terjadi dalam ruang hampa. Seperti hampir semuanya dalam dunia organisasi, *Collaborative Governance Regime* (CGR) muncul dan berkembang dalam suatu kompleks konteks sistem dan kondisi yang saling terkait seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Konteks yang luas dan dinamis ini menciptakan peluang dan kendala yang secara langsung mempengaruhi dan membentuk kontur mereka saat mereka berevolusi. Secara khusus, konteksnya tidak hanya mempengaruhi inisiasi CGR tetapi juga mempengaruhi dinamika dan kinerja CGR dari waktu ke waktu. Penting untuk menganalisis konteks sistem dinamis ini untuk mengembangkan yang lebih lengkap pemahaman tentang kepraktisan, kelayakan, dan keberlanjutan CGR. Pemrakarsa dan peserta CGR harus memiliki pemahaman yang kuat dari banyak kondisi dalam konteks sistem sekitarnya.

Menurut Emerson dan Nabatchi (2015: 41-443) ada enam kondisi eksternal paling menonjol yang dapat mempengaruhi sifat dan prospek CGR dalam konteks sistem adalah (1) *public resource or service conditions*, (2) *policy and legal frameworks*, (3) *socioeconomic and cultural characteristics*, (4) *network characteristics*, (5) *political dynamics and power relations* (6) *the history of conflict*.

Bersama-sama, kondisi sumber daya atau layanan publik, kerangka kerja kebijakan dan hukum, karakteristik sosial ekonomi dan budaya, karakteristik jaringan, dinamika politik dan hubungan kekuasaan, dan sejarah konflik, faktor-faktor lain dalam konteks sistem yang luas, membentuk prospek dan tantangan memprakarsai dan mempertahankan CGR. Mereka juga mempengaruhi evolusi CGR dari waktu ke waktu. Namun, meskipun penting, kondisi dalam konteks sistem sekitarnya tidak dengan sendirinya mengarah pada pembentukan dari CGR. Kondisi ini hanyalah pengaruh, bukan faktor penyebab. Mereka memberikan konteks dari mana driver CGR muncul.

Teori proses kolaborasi atau *Collaborative Governance Regime* (CGR) menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus, dengan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara, sebelum mengarah pada dampak utama, serta adaptasi terhadap dampak sementara. Proses kolaborasi di atas yang dimaksud berada dalam kotak CGR. Menurut Emerson dan Nabatchi (2015: 43-44) Ada empat hal penting yang mendorong (*drivers*) inisiasi CGR dimana tanpanya seruan untuk berkolaborasi kemungkinan tidak akan diindahkan dan tata kelola kolaboratif tidak akan terungkap: (1) ketidakpastian (*Uncertainty*), (2) saling ketergantungan (*Interdependence*), (3) insentif konsekuensial (*Consequential Incentives*), dan (4) memulai kepemimpinan (*Initiating Leadership*). Sebagaimana pembahasan diatas lebih lanjut akan digambarkan kerangka kerja *Collaborative Governance* secara utuh.

Gambar 2.1 Kerangka Kerja *Collaborative Governance*

Sumber: Emerson dan Nabatchi, 2015

2.3.4.1 Dinamika Kolaborasi

Dinamika dalam kolaborasi menjadi komponen sentral dalam proses kolaborasi. Karena dalam tahapan ini dilaksanakan proses interaksi antar pihak yang berpartisipasi dalam kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa *stakeholders* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat perlu mempertimbangkan beberapa komponen yang termasuk dalam aspek dinamika kolaborasi. Dalam dinamika kolaborasi Emerson dan Nabatchi fokus pada tiga komponen interaksi. Komponen tersebut adalah; penggerakan prinsip bersama (*Principle engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*), dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

1) *Principle engagement*

Komponen *principle engagement* merupakan adanya dialog secara langsung dan tatap muka antar tiap *stakeholders* yang terlibat dalam proses kolaborasi. Proses ini memungkinkan orang-orang dengan tujuan-tujuan substantif, relasional, dan identitas yang berbeda untuk berkolaborasi lintas batas-batas institusional, yurisdiksi,

atau sektoral mereka untuk memecahkan masalah, menyelesaikan konflik, atau menciptakan nilai bersama (Emerson dan Nabatchi, 2015: 59). Sebagaimana *collaborative governance* yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung lebih dari sekedar media dalam menyampaikan pendapat, yaitu untuk membangun kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian, dan komitmen dalam melakukan kerjasama. Sehingga *stakeholders* dapat berkolaborasi dengan baik sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan bersama. Adanya dialog dan pertemuan secara langsung antar tiap *stakeholders* dapat menentukan tujuan dan visi bersama dengan melepas batas-batas intitusi atau organisasi yang terlibat. Pertemuan ini juga diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang akan dihadapi dalam kolaborasi. Selanjutnya penting untuk dicatat bahwa proses pertemuan para partisipan dalam dialog diharapkan untuk tidak semakin mempertajam konflik antar patisipan. Karena setiap partisipan memiliki dan membawa karakter organisasi masing-masing.

2) *Share motivation*

Komponen ini merupakan komponen selanjutnya setelah proses penyamaan tujuan dan visi bersama melalui pertemuan dan diskusi secara langsung antar tiap partisipan atau *stakeholders*. Dalam proses ini *stakeholders* yang terlibat harus saling membangun kepercayaan, saling pengertian dan pemahaman satu dengan yang lain, dan komitmen bersama (Emerson dan Nabatchi, 2015: 66). Dalam proses kolaborasi membangun kepercayaan adalah bagain yang sangat sulit untuk dilakukan, sehingga pada *trust building* diutamakan dalam mengawali proses kolaborasi. Selain itu

membangun kepercayaan adalah proses yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai kolaborasi. Oleh karena itu, dalam membangun kepercayaan diperlukan pemimpin yang bisa merangkul dan menumbuhkan rasa percaya diantara pemangku kepentingan agar proses kolaborasi berjalan dengan baik. Ketika tiap *stakeholders* saling memiliki *trust* maka akan terbentuk situasi dimana adanya saling kesepahaman antar *stakeholders*. Selain itu, komitmen pada proses kolaborasi sangatlah penting dalam proses ini. *Stakeholders* yang berkolaborasi haruslah memiliki komitmen yang tinggi dan *responsible* dalam melaksanakan kolaborasi.

3) *Capacity for Joint Actions*

Kolaborasi dimaknai sebagai aktivitas atau kegiatan kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan *stakeholder* yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama (Emerson dan Nabatchi, 2015: 66). Dengan demikian suatu kolaborasi perlu memperhatikan kapasitas yang dibutuhkan dalam tiap kegiatan kolaborasi yang dilakukan bersama-sama. Kapasitas ini merupakan kombinasi dari 4 aspek yaitu prosedural dan kesepakatan yang dilakukan institusi, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya (Emerson dan Nabatchi, 2015: 68).

Aspek prosedural dan kesepakatan institusi merupakan aturan yang bersifat formal maupun informal, protocol, pola institusi dan dimensi struktural lainnya yang penting dalam pelaksanaan kolaborasi. Aspek ini harus dipatuhi oleh setiap partisipan atau *stakeholders* dalam kolaborasi. Aspek selanjutnya yaitu pentingnya *leadership* atau kepemimpinan dari tiap *stakeholders* yang terlibat. Pelaksanaan kolaborasi

dangat dipengaruhi sosok pemimpin yang tepat dan kompeten. Pengetahuan juga menjadi kapasitas yang penting dalam proses kolaborasi. *Stakeholders* yang terlibat haruslah pihak yang memiliki kemampuan tepat dibidang tersebut, sehingga proses kolaborasi dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sedangkan yang dimaksudkan kapasitas sumberdaya dapat berupa sumber daya anggaran, sumberdaya manusia, dan fasilitas atau teknologi yang tersedia.

2.3.4.2 Kegiatan Kolaborasi

Kegiatan kolaborasi dapat dilakukan dari beberapa kegiatan yang tergantung pada konteks tertentu. Kegiatan kolaborasi dapat berupa pembuatan perencanaan strategis, menetapkan suatu kebijakan, penyusunan sumber daya khususnya mengenai kebutuhan sumber daya anggaran dan fasilitas, pelaksanaan kebijakan atau program dan proses monitoring. Lebih lanjut, kegiatan kolaborasi dapat dilaksanakan baik bersifat secara kolektif dari tiap partisipan atau dilaksanakan secara individual oleh salah satu partisipan (Emerson dan Nabatchi, 2015: 83). dengan demikian, kegiatan kolaborasi dapat bersifat kolektif dan satu intitusi atau organisasi saja yang melaksanakan. Akan tetapi, kegiatan tersebut tetap tergolong dalam proses kolaborasi.

2.3.4.3 Hasil Kolaborasi

Outcome atau hasil merupakan implikasi dari *output* atau kegiatan kolaborasi yang telah dilakukan. Para ahli banyak yang lebih menekankan bahwa hasil dari

proses kolaborasi terdiri atas kepercayaan, hubungan, penetapan suatu keputusan, dan pelaksanaan dari kegiatan kolaborasi itu sendiri. Akan tetapi, Emerson dan Nabatchi (2015: 84) lebih menekankan bahwa hasil suatu proses kolaborasi dapat berupa adanya perubahan kualitas dan kuantitas barang publik dari segi fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. Hasil yang didapat merupakan implikasi dari kegiatan kolaborasi yang telah dilakukan yang mana memiliki sumbangsih pada kondisi sosial masyarakat, ekonomi, lingkungan sekitar, ataupun aspek legitimasi politik dari masyarakat terhadap pemerintah.

2.3.4.4. Adaptasi

Adaptasi merupakan konsep yang kurang begitu menonjol dalam pengelolaan kolaboratif. Akan tetapi, akan menjadi penting untuk konsep ini yang digunakan dalam rangka memahami kinerja kolaborasi. Dengan harapan kedepannya akan ada perubahan yang tranformatif atau bahkan perubahan kecil, namun signifikan dalam merespon hasil dari kegiatan kolaborasi (Emerson dan Nabatchi, 2015:85). Adaptasi merupakan proses evaluasi yang dilakukan dalam keseluruhan kerangka kerja pengelolaan kolaboratif. Adaptasi dapat diharapkan menjadi masukan penting untuk jalannya praktik atau pelaksanaan kolaborasi ke depannya.

2.3.5 Tujuan Melaksanakan *Collaborative Governance*

Pada hakekatnya tujuan kolaborasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang

dikemukakan oleh Abdulsyani (2007: 156), kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi adanya kolaborasi tiap lembaga atau institusi. Sebagai mana yang dikutip dalam mutiarawati (2017: 52) Secara umum *collaborative governance* muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi;
2. Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam;
3. Upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik.

Argumen lain yang menyatakan pentingnya melakukan *collaborative governance* Ansell and Gash dalam Mutiarawati (2007: 52) antara lain adalah karena:

1. Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan.
2. Ketidakmampuan kelompok-kelompok terutama karena pemisahan regim-regim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan.
3. Mobilisasi kelompok kepentingan.
4. Tingginya biaya dan politisasi regulasi.

Di samping alasan-alasan tersebut, kemunculan dan dikembangkannya *collaborative governance* adalah sebagai sebuah alternatif bagi; (1).

Pemikiranpemikiran yang semakin luas tentang pluralisme kelompok kepentingan, dan 2). Adanya kegagalan-kegagalan akuntabilitas manajerialisme (terutama manajemen ilmiah yang semakin di politisasi) dan kegagalan implementasinya. Ada juga yang berargumen bahwa kecenderungan dilakukannya *collaborative governance* adalah tumbuhnya pengetahuan dan kapasitas institusi atau organisasi. Junaidi (2015: 8) juga mengungkapkan bahwa *Collaborative governance* tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. Dari beberapa pendapat diatas mengisyaratkan bahwa *collaborative governance* muncul tidak begitu saja melainkan dilatarbelakangi berbagai aspek antar institusi dalam mengelola urusan-urusan publik dalam lembaga pemerintahan. Munculnya *collaborative governance* dalam berbagai aktor untuk melakukan kerjasama antarlembaga karena berbagai macam persoalan seperti keterbatasan anggaran dan berbagai aspek lain dan kemampuan tiap lembaga masih belum maksimal dalam melaksanakan program kegiatannya sendiri sehingga mengalami hambatan atau kegagalan.

Kolaborasi merupakan aspek perkembangan ilmu pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan berbagai kelompok kepentingan karena adanya kegagalan dalam pengelolaan institusi atau organisasi dalam satu atau berbagai program kegiatan. Kompleksitas yang muncul mengarahkan timbulnya saling ketergantungan antar institusi dan berusaha

untuk mencari solusi sehingga kolaborasi sebagai instrumen untuk menyatukan dalam mengatasi masalah yang ada.

2.4 Sampah dan Pengelolaanya

2.4.1 Sampah Berdasarkan Sumber, Jenis, dan Golongannya

Dalam kehidupan sehari-hari sampah adalah persoalan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia saat ini, baik diperkotaan maupun dipedesaan.

Diperlukan suatu usaha yang menyeluruh dan komprehensif dalam pengelolaan sampah, agar sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Pengertian sampah dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya menurut Kodoatie (2003: 312) mendefinisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Menurut Karden (2007: 67) sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, dan sisa aktivitas manusia lainnya. Selanjutnya menurut Nugroho (2013: 40) mengungkapkan sampah pada dasarnya merupakan sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan tertentu, telah diambil bagian utamanya, telah mengalami pengolahan, dan sudah tidak bermanfaat, dari segi ekonomi serta sudah tidak ada harganya lagi dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alam. Sumber

atau timbunan sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2008 terdiri atas:

- Sampah rumah tangga, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
- Sampah sejenis sampah rumah tangga, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

Sampah spesifik, yang meliputi :

- Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- Sampah yang timbul akibat bencana;
- Puing bongkaran bangunan;
- Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- Sampah yang timbul secara periodik.

Selanjutnya menurut Slamet (2009: 153) sampah dibedakan atas sifat biologisnya sehingga memperoleh pengelolaan yakni, sampah yang dapat membusuk, seperti (sisa makan, daun, sampah kebun, pertanian, dan lainnya), sampah yang berupa debu, sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti sampah-sampah yang berasal dari industri yang mengandung zat-zat kimia maupun zat fisik berbahaya.

Menurut Wintoko (2013:1) mengungkapkan sampah alias (waste) adalah zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal

dari rumah tangga maupun dari pabrik sebagai sisa proses industri. Sampah atau waste bisa digolongkan kedalam empat kelompok, antara lain:

1. *Human extreta*, merupakan bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia
2. *Sewage*, merupakan air limbah yang dibuang oleh pabrik maupun rumah tangga
3. *Refuse*, merupakan bahan pada sisa proses industri atau hasil sampingan kegiatan rumah tangga
4. *Industri waste*, merupakan bahan-bahan buangan dari sisa-sisa proses industri

Berdasarkan sumber dan timbunan sampah, dalam pengelolaan sampah perkotaan yang dikelola pemerintah daerah di Indonesia dikategorikan menjadi beberapa kelompok yaitu: (a) rumah tangga atau pemukiman, (b) pasar, (c) Kegiatan komersial seperti pertokoan, (d) perkantoran, (e) hotel dan restoran, (f) kegiatan dari institusi seperti industri dan rumah sakit, (g) penyapuan jalan dan (h) taman-taman, (Damanhuri, 2010:13). Sedangkan menurut Amos Noelaka (2008:67) sampah dibagi menjadi 3 bagian yakni:

1. Sampah Organik, sampah organik merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik / pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai, dikelola dan dimanfaatkan dengan prosedur yang benar. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk seperti, sisa daging, sisa sayuran, daun-daun, sampah kebun dan lainnya

2. Sampah Non organik, sampah non organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetis maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah ini merupakan sampah yang tidak mudah membusuk seperti, kertas, plastik, logam, karet, abu gelas, bahan bangunan bekas dan lainnya.

3. Sampah B3 (Bahan berbahaya beracun) Pada sampah berbahaya atau bahan beracun (B3), sampah ini terjadi dari zat kimia organik dan nonorganik serta logam-logam berat, yang umumnya berasal dari buangan industri. Pengelolaan sampah B3 tidak dapat dicampurkan dengan sampah organik dan nonorganik. Biasanya ada badan khusus yang dibentuk untuk mengelola sampah B3 sesuai peraturan berlaku

Berdasarkan beberapa pengertian tentang sampah seperti di atas maka dapat didefinisikan sampah adalah sisa bahan buangan yang merupakan hasil dari kegiatan kehidupan manusia yang tidak terpakai, buangan yang berasal dari rumah tangga maupun tempat lainnya yang tidak memiliki nilai ekonomis.

2.4.2 Sistem Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam disiplin ilmu manajemen kata “pengelolaan” dapat disamakan atau diartikan dengan istilah manajemen, yang berarti pula pengaturan

atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Dalam pengelolaan sampah bermakna bagaimana sampah dikelola dengan cara sedemikian rupa dengan aturan yang terdapat dalam manajemen sampah yang baik dengan kata lain bahwa, harus diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen dari perencanaan sampai pada tahap pengawasan.

Pengolahan sampah yang baik adalah dengan memanfaatkan sampah, mendaur ulang menjadi barang yang mempunyai nilai lebih (Alex, 2012: 40). Menurut Said (1987: 11) dalam penanganan sampah yang baik ada dua keuntungan yang dapat diperoleh yaitu : (1) sampah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan, (2) sampah tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku membuat barang-barang yang jauh lebih bermanfaat. Dengan memanfaatkan sampah dengan cara mendaur ulang atau membuat sampah menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat akan mengurangi beban sampah yang ada di lingkungan sekitar, sehingga lingkungan menjadi bersih dan sampah mempunyai nilai ekonomis yang bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Menurut Sejati (2009: 24) pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara umum, dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan, dan pembuangan akhir. Said (1987: 10) mengemukakan masalah penanganan sampah ternyata tidak mudah, melibatkan banyak pihak, memerlukan teknologi, memerlukan dana yang cukup besar dan memerlukan keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Dari

penjelasan tersebut menjelaskan bahwa dalam penanganan sampah bukan masalah yang mudah sehingga diperlukan berbagai macam sumberdaya dan kerjasama secara harmonis antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih bebas dari sampah.

Berdasarkan (SNI 19-2454-2002: 5) faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah perkotaan yaitu:

- Kepadatan dan penyebaran penduduk;
- Karakteristik fisik lingkungan sosial ekonomi;
- Timbulan dan karakteristik sampah;
- Budaya sikap dan perilaku masyarakat;
- Jarak dari sumber sampah ketempat pembuangan akhir sampah;
- Rencana tata ruang dan pengembangan kota;
- Sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah;
- Biaya yang tersedia;
- Peraturan daerah setempat.

Kodoatie (2003: 217) mengungkapkan sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat dari komponen-komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain serta saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih sehat dan teratur. Selanjutnya Menurut Wintoko (2013: 9) pengelolaan sampah diperkotaan

dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir/pengolahan.

Diharapkan sistem pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan dilakukan dengan bekerjasama antara berbagai pemangku kepentingan mengingat pengelolaan sampah tidak mudah untuk dilakukan. Sehingga dengan sistem pengelolaan yang tepat diharapkan sampah bukan lagi masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dan sampah mempunyai nilai yang bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah.

2.4.3 Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3-R

Permasalahan perkotaan yang sangat masif adalah permasalahan sampah mengingat dampak dari sampah tersebut sangat kompleks mulai dari aspek estetika, kesehatan, etika hingga kerugian ekonomi dan lingkungan yang berujung pada bencana alam (Setyono dalam Yustikarini, 2017:177). Alternatif dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut adalah dengan penanganan sistem manajemen persampahan yang baik dan penerapan teknologi persampahan melalui konsep *Reuse*, *Reduce* dan *Recycle* (3-R) yang diharapkan dapat meminimalkan sampah yang akan diolah di TPA. Menurut Cunningham dalam statistik lingkungan hidup (2017: 173), pengelolaan sampah modern termasuk upaya 3-R yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), *Recycle* (mendaur ulang sampah). Dengan menerapkan konsep 3-R, diharapkan jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)/Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dapat diminimalisir.

a. Reduce

Prinsip *Reduce* dilakukan dengan cara mengurangi atau minimalisasi penggunaan suatu barang yang digunakan sebagai suatu pola hidup yang dapat mengurangi produksi sampah. Contoh yang bisa dilakukan seperti mengurangi penggunaan barang yang tidak bisa didaur ulang dalam kehidupan sehari-hari.

b. Reuse

Prinsip *reuse* yaitu suatu cara yang dilakukan dengan memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali atau menggunakan kembali material yang masih layak pakai dengan menghindari pemakaian barang-barang yang hanya sekali pakai, sehingga dapat memperpanjang waktu pemakaian suatu barang sebelum ketempat pembuangan sampah.

c. Recycle

Yaitu suatu prinsip mengolah/mendaur ulang kembali barang yang dianggap menjadi sampah untuk dirubah menjadi barang yang berguna, seperti penggunaan sampah plastik menjadi kerajinan tangan dan mengolah sampah organik dijadikan pupuk kompos.

2.4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Sampah

Sistem Pengolahan Sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi lima aspek atau komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan

lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Menurut Damanhuri (2010: 11) aspek-aspek penting yang mempengaruhi manajemen persampahan adalah:

2.4.4.1 Aspek Peraturan/Hukum

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjadi payung hukum pengelolaan sampah di Indonesia dan sebagai pedoman teknis pemerintah pusat yang diteruskan kepada pemerintah daerah. Aspek peraturan didasarkan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga menjadi dasar yang mengatur pengelolaan sampah yang tertuang dalam undang-undang maupun peraturan daerah. Menurut Damanhuri (2010: 11) manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, ketertiban masyarakat, dan sebagainya.

- ❖ Peraturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain adalah yang mengatur tentang:
- ❖ Ketertiban umum yang terkait dengan penanganan sampah
- ❖ Rencana induk pengelolaan sampah kota
- ❖ Bentuk lembaga dan organisasi pengelola
- ❖ Tata-cara penyelenggaraan pengelolaan
- ❖ Besaran tarif jasa pelayanan atau retribusi
- ❖ Kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama antar daerah, atau kerjasama dengan pihak swasta. (Damanhuri 2010: 11)

Aspek pengaturan memegang peranan penting dalam pengelolaan sampah untuk mengatur jalannya proses pengelolaan sampah yang baik dan teratur sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan kerjasama yang baik dengan berbagai *stakeholders* dalam menangani persoalan sampah.

2.4.4.2 Aspek Kelembagaan dan Organisasi

Organisasi dan manajemen merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan kinerja dalam pengelolaan sampah, selain itu juga memiliki peranan dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan membentuk suatu organisasi, personalia dan manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Menurut Damanhuri (2010:11) Perancangan dan pemilihan bentuk organisasi disesuaikan dengan:

- ❖ Peraturan pemerintah yang membinanya
- ❖ Pola sistem operasional yang diterapkan
- ❖ Kapasitas kerja sistem
- ❖ Lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani.

Kebijakan yang diterapkan di Indonesia dalam mengelola sampah kota secara formal adalah seperti yang diarahkan oleh Departemen Pekerjaan Umum sebagai departemen teknis yang membina pengelola persampahan perkotaan di Indonesia.

Bentuk institusi pengelolaan persampahan kota yang dianut di Indonesia:

- ❖ Seksi Kebersihan di bawah satu dinas, misalnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) terutama apabila masalah kebersihan kota masih bisa ditanggulangi oleh suatu seksi di bawah dinas tersebut
- ❖ Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah suatu dinas, misalnya Dinas PU terutama apabila dalam struktur organisasi belum ada seksi khusus di bawah dinas yang mengelola kebersihan, sehingga lebih memberikan tekanan pada masalah operasional, dan lebih mempunyai otonomi daripada seksi
- ❖ Dinas Kebersihan akan memberikan percepatan dan pelayanan pada masyarakat dan bersifat nirlaba. Dinas ini perlu dibentuk karena aktivitas dan volume pekerjaan yang sudah meningkat
- ❖ Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan, merupakan organisasi pengelola yang dibentuk bila permasalahan di kota tersebut sudah cukup luas dan kompleks. Pada prinsipnya perusahaan daerah ini tidak lagi disubsidi oleh pemerintah daerah (pemda), sehingga efektivitas penarikan retribusi akan lebih menentukan. Bentuk ini sesuai untuk kota metropolitan.

2.4.4.3 Aspek Teknik Operasional

Menurut SK SNI 19-2454-2002 teknik operasional pengelolaan sampah terdiri dari 6 Komponen yaitu pewadahan, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengolahan dan pemilahan, pengangkutan, pembuangan akhir.

- ❖ Pewadahan merupakan suatu kegiatan dalam membuang sampah dengan cara menampung sampah sementara di wadah/tempat sumber sampah sebelum di lakukan pemilahan dan pada akhirnya akan sampai pada pembuangan akhir.

❖ Pengumpulan sampah adalah suatu cara atau proses pengelolaan sampah mulai dari pewadahan sampah dari sumber timbulan sampah sampai ketempat pengumpulan sementara/stasiun pemindahan atau sekaligus ke tempat pembuangan akhir (TPA). Menurut nugroho (2013: 65) pola pengumpulan sampah dibedakan menjadi empat yaitu:

- Pola individual tidak langsung dari rumah ke rumah
- Pola individual langsung dengan truk untuk jalan dan fasilitas umum
- Pola komunal langsung untuk pasar dan daerah komersial
- Pola komunal tidak langsung untuk pemukiman padat.

❖ Pemindahan sampah merupakan tahapan kegiatan memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat penampungan sementara atau ke pembuangan akhir. Nugroho (2013: 66) menyatakan bahwa pemindahan sampah merupakan suatu proses memindahkan sampah dari hasil mengumpulkan kedalam alat pengangkut untuk dibawa ketempat pembuangan akhir. Lokasi pemindahan sampah hendaknya memudahkan bagi sarana pengumpul dan pengangkut sampah untuk masuk dan keluar dari lokasi pemindahan, dan tidak jauh dari sumber sampah. Pemrosesan sampah atau pemilahan sampah dapat dilakukan di lokasi ini, sehingga sarana ini dapat berfungsi sebagai lokasi pemrosesan tingkat kawasan.

❖ Pengolahan sampah adalah suatu usaha dalam mengurangi volume sampah dan mengubah bentuk sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dalam SK SNI 19-2454-2002 teknik-teknik pengolahan sampah dapat berupa: pengomposan, insinerasi yang berwawasan lingkungan, daur ulang, pengurangan volume sampah dengan pencacahan atau pemadatan, dan biogasifikasi. Kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak dari pewadahan sampah sampai dengan pembuangan akhir sampah. Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri atas kegiatan pewadahan sampah dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah B3 rumah tangga dikelola secara khusus sesuai aturan yang berlaku. Kegiatan pemilahan dapat pula dilakukan pada kegiatan pengumpulan pemindahan. Kegiatan pemilahan dan daur ulang diutamakan di sumber (Damanhuri, 2010: 12)

❖ Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres (SNI 19-2454-2002).

❖ Pembuangan akhir adalah suatu tempat terakhir dalam proses pewadahan, pemilahan, pengumpulan, dan pemusnahan sehingga tidak mencemari atau

aman bagi lingkungan. (SNI 19-2454-2002). Selanjutnya Alex (2012) mengungkapkan pada umumnya pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Dimana menurut Wintoko (2013) syarat yang harus dipenuhi dalam membangun tempat pembuangan sampah adalah:

- Tempat tersebut tidak dibangun dekat sumber air minum atau sumber air lainnya yang dipergunakan oleh manusia
- Tidak pada tempat yang sering terkena banjir
- Pada tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggal manusia.

2.4.4.4 Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam manajemen atau pengelolaan sumberdaya. Dalam pengelolaan persampahan membutuhkan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan peralatan yang digunakan dalam pengelolaan sampah. Pembiayaan berasal dari dana anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) maupun retribusi dari pelayanan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah. Menurut Damanhuri (2010: 12) Aspek pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar roda sistem pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Diharapkan bahwa sistem pengelolaan persampahan di Indonesia akan menuju pada 'pembiayaan sendiri', termasuk disini dengan

pembentukan perusahaan daerah. Sektor pembiayaan ini menyangkut beberapa aspek, seperti:

- ❖ Proporsi APBN/APBD pengelolaan sampah, antara retribusi dan biaya pengelolaan sampah
- ❖ Proporsi komponen biaya tersebut untuk gaji, transportasi, pemeliharaan, pendidikan dan
- ❖ pengembangan serta administrasi
- ❖ Proporsi antara retribusi dengan pendapatan masyarakat
- ❖ Struktur dan penarikan retribusi yang berlaku.

Retribusi persampahan merupakan bentuk konkrit partisipasi masyarakat dalam membiayai program pengelolaan persampahan. Bentuk penarikan retribusi dibenarkan bila pelaksanaannya adalah badan formal yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Pemerintah Daerah wajib menentukan besarnya biaya jasa pengelolaan sampah yang dipungut dari masyarakat dan pelaku usaha dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

2.4.4.5 Aspek Peran Serta Masyarakat

Aspek peran serta masyarakat merupakan suatu aspek yang mendukung dalam terlaksananya pengelolaan sampah yang baik, dimana setiap sendi kehidupan bernegara peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam menghimpun aspirasi maupun dalam mengimpelentasikan suatu kebijakan yang menyangkut hak hidup orang banyak. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah diharapkan dapat

berpartisipasi langsung dalam pengelolaan lingkungan, membayar retribusi yang telah ditetapkan untuk menunjang pengelolaan sampah berkelanjutan sehingga dapat berperan dalam mencapai program pemerintah dalam pengelolaan sampah yang baik.

Menurut Louise et.al dalam Irman (2004: 51) peran serta masyarakat adalah melibatkan masyarakat dalam tindak-tanduk administrator yang mempunyai pengaruh langsung terhadap mereka. Peran serta masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Damanhuri (2010: 12) Tanpa adanya partisipasi masyarakat penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program itu. Hal ini antara lain menyangkut:

- ❖ Bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib dan teratur
- ❖ Faktor-faktor sosial, struktur, dan budaya setempat
- ❖ Kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini.

Permasalahan yang sering dijumpai didalam masyarakat kita adalah tingkat Pemahaman dan sensitivitas terhadap program pengelolaan sampah yang kurang baik,

sehingga belum adanya kesadaran yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari sampah. Oleh karena itu perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana meningkatkan kesadaran lingkungan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Menurut Zen yang dikutip Neolaka (2008: 20) kesadaran lingkungan adalah usaha melibatkan setiap warga negara dalam menumbuhkan dan membina kesadaran untuk kelestarian lingkungan, berdasarkan tata nilai dari pada lingkungan itu sendiri dengan filsafat hidup secara damai dengan alam lingkungannya

Usaha dalam pengelolaan sampah seyogyanya dilakukan secara bersama-sama antar pemerintah, swasta dan masyarakat, sehingga masalah dalam pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Namun pengelolaan sampah tidak selalu berjalan dengan mulus karena sampah merupakan hasil dari buangan sehari-hari dari lingkungan sekitar baik yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun dari berbagai sumber lainnya. Kalau tidak bisa dikelola dengan baik maka sampah merupakan masalah yang akan selalu akan dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sumber yang mengemukakan kendala dalam pengelolaan sampah di Indonesia antara lain adalah Chaerul et.al dan Kardono dalam Mahyudin (2017: 67). Menurut Chaerul menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia diantaranya kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat. Kardono mengatakan bahwa permasalahan pengelolaan sampah yang ada

di Indonesia dilihat dari beberapa indikator berikut, yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelolaan sampah, dan masalah biaya.

Sementara itu menurut Damanhuri (2010: 10), mengatakan pertambahan penduduk yang demikian pesat di daerah perkotaan (urban) telah mengakibatkan meningkatnya jumlah timbunan sampah. Dari studi dan evaluasi yang telah dilaksanakan di kota-kota di Indonesia, dapat diidentifikasi masalah-masalah pokok dalam pengelolaan persampahan kota, antara lain:

- ❖ Bertambah kompleksnya masalah persampahan sebagai konsekuensi logis dari pertambahan penduduk kota.
- ❖ Peningkatan kepadatan penduduk menuntut pula peningkatan metode/pola pengelolaan sampah yang lebih baik.
- ❖ Keheterogenan tingkat sosial budaya penduduk kota menambah kompleksnya permasalahan.
- ❖ Situasi dana serta prioritas penanganan yang relatif rendah dari pemerintah daerah merupakan masalah umum dalam skala nasional.
- ❖ Pergeseran teknik penanganan makanan, misalnya menuju ke pengemas yang tidak dapat terurai seperti plastik.
- ❖ Keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai yang tersedia di daerah untuk menangani masalah sampah.

- ❖ Pengembangan perancangan peralatan persampahan yang bergerak sangat lambat.
- ❖ Partisipasi masyarakat yang pada umumnya masih kurang terarah dan terorganisir secara baik.
- ❖ Konsep pengelolaan persampahan yang kadangkala tidak cocok untuk diterapkan, serta kurang terbukanya kemungkinan modifikasi konsep tersebut di lapangan.

Beberapa pendapat tersebut telah menguraikan tentang faktor pendukung dan hambatan dalam pengelolaan sampah sehingga akan mendapatkan gambaran bagaimana selanjutnya proses dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul sebagai tantangan untuk mendapatkan solusi yang baik. Seperti penguatan aspek hukum sangat perlu untuk dilakukan yang diterapkan dalam semua pihak yang terkait dalam memberikan sanksi bagi pihak yang tidak menaati aturan yang telah disepakati. Selain itu peningkatan pelayanan dan penyediaan tempat pembuangan sampah yang memadai dan berbagai aspek dalam pengelolaan sampah lainnya perlu ditingkatkan sehingga pengelolaan sampah bisa berjalan dengan baik.

2.5 Kerangka Pikir

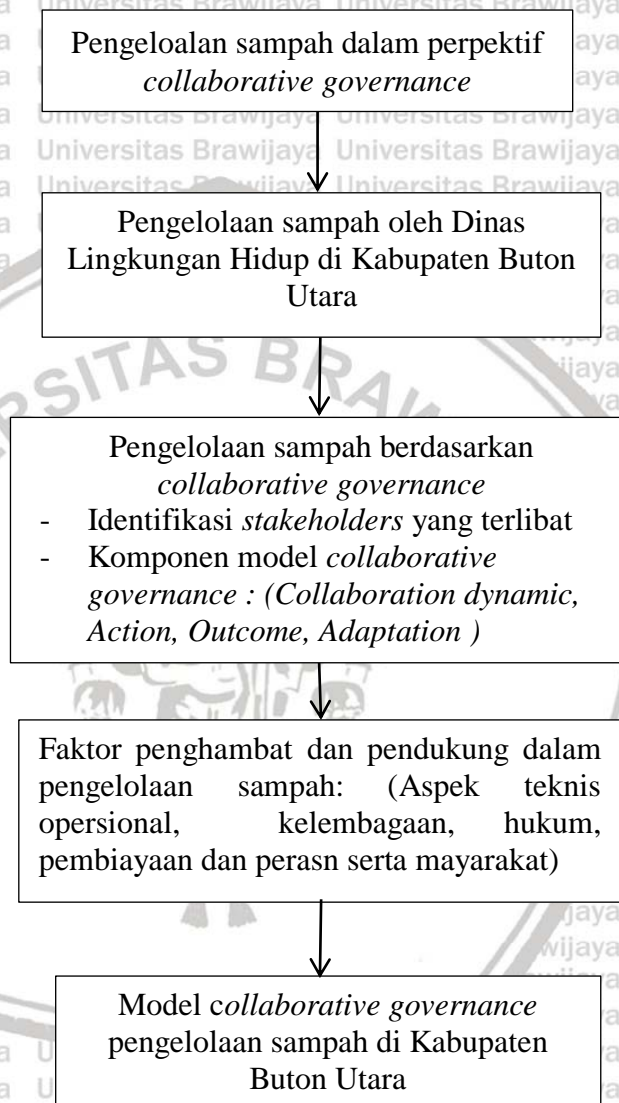
Dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara. Kabupaten buton utara salah satu kabupaten yang sedang menghadapi masalah persampahan dan menjadi pekerjaan berat bagi dinas Lingkungan hidup dalam menghadapi masalah

pengelolaan sampah. Sampah yang dihasilkan di Kabupaten Buton Utara berasal dari hasil aktivitas masyarakat sehari-hari, baik dari kegiatan rumah tangga maupun kegiatan usaha. Dari enam kecamatan yang ada di Kabupaten Buton Utara, Kecamatan Kulisusu yang paling banyak terdapat timbunan sampah sehingga dibutuhkan usaha yang cukup besar dalam pengelolaan sampah. Kegiatan masyarakat di Kecamatan Kulisusu yang menyumbang sampah paling banyak berasal dari kegiatan rumah tangga.

Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di Kabupaten Buton Utara mengakibatkan pertambahan jumlah timbunan sampah. Data yang diperoleh mengenai volume sampah di Kabupaten Buton Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun, sementara sampah yang dapat dikelola tidak menunjukkan kemajuan yang seimbang dengan pertambahan jumlah sampah. Masalah yang timbul dari peningkatan volume sampah ini adalah banyaknya sisa sampah yang tidak terangkut karena kurangnya tempat penampungan sementara, dan tempat pembuangan akhir belum berfungsi dengan baik. Selain itu terhambatnya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup karena dalam pengelolaan sampah dinas terkait berperan sebagai regulator dan operator sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik, terkesan masih mendominasi dan nampak penerapan *old public administration* dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara juga masih menggunakan paradigma lama yaitu kumpul, angkut, buang.

Berbagai masalah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara menunjukan belum efektifnya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara sulit untuk berdiri sendiri dalam mengelola sampah yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun, sehingga perlu upaya dalam mencari solusi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dari pespektif *collaborative governance*. Dari hasil analisis tersebut diharapkan akan memperoleh informasi tentang peluang adanya kolaborasi bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya, sehingga dengan adanya kolaborasi maka pengelolaan sampah di Kabupaten Buoton Utara dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini juga akan membahas tentang faktor penghambat dan pendukung dalam penglolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Beberapa faktor pendukung dan penghambat terkait dengan lima aspek pengelolaan sampah yaitu; aspek hukum, kelembagaan, teknik operasional, biaya, dan peran serta masyarakat. Pada akhir penelitian diharapkan akan mendapatkan model pengelolaan sampah dalam perspektif *collaborative governance*.

Gambar 2.2 Model Kerangka Pemikiran



BAB III

ANALISIS SOSIAL SETTING

3.1 Kondisi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Buton Utara

Sampah merupakan masalah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan masyarakat baik di desa maupun perkotaan. Seiring berkembangnya pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya taraf hidup masyarakat, maka produksi sampah turut meningkat. Persoalan seperti ini juga terjadi di kabupaten Buton Utara yang mengalami peningkatan jumlah timbunan sampah setiap tahunnya dengan luas daratan yaitu 1.923,03 km² yang terletak di bagian Utara Pulau Buton dengan jumlah penduduk ditahun 2017 sebanyak 62.088 jiwa. Kabupaten Buton Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Muna, yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tanggal 2 Januari 2007 tentang pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara instansi yang berwenang dalam pengelolaan kebersihan/persampahan di Kabupaten Buton Utara adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pasal 6 menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok *“Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan*

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup”.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Buton Utara serta kondisi, permasalahan, dan proyeksi lingkungan hidup ke depan, maka ditetapkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara yaitu “Terwujudnya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Yang Berbasis Masyarakat”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna dan implikasi bahwa Buton Utara memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan beragam. Sumberdaya alam tersebut tersedia di wilayah daratan maupun perairan laut yang pada dasarnya telah dikelola, tetapi belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan pengelolaan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka dikembangkan tiga agenda utama yang juga merupakan misi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pelestarian lingkungan hidup selama lima tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta penataan lingkungan hidup daerah;
3. Mengendalikan dampak pencemaran lingkungan hidup dan meningkatkan pembinaan pengelolaan limbah dan pemulihan kualitas lingkungan.

Didalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup di pimpin oleh Kepala Dinas sedangkan teknis operasionalnya dibawah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang secara teknis dibawah Seksi

Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Pelaksanaan tugas secara teknis untuk persampahan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dilakukan oleh Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, mempunyai tugas: a). Menyusun informasi pengelolaan sampah; b). menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; c). merumuskan kebijakan pengurangan sampah; d). membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri; e). membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; f). membina pendaurulangan sampah; g). menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah; h). membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; i). merumuskan kebijakan penanganan sampah; k). mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; l). menyiapkan sarana dan prasarana penanganan sampah; m).melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; n). menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah; o). melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuatan open dumping; p). Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaam sampah; q). memberikan kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah dan, r). melaksanakan kerjasama dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan sampah saat ini hanya pada wilayah Kecamatan Kulisusu sebagai pusat kota di Kabupaten Buton Utara yang terpadat penduduknya pada tahun 2017 yakni sebanyak 20.652 jiwa, yang

terdiri dari 16 desa dan 7 kelurahan. Sampah-sampah ini dikumpulkan di beberapa TPS dan selanjutnya diangkut ke TPA. Kondisi TPS yang tersebar di berbagai Kecamatan khususnya beberapa TPS yang berada di kawasan permukiman dalam kondisi rusak dan tidak difungsikan lagi. Fenomena tersebut disebabkan oleh perilaku sosial masyarakat yang menghancurkan, serta melarang untuk membuang sampah pada TPS tersebut dengan alasan faktor kesehatan (bau busuk). Transportasi pengumpulan sampah ke TPA dilakukan dengan menggunakan berbagai kendaraan termasuk truk biasa.

Secara umum pola penanganan dan pengumpulan sampah masyarakat di Kecamatan Kulisusu masih menggunakan cara individual, dan individual langsung sehingga sangat mudah masyarakat membuang sampah dengan caranya sendiri. Sampah rumah tangga dari pemukiman warga di angkut oleh masing-masing warga ke TPS. Dari TPS kemudian di angkut oleh petugas sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ke TPA. Adapun sampah yang ada di tempat umum seperti jalanan, pasar, dan fasilitas umum lainnya dibersihkan oleh petugas sampah dari DLH yang terdiri dari petugas penyapu jalanan, dan petugas pengangkut sampah. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah hanya pada skala rumah tangga untuk membersihkan sampah yang ada di rumah masing-masing. Keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan sampah belum sama sekali dilakukan oleh DLH.

Sementara itu pengelolaan akhir sampah Kabupaten Buton Utara terletak pada Desa Ee Lahaji Kecamatan Kulisusu. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara, masih bersifat penyediaan lahan dan belum ada pengolahan dengan

system *Controlled landfill*. Lokasi TPA ini dioperasikan sejak Tahun 2013 pada areal seluas 10 hektar dengan sarana dan prasarananya belum memadai. Melihat kondisi pengelolaan sampah yang belum maksimal akan sangat menghawatirkan bagi kesehatan masyarakat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Utara 2018, jenis penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat di Kabupaten Buton Utara adalah jenis penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas dengan penderita berjumlah 7.407 kasus penderita, gastritis duodenitis mencapai 3.232 kasus penderita, hipertensi sebanyak 2.684 kasus penderita, diare yang mencapai 1.785 penderita, demam tercatat sebanyak 1.550 kasus penderita, batuk sebanyak 1.543 kasus, penyakit lain adalah rematik (1.236 kasus), alergi kulit (1.196 kasus), kecelakaan dan ruda paksa (1.180 kasus) dan penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat (1.172 kasus). Maka dari itu diperlukan upaya yang inovatif dalam mengatasi persoalan sampah agar berbagai masalah yang ditimbulkan sampah tidak dapat terselesaikan dengan baik.

3.2 Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif *Collaborative Governance* di Kabupaten Buton Utara

Pergeseran paradigma dalam pengelolaan sektor publik membawa pengaruh yang cukup signifikan dalam mengatasi persoalan dalam masyarakat. Timbulnya beberapa paradigma baru dalam pengelolaan sektor publik pertanda bahwa persoalan dalam masyarakat sangat dinamis sehingga diperlukan upaya atau inovasi dalam layanan sektor publik. Pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara yang masih menggunakan paradigma lama sudah tidak relevan lagi,

sehingga diperlukan inovasi seperti pengelolaan sampah dengan menerapkan konsep *reduce, reuse, recycle, replace* dan *replant*.

Secara teknis penyelenggara pengelolaan sampah berada pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buton Utara dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang ada pada bidang pengelolaan sampah. Khususnya lapangan tenaga penyapu jalanan berperan penting dalam membersihkan tempat-tempat umum seperti, pasar, dan fasilitas publik lainnya di bantu oleh petugas pengangkut sampah dengan menggunakan peralatan kebersihan seperti sapu, gerobak sampah, truk sampah, yang mengangkut sampah sampai ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang dilakukan oleh pengangkut sampah. Adapun sampah pada skala rumah tangga sebagian besar dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan cara individual yaitu di bakar, ditimbun, atau di buang ke lahan terbuka. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelenggara pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara secara teknis berada pada DLH dengan melibatkan sumberdaya manusia seperti petugas penyapu jalanan, dan pengangkut sampah. Adapun masyarakat yang ikut dalam pengelolaan sampah hanya untuk membersihkan sampah yang dihasilkan oleh masing-masing rumah tangga.

Rendahnya tingkat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara dalam hal pengelolaan sampah bukan disebabkan karena masalah teknik semata, melainkan lebih disebabkan karena lemahnya sistem manajemen internal Dinas Lingkungan Hidup. Kinerja sistem operasional pengelolaan sampah Kabupaten Buton Utara tidak akan mencapai tingkat optimum tanpa adanya peran aktif

masyarakat dan pihak lain yang dianggap bisa mengatasi dalam pengelolaan sampah.

Masyarakat bukan lagi hanya sebagai obyek pelayanan, tetapi harus dipandang sebagai salah satu *stakeholders* yang dituntut peran aktifnya dalam pengelolaan sampah.

Selain itu peran serta dari berbagai *stakeholdres* sangat penting bersama-sama mengatasi persoalan yang timbul karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki.

Masalah tersebut hanya bisa dilakukan jika terjadi kolaborasi antara semua pihak.

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi adanya kolaborasi tiap lembaga atau institusi salah satunya yaitu kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan. Dengan menganalisis persoalan sampah yang dihadapi oleh Dinas lingkungan Hidup dan menerapkan model kolaborasi serta mengidentifikasi pelaung dengan pihak yang berkolaborasi maka akan teridentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Sehingga akan terwujud pengelolaan sampah dalam perspektif *collaborativ governance* di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara. Serta visi yang telah di kemukakan yaitu terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang berbasis masyarakat dan misi tentang mengendalikan dampak pencemaran lingkungan hidup dan meningkatkan pembinaan pengelolaan limbah dan pemulihan kualitas lingkungan dapat terselesaikan dengan baik.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, masalah dan tujuan penelitian maka menurut peneliti yang sesuai dengan metode penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017: 2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun penelitian deskriptif menurut Arikunto (2010: 3) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Moleong (2007: 11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.

Oleh karena itu, dalam konteks peneliti ini secara spesifik bertujuan untuk melakukan analisa dengan menggambarkan dan mengidentifikasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini maka pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara dapat menemukan gambaran dan jawaban yang tepat sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga menjadi sebuah karya tulis yang bersifat ilmiah dengan kesimpulan yang akurat.

4.2 Fokus Penelitian

Sugiyono, (2012: 32) mengatakan fokus penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaan suatu pengamatan. Selain itu penetapan fokus bertujuan untuk memberikan pedoman bagi peneliti agar tidak terjebak dengan banyaknya data yang didapatkan saat melakukan penelitian lapangan atau untuk menghindari pengumpulan data yang berlimpah. Dalam fokus penelitian juga penting untuk mengingat bahwa dalam menfokuskan penelitian tidak terlepas dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas maka fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara

- Pola penanganan sampah dan cakupan wilayah
- Analisis sumberdaya pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara
- Capaian hasil pengelolaan sampah ditinjau dari jumlah produksi sampah dan sampah terlayani di Kabupaten Buton utara

2. Pengelolaan sampah berdasarkan perspektif *Collaborative governance*

- Identifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan sampah
- Model *Collaborative Governance* (Dinamika kolaborasi, kegaitan kolaborasi, hasil kolaborasi, adaptasi)

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten

Buton Utara

- Aspek peraturan/hukum
- Aspek kelembagaan dan organisasi
- Aspek teknik operasional
- Aspek pembiayaan
- Aspek peran serta masyarakat

4.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Moleong (2000: 86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi. Lokasi ini berada pada satu wilayah atau lembaga tertentu dalam masyarakat untuk. Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah lokasi penelitian ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menentukan situs penelitian. Situs penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti akan mengetahui keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam memperoleh data dan informasi yang akurat. Sesuai dengan

rumusan masalah dan fokus penelitian terdahulu, maka situs dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten buton Utara dan beberapa Dinas, Lurah, dan lembaga yang akan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sampah serta masyarakat di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

4.4. Sumber Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data diperoleh dari berbagai sumber. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh peneliti melalui penelitian lapangan yang berasal dari para informan secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Informan yaitu orang yang dapat memberikan informasi untuk dapat mengungkap permasalahan yang terkait dengan penelitian sehingga ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

Pemilihan informan yang tepat yaitu didasarkan atas subjek yang memiliki banyak informasi dan bersedia untuk membagi informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya peneliti wajib memahami peran dan tanggung jawab posisi informan terhadap topik yang diteliti. Adapun penggalan informasi yang menjadi informan awal dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara, dan informan selanjutnya adalah Sekretaris, Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, Kepala seksi pengolah sampah dan limbah B3, Kepala UPTD DLH, dan Kepala sub bagian perencanaan dan keuangan, serta staf yang ada di DLH. Dalam penelitian ini membahas tentang kolaborasi

antara berbagai *stakeholders* sehingga melibatkan informan dari Dinas lain seperti Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Sekretaris tim penggerak PKK, Lurah, serta beberapa masyarakat di kecamatan kulisusu.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan arsip yaitu catatan-catatan, rekaman, maupun gambar yang berhubungan dengan objek penelitian. Penggunaan dokumen sebagai sumber data karena dokumen memegang peranan penting guna mendukung fakta-fakta empirik. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dan arsip pengelolaan sampah pada kantor pemerintah instansi yang terkait, hasil wawancara awal dari Dinas Lingkungan Hidup, jurnal penelitian, tesis penelitian terdahulu, dan buku teks. Data sekunder ini meliputi berbagai hal, antara lain keadaan geografis dan demografis, keadaan sosial ekonomi dan budaya daerah penelitian. Jadi sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu para informan dan dokumen tertulis.

4.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data penelitian diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang baik secara lisan maupun tertulis untuk menjawab permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono (2012: 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan dapat mendapatkan

data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Untuk memperoleh data yang diinginkan penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

4.5.1 Wawancara

Menurut Sugiyono (2012: 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Herdiansyah (2011: 121) Secara garis besar wawancara terbagi menjadi tiga yaitu; wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Ciri-ciri dari wawancara semi-terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

Permasalahan dalam pengelolaan sampah melibatkan berbagai *stakeholders* dengan informan yang bervariasi sehingga diperlukan keluwesan dalam menggali informasi dilapangan, maka penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yang didasarkan atas *snowball sampling* sehingga sampai pada titik kejenuhan data yakni tidak adanya variasi data yang ditemukan lagi dari informan awal. Tujuan wawancara dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak diminta pendapat. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang di kemukakan informan.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang meliputi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara, dan informan selanjutnya adalah Sekretaris, Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, Kepala seksi pengolahan sampah dan limbah B3, Kepala UPTD DLH, dan Kepala sub bagian perencanaan dan keuangan, serta staf yang ada di DLH. Dalam penelitian ini membahas tentang kolaborasi antara berbagai *stakeholders* sehingga melibatkan informan dari Dinas lain seperti Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Sekretaris tim penggerak PKK, Lurah, serta beberapa masyarakat di Kecamatan Kulisusu. Wawancara dilakukan di kantor DLH maupun ditempat lain seperti di pasar, dan di rumah warga dengan para informan sehingga peluang dalam mendapatkan informasi terwujud, sehingga dapat mengungkapkan permasalahan pengelolaan sampah.

4.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti (Deddy, 2004: 195). Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah segala bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara berupa data, foto, laporan kegiatan, atau segala bentuk dokumentasi yang merekam aktivitas pengelolaan sampah sebagai pendukung objek penelitian ini.

4.5.3 Observasi

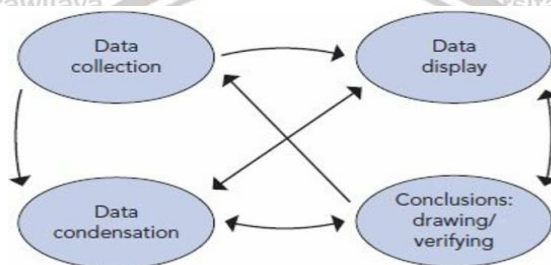
Menurut Sugiyono (2012:227) dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Maka dalam penelitian ini observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH di Kecamatan Kulisusu. Observasi dilakukan di beberapa tempat mulai dari pengelolaan sampah rumah tangga, di tempat umum, sampai pada keterangkutan sampah di TPA. Kegiatan observasi ini dapat mempermudah dalam memecahkan persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten buton Utara, selain itu peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap untuk mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Buton Utara.

4.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori penjabaran kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012:244). Teknik analisa data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) menyatakan bahwa analisa data kualitatif terdiri dari tiga komponen dalam proses analisis data yang terdiri dari

aspek *data condensation*, *data display*, dan *conclusions: drawing dan verifying* yang mana merupakan teknis analisis data interaktif. Ketiga aspek tersebut dapat dipaparkan secara rinci sebagai berikut ini:

Gambar 4.1 Gambar Teknik Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

a. *Data Condensation*

Data condensation atau kondensasi data merupakan proses yang dapat dilakukan dalam analisis data setelah dilakukan pengumpulan data. Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan dan upaya mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapang yang tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan-bahan lainnya (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014:27). Proses ini tidak hanya berarti pelaksanaan pengumpulan data, namun juga melaksanakan pemilihan dan pemfokusan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Karena dalam proses pengumpulan data, peneliti harus cermat melakukan kondensasi mana data yang bersifat informatif dan menjawab permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, kondensasi data dilaksanakan

berdasarkan fokus penelitian pada 3 rumusan masalah yang ditentukan. Lebih lanjut, kondensasi data dilaksanakan dengan menuliskan transkrip wawancara dari para informan dan memilah dokumen-dokumen *stakeholders* yang terkait

b. *Data Display*

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data yang adalah melakukan *display* atau penyajian data. Secara umum penyajian data merupakan kumpulan informasi yang terorganisir yang dapat memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat hasil kondensasi data untuk diolah ketahapan selanjutnya.

Penyajian data dapat dirancang dengan membuat tabel matriks untuk data kualitatif yang memiliki implikasi kondensasi data yang jelas (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014: 28). Dalam konteks penelitian ini penyajian data dilakukan melalui kutipan hasil wawancara, dokumentasi foto dari instansi terkait serta hasil wawancara yang dapat disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian data ini tentunya tetap dilakukan setelah kondensasi data dilakukan, sehingga data yang disajikan akan sesuai dengan fokus penelitian.

c. *Conclusions: Drawing/Verifying*

Langkah ketiga dalam tahapan analisis data yakni melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Dalam konteks analisis data, kesimpulan yang bersifat final mungkin tidak muncul hingga pengumpulan data selsesai, karena itu sangat menuntut kecermatan peneliti dalam proses-proses sebelumnya. Selain itu, dalam prosesnya

peneliti juga harus melakukan verifikasi hasil kesimpulan dengan menilik kembali catatan lapang atau argumentasi yang telah dibuat sehingga terwujud kemantapan hasil penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014: 29). Hal ini dilaksanakan agar validitas data dapat terpenuhi dalam penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian menyangkut pengelolaan sampah dalam perspektif *collaborative governance* dapat tercapai penarikan kesimpulan yang sesuai dari segi teoritis dan fakta di lapangan.

4.7 Keabsahan Data

Dalam proses penelitian diperlukan keabsahan data agar data yang diperoleh mempunyai tingkat kepercayaan yang tidak diragukan lagi. Menurut Moleong (2007: 324), terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, antara lain:

a. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Kriteria kepercayaan (*credibility*) merujuk pada kepercayaan pembaca dan persetujuan partisipan (informan) penelitian terkait dengan hasil penelitian. Dalam konteks kredibilitas ini peneliti melakukan beberapa upaya sebagai berikut: a) melakukan observasi dan wawancara secara terus menerus dan sungguh-sungguh dalam rangka memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan fokus penelitian; b) melakukan triangulasi teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi; c) melibatkan teman sejawat yang tidak ikut melaksanakan

penelitian untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritikan dalam proses penelitian. Hal ini perlu dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan penelitian pada kompleksitas fenomena yang sedang diteliti.

b. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan (*transferability*) berkaitan dengan kemampuan hasil temuan penelitian untuk diberlakukan (*transferable*) dalam konteks yang sama. Agar hal ini bisa dilaksanakan, peneliti harus mampu menguraikan secara detail deskripsi konteks dan fokus penelitian. Dalam konteks ini peneliti melakukan semacam reduksi dan kodifikasi data yang sesuai dengan realitas di lapangan dan mengaitkan dengan indikator dari teori *collaborative governance* dan konsep pengelolaan sampah.

c. Kebergantungan (*Dependability*)

Ketergantungan peneliti dilaksanakan dengan memeriksa akurasi pengumpulan dan analisis data. Agar derajat reabilitas dapat terjadi maka diperlukan pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil dari penelitian. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan keilmuan dan komisi pembimbing. Setelah hasil penelitian dianggap benar oleh pembimbing maka dilakukan pertemuan baik formal maupun informal dengan rekan sejawat yang dapat memberikan masukan, salah satunya melalui forum seminar hasil penelitian.

d. Kepastian (*Confimability*)

Suatu penelitian dapat disebut obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Menguji standar kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian yang dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk memperoleh standar kepastian pada penelitian ini maka dilakukan pengecekan atau penilaian oleh dosen pembimbing selama berlangsungnya konsultasi tesis bersamaan dengan pengecekan standar ketergantungan.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Buton Utara

5.1.1.1 Pola Penanganan Sampah dan Cakupan Wilayah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara *leading sector* berada pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Petugas sampah menjalankan tugasnya setiap hari dengan mengumpulkan dan mengangkut sampah untuk daerah yang mudah dijangkau dari sumber timbulan sampah menggunakan dump truck. Kegiatan pengumpulan dimulai dari lokasi yang terjauh dari lokasi pembuangan akhir terus menuju mendekat kearah lokasi pembuangan. Semua jenis sampah rumah tangga maupun sampah lainnya disimpan pada tempat yang telah disediakan yaitu tempat pembuangan sementara (TPS), dari TPS sampah langsung diangkut dan dibuang ketempat pembuangan akhir (TPA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai berikut:

“Pengumpulan dan pengangkutan sampah kami lakukan setiap hari sesuai jam operasional di beberapa tempat saja di beberapa wilayah pemukiman masyarakat dan pasar. Setiap hari dalam proses pengumpulan dan pengangkutan sampah kami hanya melayani masyarakat yang menyediakan tempat pembuangan seperti tong sampah sendiri di rumah masing-masing dan berada tepat dipinggir jalan dan mudah dijangkau dengan truck pengangkut sampah. Adapun sampah yang ada di pasar kami angkut dalam dua atau tiga

hari hari sekali saja. Sampah yang dikumpulkan dari beberapa rumah warga dan dipasar kami angkut dan langsung dibuang di TPA sehingga belum ada upaya pemilahan dan pengolahan sampah ”. (Wawancara dengan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Bapak Na, Tanggal 3 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara)

Pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan hanya melayani masyarakat yang mempunyai pewadahan di depan rumah seperti tong sampah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya DLH saat ini mempunyai dua fungsi dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai regulator dan operator, sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik. Penyelenggaraan pelayanan masih sangat terpusat pada pemerintah belum melibatkan masyarakat maupun pihak lain dalam menjaga lingkungan yang bersih dan bebas sampah. Seperti yang disampaikan oleh bapak Na, Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, hasil wawancara (3 Februari 2020) sebagai berikut:

“Pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara terbilang masih sangat kurang dan masih banyak kendala dalam menjalankan tupoksi sebagai pengelola sampah. Beberapa kendala yang kami hadapi yaitu kemampuan kami dalam mengawasi dan mengurangi timbulan sampah sangat terbatas, sehingga kami merasa kewalahan dalam menangani pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang kami lakukan masih mengandalkan sumberdaya dan kemampuan sendiri belum melibatkan pihak manapun termasuk masyarakat. Dengan kemampuan yang terbatas sangat menyulitkan peran kami sebagai regulator dan operator dilapangan dalam mengelola sampah. sehingga pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik”. (Wawancara dengan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Bapak Na, Tanggal 3 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara).

Cakupan wilayah pengelolaan sampah saat ini hanya dilakukan pada satu kecamatan yaitu kecamatan Kulisusu dari enam kecamatan sebagai pusat

pemerintahan dan pusat perekonomian di Kabupaten Buton Utara. Kecamatan Kulisusu juga merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya yakni sekitar 23.545 jiwa sehingga menghasilkan sampah lebih banyak dari kecamatan yang lain. Kecamatan Kulisusu terbagi menjadi 7 Kelurahan dan 13 desa, dan tidak semua Kelurahan dan Desa mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dari DLH. Berikut jumlah Kelurahan dan desa di Kecamatan Kulisusu yang mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah

Tabel 5.1 Jumlah Kelurahan dan desa di Kecamatan Kulisusu yang mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah

No	Kelurahan	Kelurahan yang mendapatkan pelayanan Persampahan	Jumlah Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan pelayanan persampahan
1	Lipu	Mendapatkan pelayanan	-	-
2	Bangkudu	Mendapatkan pelayanan	6 Desa	4 Desa
3	Wandaka	Mendapatkan pelayanan	-	-
4	Sara'Ea	Mendapatkan pelayanan	1 Desa	1 Desa
5	Lakonea	Mendapatkan pelayanan	1 Desa	1 Desa
6	Lemo	Tidak mendapatkan pelayanan	3 Desa	-
7	Bone Lipu	Tidak mendapatkan pelayanan	2 Desa	-
Jumlah		5 Kelurahan	13 Desa	6 Desa

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

Dari uraian tabel diatas ada lima kelurahan dan enam desa yang mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dari DLH, sisanya ada dua Kelurahan dan tujuh desa belum mendapatkan sentuhan dari DLH. Secara umum pola penanganan dan

pengumpulan sampah masyarakat kecamatan Kulisusu diberbagai tempat masih menggunakan cara individual, dan individual langsung sehingga sangat mudah masyarakat membuang sampah dengan caranya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pola penanganan sampah saat ini oleh DLH dibedakan menurut fungsi perwilayahan meliputi:

1. Pemukiman

Pola pengelolaan sampah pemukiman dilakukan dengan cara individual, dan individual langsung. Pola individual yaitu dengan cara menimbun, membakar dan membuang ditempat yang tidak diinginkan. Sementara individual langsung dengan cara masyarakat membuang langsung sampah yang dihasilkan ke armada pengangkut sampah dan diteruskan di TPA

2. Pasar

Pengelolaan sampah di tempat komersil seperti pasar pengangkutan dan pengumpulan sampah ke TPS menjadi tugas pegawai pasar yang ditugaskan khusus oleh koordinator pengelola pasar yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten buton Utara. Untuk pengangkutan ke tempat pembuangan akhir menjadi tanggung jawan DLH.

3. Pertokoan

Dikabupaten Buton Utara khususnya di Kecamatan Kulisusu belum ada kompleks pertokoan sehingga pengelolaan sampah oleh masing-masing pemilik toko dengan cara pola individual dan individual langsung.

4. Institusi/perkantoran dan sekolah

Demikian juga dengan sampah istitusi/perkantoran, sampah dikelola langsung seperti sampah di pemukiman dan pertokoan.

5. Jalanan dan fasilitas publik

Pola penanganan sampah di setiap jalan protokol dan fasilitas publik dilakukan oleh petugas penyapu jalan dan pemotong rumput dari DLH. Setiap jalan protokol sudah ditentukan petugas kebersihan untuk menangani sampah yang dilengkapi dengan sampu lidi dan gerobak pengangkut sampah. Sampah tersebut dikumpulkan pada satu titik atau wadah sampah untuk diangkut oleh armada pengangkut sampah ke TPA. (Wawancara dengan Kepala bidang

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Bapak Na, Tanggal 3 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara)

Dinas Lingkungan Hidup bekerja dengan menggunakan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, yang dapat menjadi input dan acuan untuk bekerja dalam pengelolaan sampah. Berikut ini analisis kondisi sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup

5.1.1.2. Analisis Sumberdaya Pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara

5.1.1.2.1 Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung dalam proses pengelolaan sampah. Sarana dan prasarana meliputi; pewadahan, kendaraan, dan TPA. Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan sarana pewadahan secara komunal untuk menampung volume sampah berupa TPS sebanyak 101 unit pada tahun 2018.

5.1.1.2.1.1 Analisis Pewadahan Sampah

Kondisi TPS yang digunakan di Kabupaten Buton Utara khususnya di Kecamatan Kulisusu yang meliputi daerah pelayanan persampahan disekitar pemukiman warga, komersil, dan istitusi dalam kondisi yang kurang baik dan tidak terawat. Pewadahan seperti TPS yang tersdia di Kecamatan Kulisusu tidak seragam

dan bervariasi dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari susunan batu bata dalam bentuk beton, besi, dan tong plastik untuk sampah organik dan anorganik.

Tabel 5.2 Jumlah Kapasitas TPS Kabupaten Buton Utara

Tahun	Unit	Volume TPS			
		Beton		Tong	
2016	95	63	M ³	-	-
2017	101	6	M ³	12,56	M ³
2018	101	6	M ³	12,56	M ³
Jumlah		165	M ³	25,12	M ³

Total Daya Tampung adalah Rp. 177,56 M³

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara, 2020

Kondisi TPS tersebut tidak bertahan lama dan mengalami kerusakan dari tahun ketahun. Dari hasil wawancara dengan pengelola barang Dinas Lingkungan Hidup bahwa jumlah TPS yang tersisa tahun 2020 sekitar 2 unit saja.

“Kondisi dan jumlah tempat pemadatan sampah pada tahun 2019 mengalami penurunan. Pengadaan TPS dilakukan dari tahun 2016 sejumlah 51 unit sampai pada tahun 2018 sejumlah 101 unit, namun keadaan TPS tidak bertahan lama karena banyak TPS yang dirusak oleh masyarakat. Sehingga pada tahun 2019 tidak ada lagi pengadaan dan perbaikan pemadatan sampah dengan jumlah yang terisa sekitar 2 unit saja. Dua unit yang tersisa adalah tempat pemadatan yang terbuat dari besi yang terletak di pasar dan di desa wapala serta tidak digunakan lagi”. (Wawancara dengan pengelola barang DLH Bapak As, Tanggal 4 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara).



Gambar 5.1 Jenis tempat sampah yang ada dan telah rusak

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buton Utara Tahun 2020

Pada saat awal di adakan pembangunan pewadahan sampah ditempatkan dipinggir jalan yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun tempat pewadahan yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum bisa mengatasi timbulnya bau busuk akibat dari sampah yang tidak terangkut dengan baik, dan tempat pewadahan dari beton dan drum tidak memiliki penutup sehingga sangat rentan mengalami pembusukan pada saat terkena air hujan. Selain itu ukuran tong sampah yang terbuat dari plastik tidak bisa menampung banyak beban sampah yang banyak sehingga sampah berserakan di sekitar TPS. Akibat dari pembusukan sampah, masyarakat yang dekat dengan TPS merasa tidak nyaman dan banyak tempat pewadahan sampah yang dirusak oleh masyarakat, sehingga TPS dipinggir jalan yang dekat dengan pemukiman warga sudah tidak ditemukan lagi. Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu tentang perusakan TPS sebagai berikut:

”Kami tidak merasa nyaman dengan bau busuk yang timbul dari TPS, karena sampah yang ada di tempat pewadahan sampah sering telat terangkut. Dan sampah di TPS bercampur dengan berbagai macam sampah yang mudah hancur dan membusuk maupun sampah lainnya. Sehingga kami terpaksa merusaknya agar tidak ada lagi yang membuang sampah didekat rumah tempat tinggal kami”. (Wawancara dengan Bapak Ar, Tanggal 6 Februari 2020 di Kelurahan Lakonea, Kabupaten Buton Utara).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Ha, yang mengeluhkan tentang ketidaknyamanan terhadap keberadaan TPS yang ada disekitar rumah ibu Ha.

“Rumah saya sangat dekat dengan TPS di Kelurahan Bangkudu, saya merasa sangat tidak nyaman dengan keberadaan TPS tersebut karena sampah tidak terangkut setiap hari. TPS yang ada didekat rumah saya ada dua macam yaitu TPS yang terbuat dari beton yang tidak memiliki penutup dan TPS yang berbentuk drum plastik yang ukurannya kecil. Sampah yang tidak

terangkut selalu mengalami pembusukan yang mencemari lingkungan sekitar rumah saya. Selain ketidak terangkutnya sampah masalah lain ditambah dengan perilaku masyarakat yang membuang sampah disekitar TPS, sehingga TPS tidak difungsikan dengan baik dan sampah menumpuk disekitar TPS” (Wawancara dengan Ibu, Ha, Tanggal 7 Februari 2020 di Kelurahan Bangkudu, Kabupaten Buton Utara).

Dari hasil obervasi peneliti disetiap kelurahan pemukiman warga sudah tidak ada lagi TPS yang dekat dengan pemukiman masyarakat sehingga sangat sulit bagi masyarakat membuang sampah ditempat yang telah disediakan. Sedangkan di lingkungan komersil seperti pasar hanya tersisa satu unit yang berbentuk kontainer yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. TPS yang lain terbuat dari beton sebanyak dua unit yang cukup besar untuk menampung sampah yang disediakan oleh Dinas Peridustrian dan perdagangan. Walaupun kondisi TPS yang sangat minim tetap masih layak untuk digunakan, mudah di jangkau dan mencukupi untuk pembuangan secara komunal. Tetapi keadan disekitar pasar masih sangat memprihatinkan, karena sampah dari berbagai jenis masih terlihat disekitar area pasar. Pedagang pasar pada umumnya tidak membuang sampah pada tempatnya, dan TPS masih belum difungsikan dengan baik.



Gambar 5.2 Keadaan tempat pembuangan sapah di pasar
Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2020

Kondisi fasilitas pewadahan sampah yang semakin berkurang maka masyarakat di Kabupaten Buton Utara menyediakan tempat sampah di rumah masing-masing atau membuang sampah dengan cara dibakar, ditimbun, ditumpuk dipinggir jalan, dan sisanya dibuang dipinggir pantai atau keluat. Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Lipu tentang susahny mendapatkan TPS.

“Sangat susah mendapatkan tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Ada sih di sekitar pasar, tetapi sangat jauh dari pemukiman masyarakat sehingga sampah setiap hari kami kelola sendiri dengan cara dibakar, ditimbun, baung kelaut, atau ditumpuk saja dipinggir jalan”. (Wawancara dengan bapak Li, Tanggal 7 Februari 2020 di Kelurahan Lipu, Kabupaten Buton Utara).

Pememandangan sampah berserakan terlihat disetiap ruas jalan yang sepi dan tidak berpenghuni. Hasil observasi dari penulis daerah pantai dan laut menjadi sasaran warga masyarakat untuk membuang sampah. Seperti diketahui bahwa Kecamatan Kulisusu merupakan daerah pesisir dekat dengan pantai sehingga tepian pantai menjadi tempat pembaungan sampah. Bagi masyarakat suku bajo, laut menjadi tempat pembuangan sampah yang paling dekat karena mereka bermukim di tengah laut walaupun sudah ada jalan yang menghubungkan dengan daratan dan TPS sudah disediakan oleh pemerintah. Berikut ini hasi observasi dan dokumentasi terkait tempat pembuangan sampah yang sering dijadikan masyarakat sebagai lahan untuk membuang sampah.



Gambar 5.3 Pembuangan sampah masyarakat di tempat umum dan dipinggir pantai

Sumber: Dokumentasi peneliti Tahun 2020

Dari berbagai uraian diatas pewardahan merupakan salah satu masalah yang belum terselesaikan untuk menampung sampah khususnya bagi masyarakat yang ada dipemukiman sebagai penghasil utama sampah di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Diperlukan suatu usaha yang besar untuk mencari solusi pengadaan kembali pewardahan yang tepat di pemukiman masyarakat. Diperlukan suatu analisis tentang besaran jumlah TPS dan penempatan yang tepat sehingga tidak mengganggu ketenangan masyarakat.

5.1.1.2.1.2 Analisis Alat Angkut

Kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara merupakan aset dari Dinas Lingkungan Hidup. Alat angkut yang digunakan terdiri dari 4 buah truk open damping dengan rincian 2 buah truck open damping tahun 2009 dan 2 buah truck open damping tahun 2013 dengan waktu operasional pagi hari mulai pukul 05.00 s/d 08.00 Wita.

Adapu kondisi kendaraan operasional dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 Jumlah alat angkut sampah dan kondisinya pada DLH Kabupaten Buton Utara

No	Jumlah Truck	Kondisi		Tahun keluaran
		Baik	Rusak	
1.	2	1	1	Tahun 2009
2.	2	1	1	Tahun 2013

Jumlah	4	2	2	
--------	---	---	---	--

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buton Utara Tahun 2020

Kondisi eksisting jumlah kendaraan pengangkut sebanyak 2 unit, kendaraan yang aktif digunakan sebagai pengangkut sampah hanya 1 unit dan 1 lagi dipakai untuk berbagai keperluan. Jika pengangkutan dilakukan setiap hari maka jumlah kendaraan yang ada sangat tidak mencukupi. Dengan pertimbangan tersebut maka pengangkutan dilakukan setiap hari dengan kendaraan yang gunakan sebanyak 1 unit saja dan terdapat kekurangan 3 unit kendaraan. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup kekurangan 3 unit kendaraan tersebut dapat dipenuhi dengan kendaraan roda tiga bermesin karena kondisi topografi yang bergelombang dan agar semua lokasi sumber timbunan dapat dijangkau dengan kendaraan pengangkut dan memaksimalkan penggunaan kendaraan yang sudah ada.

Namun pengadaan kendaraan roda tiga masih sebatas perencanaan sampai sekarang belum terpenuhi karena anggaran yang sangat terbatas. Dan pola pengangkutan yang lebih tepat dengan kondisi daerah adalah pola komunal langsung. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya adalah, jumlah alat angkut yang tersedia terbatas, pemukiman tidak teratur, kondisi topografi yang bergelombang, wadah komunal ditempatkan sesuai kebutuhan dan lokasi yang mudah dijangkau oleh alat pengangkut. Sesuai dengan penjelasan wawancara Kepala Dinas DLH sebagai berikut ini:

“Kami masih sangat kekurangan alat angkut dalam pengelolaan sampah. Kekurangan 3 unit kendaraan dapat dipenuhi dengan kendaraan roda tiga bermesin sebanyak 7 unit dengan kapasitas angkutan 1.5 meter. Karena kondisi

topografi yang bergelombang dan agar semua lokasi sumber timbunan dapat dijangkau dengan kendaraan pengangkut dan memaksimalkan penggunaan kendaraan yang sudah ada. Namun hal tersebut kami masi sebatas merencanakan belum terealisasi sampai saat ini”. (Wawancara dengan Kepala Dinas DLH Bapak AZ, Tanggal 5 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara)

Sampai saat ini jumlah kendaraan yang dibutuhkan belum terpenuhi, sementara kendaraan dump truck yang rusak belum bisa dioperasikan dengan baik dan biaya perbaikan masih sangat minim. Dengan tidak terangkutnya sampah maka volume sampah terus meningkat setiap hari.

5.1.1.2.1.3. Analisis Kebutuhan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Pengelolaan akhir sampah Kabupaten Buton Utara terletak pada Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu. Lokasi TPA ini dioperasikan sejak Tahun 2013 dengan sarana dan prasarananya belum memadai. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara tahun 2020 bahwa pengadaan lahan untuk rencana lokasi TPA adalah 10 hektar. Namun sampai saat ini tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan luas 10 hektar tersebut belum semua dikelola untuk lahan TPA. Yang digunakan untuk lahan TPA sekita 2 Hektar sehingga masih ada sisa 8 Hektar dan belum ada pengolahan dengan system *controlled landfill*.

Pembangunan lokasi TPA dengan luas 2 hektar di Kabupaten Buton Utara diadakan oleh pemerintah pusat dari kementrian Pekerjaan Umum pada tahun 2012 karena minimnya anggaran dari daerah. Sampai saat ini pemanfaatan TPA yang

berlokasi di Desa Eelahaji belum berjalan dengan baik, karena belum definitif milik Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga TPA yang tersedia belum dioperasikan secara penuh oleh pihak terkait, dan belum ada serah terima barang ke dinas terkait. Seperti yang diketahui dari hasil wawancara dengan Sekretaris DLH bahwa:

“Pengadaan TPA yang berada di Desa Eelahaji dengan luas lahan 10 hektar menggunakan dana dari pusat oleh kementria PU yang dikelola langsung oleh pusat. Lokasi pembangunan TPA yang digunakan adalah seluas 2 Hektar dan sisanya belum dikelola. Namun TPA tersebut masih mengalami perbaikan karena mengalami kerusakan sebelum serah terima barang ke Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga TPA tersebut masih menjadi aset pemerintah pusat dan belum bisa digunakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah”. (Wawancara dengan Sekretaris DLH Bapak MN, Tanggal 4 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara).

Berikut ini gambaran tentang keadaan TPA yang berlokasi di Desa Ee Lahaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara



Gambar 5.4 Kondisi TPA di Kabupaten Buton Utara
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buton Utara Tahun 2020

Desekitar lokasi TPA nampak sampah menumpuk tidak teratur dipinggiran TPA karena sampah tersebut belum sepenuhnya bisa dibongkar di lokasi TPA yang tersedia. Pembuangan akhir dilakukan disekitar TPA dengan cara *open dumping*

dibuang begitu saja di sekitar TPA sehingga nampak sampah yang menggunung dan berserakan tidak teratur.

5.1.1.2.2 Analisis Sumberdaya Manusia

Status kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai kontrak/P3K. Bagian ini adalah pemaparan mengenai data jumlah pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara yang dibedakan menurut golongan, eselon dan pendidikan. Pemaparan akan dijelaskan melalui tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 5.4. Kondisi SDM Aparatur DLH Kab. Buton Utara berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Uraian	Jumlah Orang
Golongan IV	4
Golongan III	12
Golongan II	5
Golongan I	-
P3K	89
Jumlah	110

Sumber : DLH Kabupaten Buton Utara, 2020

Tabel 5.5. Kondisi SDM DLH Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Berdasarkan Jabatan

Uraian	Jumlah Orang
a. Struktural	
○ Pejabat Tinggi Pratama/Eselon II. B	1
○ Pejabat Administrator/Eselon III	3
○ Pejabat Pengawas/Eselon IV	7
b. Fungsional	-
c. Staf/P3K	99
Jumlah	110

Sumber : DLH Kabupaten Buton Utara, 2020

Tabel 5.6. Kondisi SDM Aparatur DLH Kab. Buton Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi (Orang)
S3	-
S2	4
S1	9
D3	1
D2	-
SLTA/P3K	96
Jumlah	110

Sumber : DLH Kabupaten Buton Utara, 2020

Sumber daya manusia (SDM) DLH Kabupaten Buton Utara sampai saat ini berjumlah 110 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan, dan pendidikan. Sebagian besar aparatur DLH terdiri dari PNS Golongan III yaitu sebanyak 12 orang, selanjutnya golongan IV sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 5 orang dan tenaga kontrak/P3K sebanyak 89 orang. Sedangkan berdasarkan komposisi jabatan masih ada kekurangan pejabat pengawas/Eselon IV yang menduduki jabatan kepala seksi belum terisi semua. Salah satu kepala seksi yang belum terisi adalah seksi pengolahan sampah dan limbah B3. Pada seksi ini masih belum ada staf PNS sehingga dibutuhkan sebaran yang merata dan penambahan staf untuk mengisi kekurangan diberbagai bidang DLH Kabupaten Buton. DLH masih kekurangan staf PNS dan mengalami ketidak seimbangan jumlah staf dalam beberapa bidang yang dimiliki eselon III maupun IV dalam menjalankan fungsinya. Hal ini sesuai dengan data dan wawancara dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.

“Untuk jabatan administrator atau kepala bidang di DLH sudah terpenuhi semua tetapi untuk pejabat pengawas atau kepala seksi belum

sepenuhnya terisi. Dan kami masih membutuhkan 3 kepala seksi lagi dari 11 jumlah yang dibuthkan. Selain itu kami juga masih membutuhkan staf PNS karena jumlah yang ada sekarang belum mencukupi data total staf PNS yang kami butuhkan”. (Wawancara dengan Sekretaris DLH bapak MN, Tanggal 4 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara)

Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, tampak bahwa sebagian besar aparatur BLH Kabupaten Buton Utara memiliki tingkat pendidikan SLTA sebanyak 96 orang, kemudian diikuti tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 9 orang, S2 sebanyak 4 orang dan D-III sebanyak 1 orang.

Jumlah personil pengangkutan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.7 Jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara

No	Personil	Jumlah
1.	Pengkut sampah	27
2.	Sopir	5
3.	Pengawas	3
4.	Pemotong Rumput	25
5.	Mekanik	10
6.	Penyapu Jalan	19
Jumlah		89

Sumber : DLH Kabupaten Buton Utara, 2020

Kondisi eksisting jumlah tenaga pengangkut persampahan sebanyak 82 orang. Kebutuhan Tenaga 1 Dump Truck (Sopir, kernet dan tenaga muat) sebanyak 5 orang, sementara itu tenaga pengangkut sampah sebanyak 27 orang dan sopir 5 orang. Melihat kondisi tersebut seharusnya disesuaikan dengan kendaraan yang difungsikan dalam mengangkut sampah yaitu 1 dump truck sebanyak 5 orang saja. Kendaraan

yang difungsikan dalam pengangkutan sampah yaitu 1 dump truck berarti total yang dibutuhkan hanya 5 orang saja, dan sopir 1 orang. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan jumlah alat angkut dengan personil pengangkutan sampah, sehingga personil yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

5.1.1.2.3 Analisis Sumberdaya Anggaran

Biaya pengelolaan persampahan di Kabupaten Buton Utara terdiri dari biaya operasional dan pemeliharaan, biaya pegawai dan pengangkut sampah, biaya operasional dan pemeliharaan dalam pengelolaan sampah berada pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Berikut rincian biaya operasional dan pemeliharaan dari tahun ketahun.

Tabel 5.8 Jumlah alokasi anggaran pengelolaan sampah dari tahun 2018 s/d 2020

No.	Tahun	Program	Anggaran	Jumlah
1	2018	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Rp. 73.500.000	Rp. 164.500.000
		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Rp. 91.000.000	
2	2019	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Rp. 82.500.000	Rp. 173.925.000
		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Rp. 91.425.000	

3	2020	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Rp. 30.760.000	Rp. 49.468.000
		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Rp. 18.708.000	

Sumber: DLH Kabupaten Buton Utara, Tahun 2020

Seperti yang terlihat dari tabel diatas anggaran yang tersedia sangat minim dan tidak mencukupi untuk biaya operasional dan pemeliharaan dalam pengelolaan sampah. Hasil dari wawancara dengan kasubag perencanaan dan keuangan bahwa:

“Anggaran yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup terbagi dalam beberapa bidang yang secara umum terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Adapaun belanja langsung tahun anggaran 2020 Rp. 1.637.814.000 dan mendapatkan pemotongan untuk biaya Covid-19 hingga menjadi Rp. 1.150.799.000. Khususnya anggaran yang tersedia pada pengelolaan sampah sangat sedikit dan semakin berkurang dari tahun ketahun sehingga kami sangat terbatas dalam pengelolaan anggaran, jadi kami hanya bisa melakukan sebagian dan semampu kami dalam pengelolaan sampah. Anggaran tersebut hanya cukup untuk operasional didalam kantor, sangatlah kurang kalau untuk kebutuhan operasional pengelolaan sampah dan biaya pemeliharaan”. (Wawancara dengan Kasubag perencanaan keuangan Bapak Aw, Tanggal 3 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara)

Adapaun biaya pegawai pengangkut dan pengelolaan sampah masuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran dengan jumlah besaran gaji personil pengangkut sampah sesuai kebutuhan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.9 Jumlah personil dan besaran gaji perbulan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara

No	Personil	Jumlah	Besaran gaji		
			Per Orang (Rp)	Per bulan (Rp)	Pertahun (Rp)
1.	Pengangkut sampah	27	950.000	25.650.000	307.800.000
2.	Sopir	5	1.200.000	6.000.000	72.000.000
3.	Pengawas	3	950.000	3.000.000	36.000.000
4.	Pemotong Rumpuk	25	900.000	22.500.000	270.000.000
5.	Mekanik	10	900.000	2.700.000	32.400.000
6.	Penyapu Jalan	19	600.000	11.400.000	136.800.000
	Jumlah	89	5.500.000	71.250.000	855.000.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buton Utara Tahun 2020

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, besaran gaji pengangkut sampah masih sangat kurang. Jika pelayanan ditingkatkan menjadi 100% maka besaran gaji pengangkut dan pengelola sampah harus pula ditingkatkan. Namun pada kenyataan dengan kondisi keuangan yang sangat minim gaji para pekerja hanya bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada pada saat ini. Besaran gaji yang diterima untuk tahun 2020 hanya bisa dianggarkan sampau bulan agustus 2020 sebesar RP. 355.500.000 dan belum ada kepastian untuk penambahan anggaran untuk mencukupi gaji para pekerja hingga 12 bulan. Sesuai dengan hasil kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa:

“Sebenarnya besaran gaji dari para pengangkut dan pengelola sampah harus dinaikan karena gaji tersebut masi sangat kurang terutama bagi pengangkut sampah, sehingga para pekerja lebih giat bekerja dalam menuntaskan persoalan sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Namun kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami hanya sebatas mengusulkan dan tidak ada realisi untuk kenaikan gaji dari pengelola dan pengangkut sampah. Tahun ini kami hanya bisa memberikan gaji sampai pada bulan agustus 2020 karena minimnya anggaran yang ada untuk pengelolaan sampah sebesar Rp. 355.500.000. (Wawancara dengan Kepala Dinas DLH Bapak AZ, Tanggal 5 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara)

Pada saat ini besaran jumlah anggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara berasal dari anggaran dan pendapatan belanja daerah, dan belum ada dari retribusi atau swadaya dari masyarakat. Pada masa yang akan datang diharapkan sumber anggaran bukan hanya diharapkan dari subsidi dari pemerintah tetapi juga swadaya masyarakat maupun dari sumber lainnya.

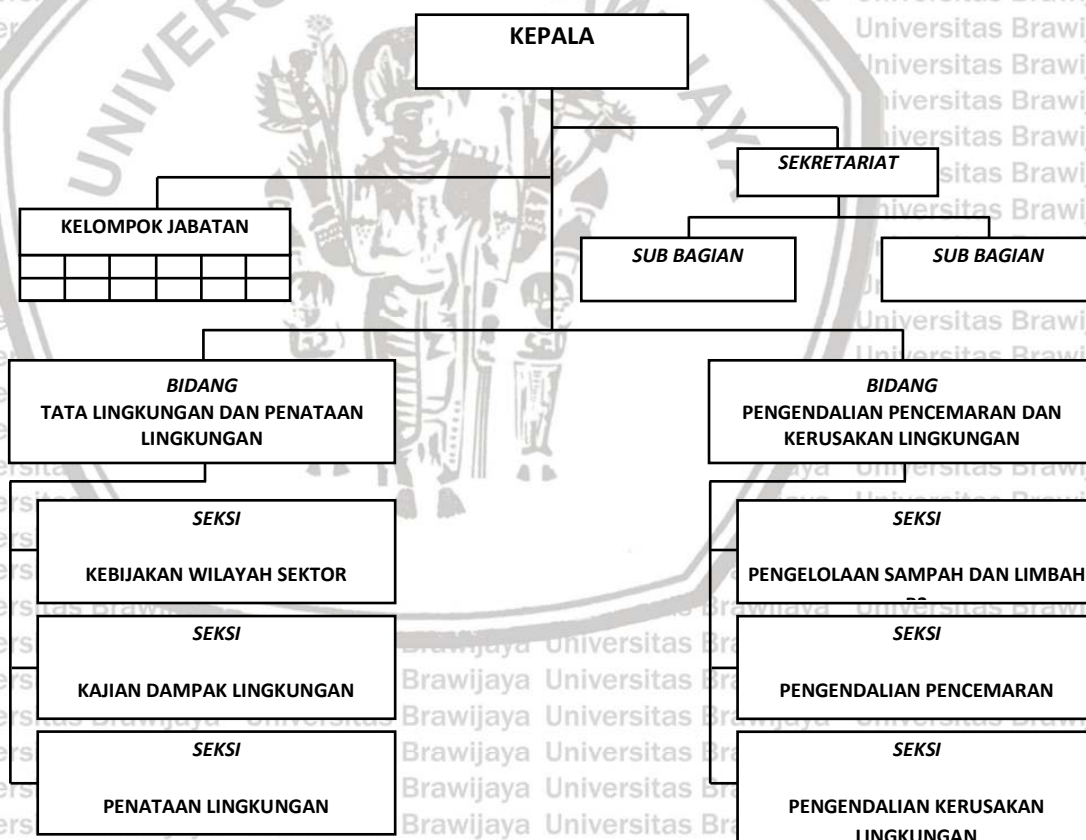
5.1.1.2.4 Analisis Organisasi Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara instansi yang berwenang dalam pengelolaan kebersihan/persampahan di Kabupaten Buton Utara adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Pengelolaan persampahan Kabupaten Buton Utara di bawah Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan unsur pelaksana teknis di bawah Bupati Buton Utara yang berfungsi sebagaipelaksana pelayanan tugas dan fungsi lingkungan dan kebersihan (Operator) yang juga berfungsi melaksanakan pengaturan/pengendalian (Regulator) persampahan di Kabupaten Buton Utara. Didalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup di pimpin oleh Kepala Dinas sedangkan teknis operasionalnya dibawah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan yang secara teknis dibawah Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretariat dan dua Kepala Bidang yakni Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Lingkungan dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buton Utara sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 5.5 Struktur organisasi DLH Kabupaten Buton Utara

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan penyediaan penetapan, pengembangan teknologi dan investasi terhadap bidang pengelolaan sampah dan limbah berbaru, berbahaya, beracun serta peningkatan kapasitas.

Pelaksanaan tugas secara teknis untuk persampahan pada Bidang Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dilakukan oleh Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, mempunyai tugas: a). Menyusun informasi pengelolaan sampah; b).

Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap

kurun waktu tertentu; c). Merumuskan kebijakan pengurangan sampah; d). membina

pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri; e). Membina penggunaan

bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; f). Membina

pendaurulangan sampah; g). Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah; h).

Membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; i).

merumuskan kebijakan penanganan sampah; k). Mengkoordinasikan pemilahan,

pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; l). menyiapkan sarana

dan prasarana penanganan sampah; m).Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa

layanan pengelolaan sampah; n). Menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA

sampah; o). Melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan

system pembuatan open dumping; p). Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

system tanggap darurat pengelolaam sampah; q). Memberikan kompensasi dampak

negative kegiatan pemrosesan akhir sampah dan, r). Melaksanakan kerjasama dengan

badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.

Berdasarkan struktur organisasi diatas menggambarkan struktur pemerintahan yang hirarki yang terlihat cukup jelas dimana jenjang hirarki pemerintah yaitu dimulai dari kepala dinas terhadap bawahannya. Dibawah kepala dinas ada kepala bidang, dibawah kepala bidang ada kepala seksi, dan dibawah kepala seksi ada staf Dinas Lingkungan Hidup. Sekretaris membawahi bidang perencanaan, umum dan kepegawaian yang saling berkoordinasi dengan kepala dinas maupun kepala bidang untuk kelancaran tugas-tugas dalam organisasi. Namun jejang hirarki sangatlah nampak dalam menajalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris DLH Kabupaten Buton Utara bahwa:

“Struktur organisasi masih mencirikan sistim yang hirarki yang mengacu keperintah, seperti pada umumnya yang ada di organisasi perangkat daerah yang ada di Indonesia. ciri khas organisasi pemerintah kan pada umumnya masih menggunakan sistim yang hirarki, sepertinya sudah menjadi ciri khas semua pemerintah di sini dan di daerah lain. Kepala dinas mempunyai bawahan yaitu sekretaris dan para kepala bidang, setelah bidang ada kepala seksi dan staf. Pada prinsipnya harus saling berkoordinasi antar bidang guna kelancaran tugas-tugas dalam organisasi kami”. Wawancara dengan Sekretaris DLH Bapak MN, Tanggal 4 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara)

Unit kerja dalam struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara yang berperan secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan saat ini belum maksimal disebabkan perubahan tata organisasi kelembagaan dari tugas dan fungsi Dinas Kebersihan diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris Dinas Lingkungan Hidup bahwa:

“Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengharuskan setiap daerah dan kota untuk melakukan perampangan organisasi. Dalam hal ini Dinas Kebersihan dilebur dan menjadi satu dengan Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga pada saat ini penanganan masalah sampah berada pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini membuat fungsi pengelolaan kebersihan menjadi sangat sempit dengan sumber daya anggaran dan sumberdaya manusia yang terbatas”. (Wawancara dengan Sekretaris DLH Bapak MN, Tanggal 4 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara).

Dalam hubungan internal organisasi dinyatakan saling berkoordinasi antara berbagai bidang dalam satu dinas, namun hubungan organisasi harus memperhatikan hubungan eksternal dengan pihak lain. Hasil yang didapatkan bahwa belum ada keterlibatan dengan Organisasi perangkat daerah manapun dalam pengelolaan sampah termasuk swasta. Sesuai dengan penjelasan wawancara dari Sekretaris DLH Kabupaten Buton Utara sebagai berikut:

“Hubungan internal dalam organisasi sudah cukup baik, pengelolaan anggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan, namun terkait dengan pengelolaan sampah belum ada sama sekali keterlibatan dari pihak eksternal sehingga pengelolaan masih kami sendiri yang melakukannya”. (Wawancara dengan Sekretaris DLH Bapak MN, Tanggal 4 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara)

Untuk itu perlu adanya kerjasama antara *stakeholders* guna menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah sehingga masalah pengelolaan sampah yang dirasakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat diselesaikan bersama untuk kepentingan masyarakat.

5.1.1.3. Capaian Hasil Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Jumlah Produksi

Sampah dan Sampah Terlayani di Kabupaten Buton utara

Akibat pengelolaan sampah yang tidak maksimal oleh DLH sampah nampak disejumlah tempat seperti di pantai, jalanan dan tempat umum lainnya, banyak sampah yang tidak terangkut dan menumpuk dimana-mana. Dengan adanya tumpukan sampah dipinggir jalan dan pengelolaan persampahan secara individual maka volume sampah di Kabupaten Buton Utara khususnya di Kecamatan Kulisusu dari tahun ketahun semakin meningkat. Berikut Tabel jumlah produksi sampah menurut fungsi perwilayahan pada tahun 2019

Tabel 5.10 Jumlah Produksi Sampah Menurut Fungsi Perwilayahan

No	Sumber Sampah	Jumlah Produksi sampah	Jumlah sampah yang dikelola
1	Sampah rumah tangga	9,6-10,2 m3/hari atau 1,92-2,04 toh/hari	
2	Pasar	5,1 m3/hari atau 1,02 ton/hari	
3	Jalanan umum	4,42 m3 atau 0,884 ton perhari	
4	Sekolah	4,08 m3/hari atau 0,816 ton/hari	
5	Pertokoan	3,4 m3/hari atau 0,68 ton/hari	
6	Istitusi/perkantoran	2,72 m3/hari atau 0,544 ton	

Sumber: DLH Kabupaten Buton Utara, 2020

Di Kecamatan Kulisusu sejak tahun 2019 proporsi sampah terbesar berasal dari sampah rumah tangga. Sementara itu total keseluruhan produksi sampah dikecamatan Kulisusu pada tahun 2019 sekitar 12.627 m3/tahun atau 2.525,4 ton pertahun dan diperkirakan akan terus bertambah dari tahun ketahun yang akan

datang. Untuk saat ini belum ada data lengkap tentang timbulan sampah yang terlayani dari semua produksi sampah perhari di Kabupaten Buton Utara.

Perbandingan antara produksi sampah dan sampah yang dapat dikelola dapat dilihat pada data tahun 2018 yaitu total produksi sampah di Kabupaten Buton Utara sekitar 155.222 m³/Tahun, khususnya di Kecamatan Kulisusu sekitar 58.863 m³/tahun dan sampah yang dapat di tangani 4.380 m³/tahun dari total sampah yang ada di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

Melihat kondisi dan data yang ada menunjukkan produktivitas sangat kurang dan cakupan wilayah yang tidak merata. Sampah yang ditangani hanya berada pada satu kecamatan, dan tidak semua kelurahan dan desa di Kecamatan Kulisusu mendapatkan pelayanan sampah dari DLH. Timbunan sampah yang begitu besar dilokasi tempat pemrosesan akhir akan mengakibatkan berbagai pencemaran hingga menyebabkan berbagai penyakit dan dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global. Dapat terlihat di lahan kosong, fasilitas umum dan pinggir jalan penumpukan sampah mengakibatkan munculnya masalah lingkungan fisik seperti bau tidak sedap, menurunnya estetika pemandangan kota.

5.1.2 Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perspektif Collaborative Governance

5.1.2.1 Identifikasi Stakeholders Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Sampah

Stakeholders merupakan penyelenggara dan para pihak yang terlibat secara internal maupun eksternal. Kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kabupaten

Buton Utara belum melibatkan *stakeholders* manapun baik masyarakat, swasta, maupun dengan lembaga atau institusi lain. Sehingga dibutuhkan peran serta semua *stakeholders* sesuai dengan tujuan pokok fungsi masing-masing dalam pengelolaan sampah. Identifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan sampah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.11 Identifikasi Stakeholders Kolaborasi Pengelolaan Sampah

No.	Stakeholders yang terlibat	Keterkaitan Program	Keterangan
A.	<i>Stakeholders Internal</i>		
	Organisasi Perangkat Daerah	Instansi pelaksana kegiatan/Instansi pengelola sampah	Ada yang terlibat langsung dan tidak terlibat langsung
	Pemerintah Kelurahan/Desa	Kebijakan dan koordinasi tingkat lokal	Terlibat langsung
B.	<i>Stakeholders Eksternal</i>		
	Pemerintah Pusat	Terkait program kebijakan tingkat nasional	Tidak terlibat langsung
	Pemerintah Provinsi	Terkait program kebijakan tingkat provinsi	Tidak terlibat langsung
	Pemerintah Daerah lain	Pertemuan dan sharing pengalaman implementasi kebijakan	Tidak terlibat langsung
	DPRD	Terkait program dalam regulasi, kontrol, dan penganggaran	Tidak terlibat langsung
	LSM/Perguruan Tinggi/Media Massa	Konsultan, pengawasan, lembaga riset dan sosialisasi	Tidak terlibat langsung
	Swasta	Angaran/Dana	Tidak terlibat langsung
	Tim Penggerak PKK	Mitra pemberdayaan masyarakat	Terlibat langsung
	Masyarakat	Sasaran pemberdayaan	Terlibat langsung

Sumber : Diolah Peneliti, 2020

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut dalam usaha pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara tidak semua *stakeholders* terlibat langsung dalam kolaborasi pengelolaan sampah. Ada yang berpengaruh tetapi tidak terkait secara langsung dalam kolaborasi pengelolaan sampah, namun tetap dilibatkan walaupun tidak secara langsung karena masih terkait dengan regulasi, penganggaran, konsultasi, pendampingan, kontrol, riset dan sosialisasi.

Berikut ini wawancara dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara terkait pihak lain yang berperan penting dalam pengelolaan sampah :

“Kami menyadari bahwa dalam usaha menangani permasalahan sampah banyak pihak yang terlibat didalamnya. Dinas Lingkungan Hidup tidak akan bisa menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sampah tanpa ada dukungan dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, DPRD, dan pihak perguruan tinggi. Komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dilakukan dengan cara konsultasi langsung untuk memperoleh masukan tentang pengelolaan sampah yang baik dalam hal regulasi, manajemen, dan teknik pengelolaan sampah. Pihak DPRD terkait penganggaran, pengawasan, dan juga regulasi. Walaupun dukungan anggaran dalam pengelolaan sampah saat ini masih sangat minim tetapi komunikasi masih dilakukan dengan sangat baik dan lancar. Adapun komunikasi dengan pihak universitas kami pernah melakukan kerjasama dalam penyusunan masterplan persampahan rencana teknis dan manajemen persampahan Kabupaten Buton Utara dengan pusat penelitian lingkungan hidup kebumih dan sumber energi LPM Universitas Haluoleo tahun anggaran 2017. Akan tetapi pada praktiknya kegiatan tidak terlaksana sebagaimana dalam perencanaan karena minimnya anggaran yang ada sampai saat ini.” (Wawancara dengan Kepala Dinas DLH Bapak AZ, Tanggal 5 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara)

Terkait kerjasama dengan pihak lain yang berperan penting dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD. Kehadiran lembaga pengelola sampah dalam bentuk

UPTD kebersihan sangat membantu dalam pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas lingkungan Hidup. Berikut ini wawancara dengan kepala UPTD DLH Kabupaten Buton Utara :

“Saya belum satu tahun dilantik menjadi kepala UPTD. Upaya yang kami lakukan saat ini adalah mengajak peran serta *stakeholders* dalam pengelolaan sampah. Saat ini kami sudah mengajak pihak kelurahan dan saya bertemu dengan lima lurah, dan Kepala Desa, Ketua penggerak PKK, di Kecamatan Kulisusu yang membahas upaya bersama dalam pengelolaan sampah. Mereka semua sangat antusias untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Namun pertemuan kami hanya sebatas membahas kesediaan masing-masing dalam mengatasi persoalan sampah belum membahas lebih jauh tentang teknis pengelolaan dan pengolahan sampah. Kami akan menjadwalkan pertemuan selanjutnya guna membahas lebih jauh lagi untuk membentuk kerjasama dalam pengelolaan sampah. Dalam jangka pendek dukungan dari *stakeholders* lain seperti LSM, swasta, media massa, dan pihak lain sangat diharapkan guna mendukung kinerja dinas Lingkungan Hidup saat ini. Dukungan LSM dibutuhkan untuk konsultan dan juga pengawasan, media masa untuk kebutuhan sosialisasi, sementara swasta diharapkan dukungannya dalam hal anggaran. Namun sampai saat ini kami belum mengundang pihak terkait untuk bekerjasama dalam pengelolaan sampah.” (Wawancara dengan Kepala UPTD DLH Bapak ES, Tanggal 6 Februari 2020 di Kantor UPTD Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara).

Identifikasi juga dilakukan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten buton utara yang terkait dalam pengelolaan sampah. Beberapa OPD yang diwawancarai dan berpeluang dalam pengelolaan sampah tetapi tidak secara langsung adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai peluang dalam pengelolaan sampah tetapi tidak secara langsung. Berikut ini wawancara dengan Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara :

“Bidang kepemudaan mempunyai program dalam menggerakkan para pemuda yang berkecimpun di beberapa bidang seperti perbengkelan, kuliner,

fashion, dimana bidang tersebut berpeluang dalam menghasilkan sampah. Sisa sampah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang yang berdayaguna dan berpeluang sebagai sumber pendapatan tambahan bagi para pemuda yang bergiat dibidangnya. Contohnya dibidang perbengkelan sisa ban bekas dapat dimanfaatkan menjadi tempat sampah atau kursi berserta meja, dibidang fashion sisa percah kain dan rambut tidak dibuang begitu saja tetapi dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan seperti taplak meja, keset, sanggul, dan lain sebagainya. Tetapi masalahnya sekarang ini kami dibidang kepemudaan tidak mempunyai anggaran untuk melakukan kegiatan tersebut. Sekarang ini anggaran bidang kepemudaan fokus pada kegiatan paskibra, pembinaan organisasi kepemudaan, dan konsultasi dalam dan luar daerah.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Kepemudaan Bapak HE, Tanggal 7 Februari 2020 di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Buton Utara).

Sementara itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga mempunyai peluang tetapi tidak secara langsung terkait dengan kebersihan dan keindahan dibeberapa tempat wisata. Berikut ini wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata bahwa :

“Kami sangat prihatin dengan keberadaan tempat wisata di Kabupaten Buton Utara. ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan khususnya kebersihan tempat wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal. Kunjungan wisatawan berpulang besar untuk menghasilkan sampah yang sangat mengganggu disaat kunjungan wisatawan apalagi hari-hari tertentu seperti weekend dan hari libur lainnya. Apalagi di Dinas Pariwisata belum ada ketentuan retribusi tempat wisata sehingga anggaran untuk pendapatan belum ada. Jadi anggaran khusus kebersihan di tempat wisata sangat minim bahkan tidak bisa menjangkau seluruh tempat wisata yang ada di Kabupaten Buton Utara.” (Wawancara dengan Kasi ODTW Ibu SU, Tanggal 11 Februari 2020 di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Buton Utara).

Aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi diidentifikasi untuk menciptakan dinamika interaksi antar *stakeholders*. Identifikasi ini berdasarkan peran serta sumberdaya yang dimiliki para aktor yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. Lebih lanjut, identifikasi *stakeholders* yang terlibat langsung dalam kolaborasi pengelolaan sampah akan di muat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.12 Identifikasi *Stakeholders* Yang Terlibat Langsung Kolaborasi Pengelolaan Sampah

No.	<i>Stakeholders</i> yang terlibat langsung	Peran	Sumber Daya
1.	Dinas Lingkungan Hidup	Instansi Pelaksana teknis kegiatan dalam pengelolaan sampah	SDM, sarana prasarana dan anggaran
2.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Instansi pelaksana dalam pemberdayaan masyarakat	SDM, sarana prasarana dan anggaran
3.	Pemerintah lokal (Kelurahan/Desa)	perwakilan masyarakat tingkat lokal	SDM, sarana prasarana dan anggaran
4.	Kelompok penggerak PKK	Mitra pelaksana kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat	SDM, sarana prasarana dan anggaran
5.	Masyarakat	Sasaran pemberdayaan dan pelayanan	SDM dalam pengelolaan sampah

Sumber : Diolah peneliti, 2020

Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya melimpahkan wewenang kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai sumberdaya manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta manajemen pengelolaan sampah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Keterlibatan Dinas Koperasi UMKM karena terkait dengan kegiatan pendampingan usaha, permodalan, dan juga pemasaran hasil usaha dari hasil kegiatan pelatihan yang dilakukan. Dinas Koperasi UMKM pada tahun ini berencana untuk mengadakan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dengan bahan dasar sampah plastik. Hasil kerajinan tangan yang akan dibuat seperti keranjang plastik, bunga plastik, dan kerajinan tangan lainnya yang bahan dasarnya dari sampah plastik. Pada

tahun sebelumnya Dinas Koperasi UMKM selalu mengadakan pelatihan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kerajinan tangan pembuatan tempat tisu dari sisa kayu yang tidak terpakai, pembuatan keranjang dari rotan, pembuatan minyak vco, dan pembuatan olahan rumput laut. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan kepala bidang usaha kecil dan menengah Dinas Koperasi UMKM.

“Kami selalu mengadakan pelatihan untuk memberdayakan masyarakat setiap tahun untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat Kabupaten Buton Utara. Tahun lalu kami mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan tempat tisu dari plastik dan sisa kayu yang tidak terpakai, membuat keranjang dari rotan, pemanfaatan rumput laut dan pembuatan minyak vco. Yang kami lakukan bukan hanya sekedar pelatihan, tetapi juga sesuai dengan tupoksi kami yaitu mengadakan pendampingan, memberikan bantuan sarana dan prasarana, permodalan dan juga pemasaran hasil produk yang telah dilakukan. Tahun ini kami berencana untuk mengadakan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari sampah plastik untuk dijadikan keranjang/tas plastik, bunga dari plastik dan lainnya agar masyarakat sadar bahwa sampah mempunyai nilai ekonomis untuk digunakan kembali”. (Wawancara dengan Kepala bidang usaha kecil dan menengah Bapak La, Tanggal 10 Februari 2020 di Kantor Dinas Koperasi, UMKM, Kabupaten Buton Utara).

Berikut ini gambar pelatihan pembuatan keranjang dari rotan dan tempat tisu



Gambar 5.6 Pelatihan pembuatan keranjang dari rotan, tempat tisu dari plastik dan sisa kayu yang tidak digunakan lagi

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kab. Buton Utara Tahun 2020

Lurah dan kepala desa berperan sebagai mitra pemerintah daerah yang dapat membantu pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah. Keterlibatan langsung

Lurah dan Kepala desa karena mempunyai program kegiatan serta mempunyai anggaran dalam pengelolaan sampah. Kecamatan Kulisusu terdiri dari 7 kelurahan dan 13 desa dan masing-masing kelurahan terbagi dalam beberapa lingkungan.

Rincian Kelurahan, jumlah lingkungan, dan desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.13 Jumlah kelurahan, desa, dan lingkungan di Kecamatan Kulisusu.

No.	Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Jumlah Desa
1	Lipu	3 Lingkungan	-
2	Bangkudu	3 Lingkungan	6 Desa
3	Wandaka	2 Lingkungan	
4	Sara'Ea	2 Lingkungan	1 Desa
5	Lakonea	3 Lingkungan	1 Desa
6	Lemo	3 Lingkungan	3 Desa
7	Bone Lipu	2 Lingkungan	2 Desa

Sumber : Kecamatan Kulisusu, Tahun 2020

Dengan melibatkan langsung pemerintah kelurahan dan desa diharapkan pengelolaan sampah disetiap kelurahan dan desa dapat berjalan dengan baik. Seperti yang dikutip dari wawancara dengan Lurah Sara'Ea sebagai berikut:

“Melihat kondisi sekarang ini saya sangat prihatin dengan sampah yang ada disetiap lingkungan. Kami sangat bersedia dilibatkan dalam pengelolaan sampah karena sampah tidak bisa lagi di tangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tahun ini kami menganggarkan pengadaan tong sampah dari plastik untuk ditempatkan disetiap lingkungan. Setiap tong sampah plastik dapat melayani tiga kepala keluarga untuk menampung sampah sementara. Sehingga kami mengupayakan untuk pengadaan tong sampah tahun ini agar masyarakat dapat terlayani semuanya. Tahun depan kami menganggarkan pengadaan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah disetiap tong sampah yang ada di masyarakat. Untuk saat ini kalau tong sampah sudah siap pakai pengangkutan sampah masih diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup

untuk di buang ke TPA. Tahun ini kami juga mengupayakan untuk penyediaan lahan TPS kelurahan agar sampah yang ada dikelurahan kami bisa tampung yang nantinya akan diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai ke TPA.” (Wawancara Lurah Sara’Ea Ibu Ha, Tanggal 13 Februari 2020 di Kantor Lurah Sara’Ea, Kabupaten Buton Utara).

Tahun ini hampir seluruh kelurahan di Kecamatan Kulisusu menyisihkan anggaran untuk pengadaan tong sampah. Dari tujuh kelurahan yang ada di Kecamatan Kulisusu hanya dua Kelurahan yang tidak ada pengadaan tong sampah. Pengadaan tong sampah masing-masing kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.14 Pengadaan tong sampah setiap Kelurahan di Kecamatan Kulisusu tahun anggaran 2020

No.	Kelurahan	Jumlah Pengadaan Tong Sampah
1	Lipu	200 Pasang
2	Bangkudu	100 Pasang
3	Wandaka	100 Pasang
4	Sara’Ea	90 Pasang
5	Lakonea	100 Pasang
6	Lemo	-
7	Bone Lipu	-

Sumber : Hasil wawancara masing-masing Kelurahan, Tahun 2020

Kelompok tim penggerak PKK dilibatkan karena terlibat langsung dalam pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan. Berikut ini hasil wawancara dengan Sekretaris tim penggerak PKK.

“Tahun ini kami akan mengikuti lomba di tingkat provinsi dengan tema sampah. Kami membutuhkan banyak sampah dari botol dan gelas plastik untuk dijadikan busana wanita dewasa dalam acara carnival ditingkat provinsi. Tahun lalu kami kelompok penggerak ibu PKK membuat kerajinan sampah plastik menjadi berbagai macam jenis seperti, tas, tempat tisu, keranjang, bunga dari plastik, bunga dari kulit kerang dan sisik ikan, dan berbagai macam jenis sampah yang bisa digunakan kembali. Hasil kerajinan tersebut bisa kami jual atau untuk dipamerkan pada saat ada kegiatan di dalam maupun di luar kabupaten. Namun sampai saat ini kami masi menggunakan

anggaran sendiri dalam mengadakan pelatihan dan membuat kerajinan tangan tanpa ada kerjasama dengan dinas lain seperti dinas Koperasi UMKM maupun dinas Lingkungan Hidup”. (Wawancara dengan Sekretaris tim penggerak PKK Ibu FW, Tanggal 11 Februari 2020 di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Buton Utara)

Berikut ini gambar tentang pelatihan dan hasil kerajinan tangan yang terbuat dari sampah plastik, kulit kerang, dan sisik ikan



Gambar 5.7 Pelatihan dan hasil kerajinan tangan yang terbuat dari sampah plastik, kulit kerang, dan sisik ikan

Sumber : Dokumentasi Kelompok Penggerak PKK Tahun 2020

Masyarakat berperan sebagai pelaku pengelolaan sampah yang sebenarnya.

Pemerintah daerah diharapkan melibatkan langsung masyarakat dalam memberikan layanan pengelolaan sampah. Pemerintah sebisa mungkin dapat menerima masukan dan saran dari masyarakat dan masyarakat turut dalam mengawasi jalannya pengelolaan sampah karena dampak dari sampah bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai akibat pengelolaan sampah yang buruk dan tidak memenuhi syarat keamanan lingkungan. Dalam *collaborative governance* terdapat beberapa tahapan dalam membentuk suatu kolaborasi sehingga terbentuk komponen yang mempengaruhi jalannya *collaborative governance*. Komponen dari model

collaborative governance terdiri atas dinamika kolaborasi, kegiatan kolaborasi, hasil kolaborasi, dan adaptasi

5.1.2.2 Model Collaborative Governance

5.1.2.2.1 Dinamika Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sampah

5.1.2.2.1.1 Penggerakan Prinsip Bersama (*principle engagement*)

Dinas Lingkungan Hidup sebaiknya bertindak sebagai inisiator mengundang semua *stakeholders* yang teridentifikasi sebagai aktor dalam pengelolaan sampah.

Dalam tahapan ini Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan kegiatan untuk berdialog secara langsung dengan beberapa *stakeholders* yang akan terlibat dalam pengelolaan sampah. Namun dialog yang dilakukan hanya sebatas pertemuan awal tentang kesediaan para aktor yang akan terlibat, belum membahas lebih jauh tentang masalah teknis dalam pengelolaan sampah. Berikut ini kutipan wawancara dengan Kepala UPTD DLH bahwa:

“Kami sudah mengundang semua lurah di Kecamatan Kulisusu, ketua penggerak PKK dan beberapa anggotanya untuk membahas tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Kulisusu. Pertemuan kami ini membahas tentang kesediaan dari pihak lurah dan ibu-ibu PKK bekerjasama dalam pengelolaan sampah. Mereka semua bersedia untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah dan kami akan mengadakan pertemuan selanjutnya guna membahas lebih jauh tentang pengelolaan sampah”. (Wawancara dengan Kepala UPTD Bapak ES, Tanggal 6 Februari 2020 di Kantor UPTD Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara)

Pertemuan selanjutnya diharapkan dapat membahas tentang masalah teknis pengelolaan sampah dan seharusnya dari masing-masing pihak sudah mempersiapkan solusi yang akan ditempuh dalam upaya kolaborasi dalam pengelolaan sampah.

Setelah koordinasi dan dialog tatap muka diawal pertemuan, dialog dan pertemuan antar *stakeholders* selanjutnya bisa dilakukan secara formal maupun informal.

Setiap partisipan mempunyai kewenangan dan kepentingan dalam dialog pertemuan langsung antar *stakeholders* untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka terlibat dalam kolaborasi pengelolaan sampah. Berikut ini akan dijabarkan pemetaan partisipan tentang kewenangan dan kepentingan dalam dialog antar *stakeholders*.

Tabel 5.15 Pemetaan Kewenangan dan Kepentingan Dialog Antar *Stakeholders*

No.	<i>Stakeholders</i> yang terlibat	Kewenangan	Kepentingan
1.	Dinas Lingkungan Hidup	OPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah	Inisiator yang Melakukan koordinasi dan mengakomodir usulan dari semua <i>stakeholders</i>
2.	Dinas Koperasi, UMKM	OPD yang mengadakan pelatihan, pendampingan usaha, pemasaran, dan permodalan	Menyuarakan kebutuhan dan permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat
3.	Pemerintah lokal (Kelurahan/Desa)	Pihak yang membantu pengelolaan sampah dan koordinator langsung ke masyarakat	Menyuarakan kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa/kelurahan
4.	Tim Penggerak PKK	Kelompok yang memberdayakan ibu rumah tangga dalam mengelola dan mengolah sampah rumah tangga	Menyuarakan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat dalam pengelolaan sampah
5.	Masyarakat	Sasaran pemberdayaan dan pelayanan dalam	Menyuarakan kebutuhan dan

		pengelolaan sampah	permasalahan yang dialami oleh masyarakat
6.	DPRD, LSM, Perguruan Tinggi, dan Swasta	Pihak yang Memantau dan mengawasi serta mendukung upaya kolaborasi	Menyuarakan dampak dan manfaat serta , keuntungan/profit yang diperoleh

Sumber : Diolah peneliti, Tahun 2020

Hasil pertemuan dialog secara formal maupun informal selanjutnya dapat dibahas bersama-sama dalam dialog tatap muka antar berbagai *stakeholders* yang akan menjadi visi dan misi dalam membentuk dan melaksanakan kegiatan *collaborative governance*.

5.1.2.2.1.2 Motivasi Bersama (*shared motivation*) Dalam Pengelolaan Sampah

Komponen ini merupakan komponen dalam penyamaan tujuan dan visi bersama melalui pertemuan dan diskusi secara langsung antar partisipan atau *stakeholders*. Dalam proses kolaborasi ada dua komponen penting dalam membangun motivasi bersama yaitu pengembangan kepercayaan dan komitmen dalam proses kolaborasi pengelolaan sampah.

5.1.2.2.1.2.1 Pengembangan Kepercayaan

Dalam proses ini *stakeholders* yang terlibat harus saling membangun kepercayaan dan transparansi terhadap persoalan internal dan eksternal pada setiap *stakeholders* perlu diidentifikasi dan dipaparkan secara jelas. Selain itu kemampuan

dalam sumberdaya yang dimiliki harusnya dipaparkan pada saat awal kolaborasi dalam membangun kepercayaan, agar semua *stakeholders* memahami dan yakin akan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam sebuah wawancara dengan Kepala dinas lingkungan hidup berpendapat bahwa:

“Pengelolaan sampah memang tidak berjalan lancar, tetapi saya cukup antusias kok’ untuk mencoba berkolaborasi dengan dinas yang lainnya. Mengenai permasalahan percaya atau tidak itu tergantung dari pihak mereka tetapi kami tetap optimis dan terus berusaha untuk menjalin kerjasama dan ingin sekali mereka terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Kami juga terus berusaha menghilangkan citra negatif dengan terus berusaha memperbaiki pengelolaan sampah dari semua aspek” (Wawancara dengan Kepala Dinas DLH Bapak AZ, Tanggal 5 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Lurah Bangkudu dalam sebuah wawancara di Kantor Kelurahan Bangkudu:

“Pengelolaan sampah di Kecamatan Kulisusu sangat memprihatinkan, tetapi seandainya Dinas Lingkungan Hidup memberikan tawaran untuk bekerjasama tentunya kami masih percaya dan membuka kesempatan untuk bekerjasama dan yakin bahwa pengelolaan sampah akan berjalan dengan baik. Tentunya DLH sebagai *leading sector* harus transparan terhadap persoalan internal dan eksternal dalam pengelolaan sampah agar kami percaya bekerjasama dengan DLH. Seperti persoalan internal kurangnya sarana dan prasarana serta sumberdaya lain yang dimiliki. Karena selama ini pengelolaan hanya dilakukan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup tanpa melibatkan kami yang terkait dengan pemanfaatan dan pengolahan sampah”. (Wawancara dengan Lurah Bangkudu Bapak Ar, Tanggal 14 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara).

Trust atau kepercayaan merupakan komponen penting dalam melakukan suatu kolaborasi. Apabila kepercayaan dapat dibangun, maka dapat muncul saling pengertian dan kesepahaman antar *stakeholders*. Sehingga kolaborasi yang dilakukan

tidak akan dilandasi perasaan ingin mementingkan organisasi atau kelompoknya sendiri, melainkan untuk tujuan objektif dari kolaborasi yang dilakukan.

5.1.2.2.1.2.2 Komitmen Dalam Proses

Selain membangun kepercayaan, setiap organisasi atau institusi yang terlibat dalam proses kolaborasi haruslah memiliki komitmen yang tinggi terhadap jalannya proses kolaborasi. Para aktor yang terlibat harus mempunyai komitmen yang penuh dan memiliki inisiatif dan kemauan tinggi untuk melaksanakan pengelolaan sampah. Sehubungan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara Lurah Wandaka mempunyai pendapat tentang komitmen yang dilakukan oleh DLH dalam mengelola sampah.

“Saya rasa selama ini Dinas Lingkungan Hidup belum cukup komitmen dalam menjalankan tugasnya, sangat nampak dengan pengelolaan sampah yang belum maksimal. Sampah masih bertebaran dimana-mana dan petugas sampah sering telat dalam mengangkut sampah untuk di bawa ke TPA. Beberapa tahun lalu pengelolaan sampah masih cukup baik walaupun belum memuaskan, tetapi sekarang sangat memprihatinkan dan bertambah parah. Sehingga saya rasa komitmen sejak awal dalam mengelola sampah tidak cukup kuat dan konsisten”. (Wawancara dengan Lurah Wandaka Bapak BA, Tanggal 8 Februari 2020 di Kantor Kelurahan Wandaka)

Berbeda dengan hasil wawancara dengan Kepala DLH yang menyatakan bahwa komitmen dalam pengelolaan sampah tetap dipegang karena pengelolaan sampah adalah tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan.

“Kami dalam menjalankan tugas sudah cukup baik dan tetap komitmen untuk menyelesaikan persoalan sampah. Tetapi masih ada saja kendala dalam

pengelolaan sampah seperti anggaran, sarana dan prasarana, dan keterbatasan lainnya sehingga pengelolaan sampah yang kami lakukan tidak maksimal. Tahun ini dan beberapa tahun terakhir kami maksimalkan segala upaya dengan keterbatasan yang ada tetapi hasilnya tidak memuaskan. Yang kami upayakan untuk tahun depan adalah berusaha untuk bekerjasama dengan pihak lain seperti kelurahan dan masyarakat sehingga pengelolaan sampah yang kami maksimalkan dengan baik. Maka dari itu tahun ini kami membentuk UPTD sebagai perpanjangan tangan untuk bisa memaksimalkan kerjasama kami dengan pihak lain. Itu adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam menyelesaikan persoalan sampah”. (Wawancara dengan Kepala Dinas DLH Bapak AZ, Tanggal 5 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara)

Kolaborasi pengelolaan sampah yang akan dilaksanakan mengharuskan setiap aktor yang terlibat melakukan komitmen untuk terus melaksanakan kolaborasi, karena pengelolaan sampah tidak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, namun juga perlu melibatkan masyarakat dan pihak lain.

5.1.2.2.1.3 Kapasitas Untuk Melakukan Tindakan Bersama (*capacity for joint action*)

Suatu kolaborasi perlu memperhatikan kapasitas yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan kolaborasi yang dilakukan bersama-sama. Kapasitas ini merupakan kombinasi dari 4 aspek yaitu prosedural dan kesepakatan yang dilakukan institusi, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya.

5.1.2.2.1.3.1 Aspek Prosedural Dalam Dinamika Kolaborasi

Aspek prosedural dalam dinamika kolaborasi merupakan komponen, yang merujuk pada aturan-aturan pelaksanaan kolaborasi. Aspek prosedural ini mengacu pada landasan hukum yang menjadi pedoman bagi setiap organisasi atau *stakeholders* yang terlibat. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara dalam praktiknya juga didukung oleh aspek-aspek prosedural baik yang menyangkut aturan skala nasional maupun aturan daerah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris Dinas Lingkungan Hidup bahwa;

“Dalam pengelolaan sampah yang kami lakukan tentu mengacu pada beberapa aturan atau regulasi yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Sebagai contoh undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mengharuskan perlunya pemerintah dan pemerintahan daerah menjamin terselenggarakannya pengelolaan sampah yang baik. Dengan adanya undang-undang tersebut maka setiap kota dan kabupaten diharuskan untuk mengelola sampah dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan”. (Wawancara dengan Sekretaris DLH Bapak MN, Tanggal 4 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara)

Selain itu perlu adanya regulasi tentang retribusi dan aturan yang tegas tentang pelanggaran dan sangksi tentang pengelolaan sampah. Saat ini walaupun Kepala UPTD telah mengadakan pertemuan dengan beberapa Lurah di Kecamatan Kulisusu tetapi belum membahas lebih jauh tentang dan aturan lainnya yang berhubungan dengan kerjasama dalam pengelolaan sampah. Berikut ini kutipan wawancara dengan Kepala UPTD DLH bahwa;

“Kami selaku penyelenggara pengelolaan sampah sudah mengadakan pertemuan dengan semua Lurah yang ada di Kecamatan Kulisusu dan kelompok tim penggerak PKK untuk membahas kerjasama dalam pengelolaan

sampah. Namun pertemuan kami masih sebatas pertemuan awal tentang kesediaan untuk bekerjasama, belum membahas lebih jauh tentang bentuk kegiatan yang akan dilakukan termasuk regulasi yang akan di buat dalam kerjasama pengelolaan sampah”. (Wawancara dengan Kepala UPTD Bapak ES, Tanggal 6 Februari 2020 di Kantor UPTD Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara).

Dengan adanya regulasi khususnya regulasi tentang retribusi dan sangksi yang tegas dalam pengelolaan sampah akan dapat mendukung terlaksananya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan.

5.1.2.2.1.3.2 Aspek Kepemimpinan Dalam Dinamika Kolaborasi

Aspek kepemimpinan dalam proses kolaborasi menunjukkan adanya peran seorang pemimpin dalam beberapa hal dimana mampu menjadi fasilitator dan mediator, mampu merepresentasikan aktor yang terlibat, mampu mendistribusikan pengetahuan kepada anggotanya, mendorong adanya penggunaan teknologi, dan aspek-aspek lainnya. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup sosok seorang pemimpin harusnya sosok yang sangat mendukung secara penuh dan memiliki komitmen tinggi dalam pengelolaan sampah. Berikut ini sosok pemimpin yang harus dimiliki menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup:

“Sosok seorang pemimpin yaitu sosok yang dapat menkoordinasikan dengan baik antara semua *stakeholders*. Mampu bertindak sebagai inisiator dalam berbagai kegiatan dan mampu menghimpun masyarakat untuk mau terlibat dalam pengelolaan sampah dan harus mengetahui perkembangan teknologi. Dalam pengelolaan sampah kami sangat mengakui masih banyak kekurangan, namun sebagai seorang pemimpin saya selalu mengusahkan untuk tidak berlarut-larut dalam kekurangan. Sehingga sekarang ini kami lagi mengusahkan penambahan anggaran dalam perubahan anggaran tahun ini

agar segala persoalan teknis dapat segera diatasi”. (Wawancara dengan Kepala Dinas DLH Bapak AZ, Tanggal 5 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara).

Aspek kepemimpinan selanjutnya dipaparkan oleh Kepala Bidang usaha kecil dan menengah Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Buton Utara. Aspek kepemimpinan dari pihak Dinas Koperasi tersebut dapat merujuk pada hasil wawancara sebagai berikut ini:

“Seorang pemimpin itu harus bertindak cepat, seperti dalam pengelolaan sampah terdapat banyak masalah, harusnya dari Dinas Lingkungan Hidup jangan berdiam diri, kami semua bisa dilibatkan dalam pengelolaan sampah. Tetapi sebagai inisiator harusnya bertindak lebih cepat sehingga kolaborasi akan dilaksanakan secepat mungkin. (Wawancara dengan Kepala bidang usaha kecil dan menengah Bapak La, Tanggal 10 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara).

Berdasarkan pada hasil wawancara yang diperoleh bahwa aspek kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam kolaborasi pengelolaan sampah. Seorang pemimpin harus mempunyai komitmen yang kuat dan mampu menjadi fasilitator dan mediatore yang baik. Selain itu tindakan yang cepat dan tepat harus segera dilakukan dalam mendukung kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara.

5.1.2.2.1.3.3 Aspek Pengetahuan Dalam Dinamika Kolaborasi

Pengetahuan yang dimaksud adalah berupa keterampilan yang dimiliki dan sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi. Pengetahuan menuntut setiap yang terlibat dalam proses kolaborasi menjunjung tinggi profesionalisme dalam berkolaborasi.

Sehingga dalam pengelolaan sampah dituntut adanya sumber daya manusia yang ahli

dibidang pengelolaan sampah. Sesuai dengan penjelasan wawancara Sekretaris DLH sebagai berikut ini:

“Di DLH kami belum memiliki orang-orang yang berkompeten dalam pengelolaan sampah yang mempunyai pengetahuan yang memadai sehingga belum mencukupi dari segi kualitas dan kuantitas. Kami masih kekurangan tenaga ahli khususnya analis dalam pengelolaan sampah dan masih kekurangan beberapa staf dalam subid pengelolaan sampah”. (Wawancara dengan Sekretaris DLH Bapak MN, Tanggal 4 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara).

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat didapat informasi bahwa kapasitas sumberdaya terutama pengetahuan dan kompetensi Dinas Lingkungan Hidup masih sangat minim. Sehingga diperlukan dukungan pengetahuan yang memadai mengingat pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak maksimal. Lebih lanjut, hal lain juga dikemukakan oleh Lurah Lipu dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa:

“Pengetahuan kami tentang pengelolaan sampah masih sangat minim mas, apalagi berkolaborasi dengan pihak lain, ini merupakan hal baru bagi kami. Sebenarnya kami sangat antusias tetapi pengetahuan kami sangat terbatas dan masalah sampah adalah masalah semua warga yang tinggal di Kecamatan Kulisusu sehingga perlu semua lapisan masyarakat mengetahui dan melibatkan mereka dalam pengelolaan sampah. Saya pikir dengan dibekali atau diberikan pengetahuan sejak dini maka masyarakat akan lebih hati-hati dalam membuang sampah”. (Wawancara dengan Lurah Lipu Bapak Ru, Tanggal 21 Februari 2020 di Kantor Kelurahan Lipu, Kabupaten Buton Utara).

Pendapat lainpun disampaikan oleh Kepala Kepala Bidang usaha kecil dan menengah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buton Utara yang menyatakan bahwa dalam setahun mereka selalu mengadakan kegiatan pelatihan dengan melibatkan masyarakat. Namun belum ada kegiatan pelatihan tentang pengolahan

sampah, sehingga perlu adanya pelatihan khusus untuk mengolah sampah menjadi bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Penjelasan ini secara lebih detail dapat merujuk pada wawancara dengan berikut ini:

“Dalam beberapa tahun terakhir kami selalu mengadakan kegiatan untuk memberdayak masyarakat, tetapi untuk pelatihan membuat kerajinan tangan khususnya dari sampah belum kami lakukan. Sehingga perlu pelatihan tentang pemanfaatan sampah untuk dijadikan kerajinan sehingga sampah menjadi sesuatu yang bernilai dan dapat dimanfaatkan kembali kembali oleh masyarakat. Harapan kami kedepan adalah bisa dilibatkan dalam pengelolaan sampah lebih dari sekedar pelatihan yang kami adakan sehingga bisa menambah pengetahuan kami dan masyarakat yang turut dalam pemanfaatan sampah dapat melakukan dan merasakan hasil dari pengelolaan sampah”. (Wawancara dengan Kepala bidang usaha kecil dan menengah Bapak La, Tanggal 10 Februari 2020 di Kantor Dinas Koperasi, UMKM).

Dalam meningkatkan pengetahuan dalam bidang pengelolaan sampah perlu adanya upaya yaitu melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal dapat berupa bimbingan teknis dan study sedangkan informal berupa pelatihan pengelolaan sampah. Hal ini dapat bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi UKM, perguruan tinggi negeri maupun swasta dan koordinasi konsultasi ke pemerintah daerah lain

5.1.2.2.1.3.4 Aspek Sumberdaya Dalam Dinamika Kolaborasi

Suatu kolaborasi perlu memperhatikan kapasitas yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan kolaborasi yang dilakukan bersama-sama. Salah satunya adalah sumberdaya. Sumber daya merupakan komponen yang harus tersedia dengan maksimal dalam proses atau kegiatan kolaborasi. Kapasitas sumberdaya dapat berupa

sumberdaya manusia, sumber daya anggaran, dan fasilitas atau teknologi yang tersedia.

5.1.2.2.1.3.4.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara oleh Dinas Lingkungan Hidup terdapat sumberdaya yang memiliki kemampuan di bidang analisis yang berada dalam struktur organisasi sebagai pegawai struktural dan pelaksanaan teknis operasional dilapangan. Hal tersebut merupakan pembagian tugas dalam sebuah organisasi khususnya pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam kaitannya dengan sumberdaya manusia ini dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara, Bapak MN sebagaimana wawancara berikut ini:

“Kami memiliki sumberdaya manusia yang masih sangat terbatas jumlahnya, baik tenaga struktural maupun tenaga operasional dilapangan. Tenaga struktural kami masih ada bagian yang kosong sehingga perlu penambahan dari segi kuantitas. Dari segi kualitas sebenarnya masi ada beberapa tenaga yang kami butuhkan, kami masih kekurangan tenaga analisis lingkungan hidup khususnya tentang sanitasi dan kebersihan lingkungan”. (Wawancara dengan Sekretaris DLH Bapak MN, Tanggal 4 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara).

Sumber daya manusia memegang peranan penting untuk menentukan keberhasilan yang akan dicapai. Oleh karena itu perlu adanya upaya peningkatan pendidikan bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

5.1.2.2.1.3.4.2 Sumber Daya Anggaran

Aspek anggaran sangat penting dalam mendukung proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Dalam prakteknya anggaran pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sangat sedikit sehingga sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pengelolaan sampah juga sangat terbatas. Sesuai dengan penjelasan wawancara dengan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai berikut ini:

“Anggaran yang dimiliki oleh DLH Kabupaten Buton Utara dalam pengelolaan sampah sangat minim. Anggaran tahun inipun turun dari tahun sebelumnya, kalau diperkirakan hanya untuk memenuhi kegiatan operasional dalam kantor saja. Sehingga kami tidak bisa berbuat banyak tentang teknis pengelolaan sampah. Walaupun demikian kami tetap mengusahakan agar pengelolaan sampah terus dilakukan dengan anggaran yang tersedia”. (Wawancara dengan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Bapak Na, Tanggal 3 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara).

Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh DLH membutuhkan solusi yang tepat guna memenuhi keterbatasan yang dimiliki. Terpenuhi anggaran yang dibutuhkan dapat mendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

5.1.2.2.1.3.4.3 Fasilitas Atau Teknologi Yang Tersedia

Sumber daya fasilitas merupakan sarana, alat, ataupun teknologi yang mendukung proses kolaborasi. Fasilitas yang ada pada DLH sangat minim, seperti sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pengelolaan sampah. Sarana dan prasarana dapat berupa penggunaan fasilitas teknologi kegiatan administrasi perkantoran dan kegiatan operasional pengelolaan sampah. Berikut ini hasil wawancara dengan kepala

bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang menyatakan bahwa;

“Penggunaan teknologi kegiatan administrasi perkantoran seperti komputer/laptop di DLH sudah tepenuhi tetapi, jaringan *wifi* belum tersedia sehingga dalam kegiatan administrasi perkantoran sehungan dengan penggunaan jaringan internet masih menggunakan *smartphone* masing-masing pegawai yang ada. Kebutuhan alat angkut dump truck masih sangat terbatas dan rusak begitupu teknologi yang digunakan masih sangat minim, seperti belum adanya alat berat eskapator dan bulldoser di lahan sekitar TPA menambah beban dalam pengelolaan sampah ditempat pembuangan akhir”. (Wawancara dengan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Bapak Na, Tanggal 3 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara).

Ketersediaan fasilitas dan teknologi sangat mendukung dalam upaya pengelolaan sampah sampai pada kegiatan pengolahan sampah menjadi barang yang berguna bagi masyarakat. Mengolah sampah diperkotaan menjadi tantangan bagi pemerintah kota. Untuk itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna pengolahan sampah.

5.1.2.2.2 Kegiatan Kolaborasi Pengelolaan Sampah

Salah satu yang harus dilakukan dalam kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara saat ini adalah menjadikan masyarakat Kabupaten Buton Utara sebagai masyarakat yang bersikap dan berperilaku positif terhadap sampah. Maka untuk dapat mencapai hal tersebut melalui sebuah proses yaitu diadakan sosialisasi dan pelatihan pengolahan sampah dengan sistem daur ulang sampah dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan *stakeholders* lainnya

5.1.2.2.2.1 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah

Kegiatan sosialisasi dapat berupa menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Kegiatan sosialisasi dapat berupa bakti sosial bersama-sama seluruh *stakeholders* bekerja bergotong-royong membersihkan tempat-tempat umum.

Kegiatan bakti sosial ini beberapa kali pernah dilakukan oleh DLH dalam kegiatan membersihkan tempat wisata di Kecamatan Kulisusu. Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris DLH Kabupaten Buton Utara;

“Beberapa bulan yang lalu kami pernah mengadakan kegiatan kerja bakti membersihkan beberapa tempat wisata. Namun kegiatan ini bukan merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan. Kegiatan ini kami lakukan setiap hari jum’at pagi dengan tema jum’at bersih yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan contoh kepada masyarakat tentang pentingnya membersihkan lingkungan agar terlihat bersih dan rapi. Kegiatan ini kami lakukan bersama dengan beberapa organisasi perangkat daerah seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan beberapa Dinas lain yang ikut tergabung dalam kegiatan Jum’at bersih. Kegiatan jum’at bersih ini hanya berlangsung sekitar satu bulan dan belum ada kelanjutan kegiatan serupa hingga saat ini karena keterbatasan anggaran yang ada. Untuk kegiatan menyapaikan pesan tentang pengelolaan sampah melalui media cetak maupun elektronik belum sama sekali kami lakukan, tetapi itu menjadi salah satu pilihan yang baik untuk kami melakukan sosialisasi pengelolaan sampah kedepannya”. (Wawancara dengan Sekretaris DLH Bapak MN, Tanggal 4 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara).

Kegiatan lain yang bisa diadakan adalah dengan mengadakan kegiatan tahunan seperti festival dan karnaval dengan tema sampah. Kegiatan ini juga sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menerapkan hidup bersih

dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan dan alam sekitar.

Kegiatan karnaval pernah dilakukan oleh kelompok tim penggerak PKK dengan mengikuti lomba karnaval peragaan busana yang terbuat dari sampah. Berikut ini penuturan dari sekretaris tim penggerak PKK;

“Bulan depan kami akan mengikuti festival kegiatan karnaval dengan peragaan busana yang terbuat dari sampah. Sampah yang kami gunakan adalah sampah dari bekas botol plastik air mineral yang kami desain menjadi busana wanita ukuran dewasa. Festival akan dilaksanakan di tingkat provinsi dan yang menjadi pemenang akan dilanjutkan pada tingkat pusat. Kegiatan ini akan menjadi kegiatan rutin setiap tahun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah”. (Wawancara dengan Sekretaris tim penggerak PKK Ibu FW, Tanggal 11 Februari 2020 di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Buton Utara)

Kegiatan lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan pendidikan masyarakat tentang pengelolaan sampah sejak usia dini. Misalnya sosialisasi bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memberikan pemahaman kepada anak usia dini tentang pentingnya dan manfaat dari kebersihan lingkungan. Sosialisasi seperti ini pernah dilakukan oleh DLH pada tahun 2019 yang dilakukan di SMPN I Kulisusu dengan melibatkan murid dan guru.

“Tahun lalu kami mengadakan sosialisasi untuk mengenalkan jenis-jenis sampah dan bagaimana pengelolaan sampah yang baik agar sampah dapat dibedakan dan dimanfaatkan. Kami sadar bahwa sangat penting untuk memberikan edukasi diberbagai kalangan masyarakat dengan sosialisasi di berbagai tempat seperti di sekolah bahkan pada tingkat taman kanak-kanak, dengan mengadakan pertemuan atau seminar dalam rangka mengedukasi masyarakat luas. Tahun lalu kami hanya bisa mengadakan kegiatan sekali saja pada murid dan guru di SMPN I Kulisusu. Dan peserta yang ikut cukup banyak dan anutisias dengan banyak pertanyaan yang diajukan oleh murid dan guru. Tahun ini kami tidak melaksanakan kegiatan yang sama karena kurangnya anggaran pada DLH”. (Wawancara dengan Kepala UPTD DLH

Bapak ES, Tanggal 6 Februari 2020 di Kantor UPTD Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara).

Dalam kegiatan sosialisasi selain ajakan untuk peduli kebersihan lingkungan, yang tak kalah penting yaitu bagaimana menggiring opini masyarakat bahwa sampah juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hasil sisa buangan rumah tangga sampah organik maupun non organik bisa bermanfaat dengan menerapkan konsep 3-

R. Kegiatan tersebut bisa dilakukan dimasing-masing desa/kelurahan di setiap lingkungan yang ada di kecamatan Kulisusu.

5.1.2.2.2 Kegiatan Pelatihan dan Daur Ulang Sampah

Kegiatan pelatihan ini dapat berupa mengolah sampah menjadi kerajinan tangan atau bentuk lain yang mempunyai nilai ekonomis. Kegiatan pelatihan pernah dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM, berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

“Dinas Koperasi UMKM dalam dua tahun terakhir selalu mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan *virgin coconut oil* atau minyak vco, olahan rumput laut, keranjang dari rotan dan tempat tisu dari sisa kayu dan plastik. Tahun ini kami mempunyai anggaran dan berencana untuk membuat kerajinan tangan dari sampah plastik menjadi keranjang, vas bunga, bunga plastik dan lain-lain. Tahun lalu peserta dalam kegiatan pelatihan dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing kelurahan agar peserta bisa dipantau, diawasi, dan dibina dengan baik. Pada waktu itu kegiatan pelatihan kami mengundang tenaga ahli sebagai narasumber yang berkompeten dibidangnya. Sehingga selain dinas Koperasi, UMKM juga ada keterlibatan dari pihak akademisi dan orang-orang yang berpengalaman dalam bidang kerajinan tangan sebagai instruktur dalam pelatihan. Saat ini ada beberapa kelompok pengrajin yang sudah terbentuk tetapi kami belum melakukan pendataan

berapa kelompok pengrajin yang aktif dan yang tidak aktif, sehingga tidak mengetahui kemajuan setelah adanya pelatihan”. (Wawancara dengan Kepala bidang usaha kecil dan menengah Bapak La, Tanggal 10 Februari 2020 di Kantor Dinas Koperasi, UMKM, Kabupaten Buton Utara).

Sementara itu kegiatan pelatihan yang diadakan oleh tim penggerak PKK juga memanfaatkan sampah untuk dijadikan kerajinan tangan seperti membuat bunga dari sisik, kulit kerang, bunga dari plastik makanan ringan, pakain busana wanita dari botol dan gelas plastik dalam mengikuti lomba karnaval tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil wawancara dengan sekretaris tim penggerak PKK sebagai berikut;

“Tahun lalu kami mengadakan pelatihan bersama kelompok PKK disetiap kelurahan di Kabupaten Buton Utara. Pelatihan yang kami adakan adalah membuat bunga dari sisik ikan dan kulit kerang, bunga dari plastik makanan ringan, dan botol minuman air mineral. Tahun ini kami tidak melakukan pelatihan yang sama seperti tahun lalu, karena tahun ini kami menganggarkan untuk membuat pakain busana wanita dari botol dan gelas plastik untuk mengikuti lomba karnaval tingkat provinsi Sulawesi Tenggara”. (Wawancara dengan Sekretaris tim penggerak PKK Ibu FW, Tanggal 11 Februari 2020 di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Buton Utara)

Kegiatan pelatihan dapat memberikan manfaat yang banyak, membentuk kreativitas dan dapat menambah kesejahteraan masyarakat dari hasil penjualan kerajinan yang dilakukan. Seperti hasil wawancara dengan seorang pengrajin di Desa

Kadacua yang mengikuti pelatihan yang diadakan di Dinas Koperasi UMKM

“Saya adalah seorang ibu rumah tangga pernah mengikuti pelatihan tahun lalu yang diadakan oleh Dinas Koperasi UMKM. Pada saat itu kami membuat minyak vco, olahan rumput laut, dan tempat tisu. Saya sangat tertarik dengan adanya pelatihan tersebut sehingga tahun lalu, beberapa kali setelah pelatihan saya dan teman-teman saya yang ikut pelatihan selalu membuat kerajinan yang serupa di rumah. Hasilnya kami bawa kerumah masing-masing, ada beberapa yang saya jual tetapi sangat sedikit dan sisanya kalau tidak laku saya pakai sendiri di rumah. Untuk tahun ini saya dan teman-teman saya tidak aktif lagi membuat kerajinan tempat tisu dan olahan rumput laut, kalau pun saya

membuatnya hanya untuk mengisi waktu saja untuk keperluan pribadi. Adapun kelompok pengrajin yang dibentuk pada saat pelatihan tidak berjalan dengan baik karena tidak ada yang koordinator baik dari kelompok pengrajin maupun dari Dinas Koperasi UMKM”. (Wawancara dengan Ibu Na, Tanggal 11 Februari 2020 di Desa Kadacua, Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)

Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan Dinas Koperasi UMKM dan tim penggerak PKK bertindak sebagai pendamping, menyiapkan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, permodalan, sampai pada pemasaran hasil produk pelatihan yang telah dilakukan. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut;

“Dinas Koperasi UMKM pada bidang usaha kecil dan menengah mempunyai tugas untuk mendampingi peserta pelatihan, menyiapkan anggaran pelatihan, menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan, permodalan, sampai pada pemasaran hasil produk. Kegiatan pelatihan yang telah kami lakukan belum sampai ke tahap pemasaran dalam skala luas, hanya sebatas memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Beberapa kali hasil kegiatan pelatihan dipajang diberbagai pameran ditingkat kabupaten maupun provinsi, beberapa produk yang dihasilkan telah terjual dan sisanya disimpan sebagai pajangan di kantor sebagai bukti bahwa kami telah melakukan kegiatan pelatihan. Tahun ini kami berencana melakukan pendataan untuk mengaktifkan kembali kelompok pengrajin yang telah dibentuk. Rencana kedepannya bukan hanya sekedar melakukan pelatihan tetapi, untuk memberdayakan masyarakat sehingga bisa menghasilkan dan memasarkan produk kerajinan dari pelatihan. (Wawancara dengan Kepala bidang usaha kecil dan menengah Bapak La, Tanggal 10 Februari 2020 di Kantor Dinas Koperasi, UMKM, Kabupaten Buton Utara).

Upaya lain yang harus dikembangkan dalam kegiatan pelatihan adalah membuat daur ulang sampah bukan hanya menjadi kerajinan tangan tetapi juga pelatihan untuk membuat pupuk kompos dan biogas dari sampah organik. Sehingga pemanfaatan sampah bukan hanya dari sampah anorganik saja tetapi juga dari sampah

organik. Salah seorang masyarakat di Kelurahan lipu telah memproduksi pupuk kompos dari sampah organik yang memanfaatkan kotoran hewan, dan sampah dedaunan;

“Saya sudah dua tahun membuat pupuk kompos dari kotoran hewan, sampah dedaunan, dan sisa sayuran yang rusak tidak terpakai lagi. Hasil yang saya dapatkan lumayan bisa mencukupi untuk keperluan jajan keluarga saya. Saya sekarang mempunyai dua orang karyawan sejak tahun lalu, sampai sekarang kami masih produksi dan pesanan selalu ada setiap minggu”. (Wawancara Bapak Naim, Tanggal 9 Februari 2020 di Kelurahan Lipu).

Pelatihan pengelolaan dan daur ulang sampah yang akan diselenggarakan merupakan upaya *capacity building* atau pengembangan kapasitas kemampuan dan pengetahuan yang berdampak langsung kepada masyarakat berupa kesejahteraan masyarakat.

5.1.2.2.3 Hasil Kolaborasi Pengelolaan Sampah

Kegiatan kolaborasi yang akan dilakukan akan berimplikasi pada suatu hasil yang akan diperoleh. Hasil merupakan *outcome* dari *output* yang merupakan kegiatan-kegiatan kolaborasi yang akan dilaksanakan. Hasil kolaborasi pengelolaan sampah dapat berupa perubahan kualitas dan kuantitas dalam aspek ekonomi, lingkungan hidup, sosial masyarakat dan politik.

5.1.2.2.3.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu hasil dalam proses kolaborasi dapat berupa meningkatnya kesejahteraan yang berdampak pada sektor ekonomi masyarakat. Dengan adanya

recycle atau daur ulang yang dilakukan oleh kelompok masyarakat maka sampah dapat memiliki nilai guna yang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

Kegiatan daur ulang dapat menghasilkan kerajinan tangan atau produk lain yang bernilai ekonomis. Hasil kerajinan tangan dapat dijual sendiri maupun secara kelompok secara langsung atau melalui kegiatan pameran yang dipajang di stand pameran oleh Dinas Koperasi, UMKM ketika ada even dari dalam daerah maupun di luar daerah.

Dalam kegiatan pelatihan Dinas Koperasi UMKM dan tim penggerak PKK Kabupaten Buton Utara bekerjasama dengan masyarakat dalam inovasi produk dan pemasaran produk yang dihasilkan. Kerajinan tangan yang dihasilkan dipasarkan dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan tentunya tidak pula merugikan produsen baik secara individu maupun kelompok. Keuntungan yang diperoleh berupa tambahan pendapatan secara ekonomi yang dapat menopang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.1.2.2.3.2 Perubahan Kondisi Sosial Masyarakat

Hasil pengelolaan sampah yang diadakan melalui kegiatan pelatihan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang akan berubah kearah yang lebih baik. Kegiatan pelatihan yang diadakan merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah.

Hal ini karena pengelolaan sampah, khususnya dalam konteks daur ulang memang membutuhkan kemampuan keterampilan dan pengetahuan khusus.

Kemampuan dan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah sangatlah penting terutama menyangkut kegiatan daur ulang sampah, baik itu daur ulang berupa produk-produk kerajinan tangan ataupun kompos. Dengan kemampuan dan pengetahuan yang memadai maka pengelolaan sampah akan terus berjalan dengan baik karena masyarakat mempunyai ketrampilan dan kemampuan untuk menghasilkan dan percaya diri untuk bekerja mendapatkan hasil dari pengelolaan sampah. Lebih dari itu semua pola pikir tentang pengelolaan sampah yang baik akan tertanam dalam diri masing-masing individu sebagai imbas dari hasil pengelolaan sampah yang baik.

5.1.2.2.3.3 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Kebersihan

Lingkungan

Manfaat sampah bisa dimulai dari perubahan pola pikir dari masyarakat untuk memahami sampah dengan bijak, mulai dari pemahaman yang kecil sampai pada manfaat pengelolaan sampah. Pemahaman tentang sampah yang dimulai dari hal yang kecil seperti menanamkan pola hidup tentang kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, bisa membedakan sampah organik dan anorganik, serta menanamkan cinta terhadap lingkungan sejak usia dini. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan pendidikan masyarakat tentang pengelolaan sampah sejak usia dini. Melalui pelatihan dan bimbingan secara intens terhadap masyarakat diharapkan dapat membawa perubahan positif kepada masyarakat terutama pola pikir tentang kebersihan lingkungan.

Dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan maka diharapkan pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak terutama masyarakat sebagai salah satu penyumbang sampah yang besar. Sampah yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan harus dapat dikelola sehingga merubah *image* negatif tentang sampah menjadi positif karena dapat diolah melalui beberapa produk yang memiliki nilai guna ekonomis tertentu. Sampah merupakan masalah serius yang yang perlu dikelola dengan baik sehingga mewujudkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Sehingga dengan adanya kolaborasi dapat memberikan contoh yang baik kepada seluruh masyarakat betapa pentingnya kebersihan lingkungan baik untuk individu maupun kelompok masyarakat.

5.1.2.2.3.4 Membangun Legitimasi Politik Masyarakat Terhadap Pemerintah

Selain kesejahteraan dan lingkungan sosial masyarakat hasil lain juga berdampak dalam aspek politik. Begitupun dalam konteks pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buton Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki hasil dalam aspek politik. Keberhasilan dalam pengelolaan sampah dapat membangun legitimasi politik masyarakat terhadap kepala daerah dan pemerintah. Pengelolaan sampah yang baik akan membangun kepercayaan terhadap masyarakat bahwa pemerintah mempunyai kepedulian untuk memperbaiki pelayanan khususnya dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya keberhasilan yang nampak kepada masyarakat maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

5.1.2.2.4 Adaptasi

Adaptasi merupakan proses evaluasi guna memahami keberhasilan dan kegagalan yang dialami dalam kegiatan pengelolaan sampah untuk meningkatkan prestasi dan memperbaiki kekurangan dalam pengelolaan sampah. Seperti kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang belum maksimal, kegiatan daur ulang sampah yang diadakan oleh Dinas Koperasi UMKM, kelompok penggerak PKK dan masyarakat perlu terus dievaluasi secara menyeluruh sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang baik. Dalam tahapan ini perlu adanya dialog secara langsung maupun tidak langsung untuk mengevaluasi kegiatan pengelolaan sampah seperti perencanaan pengelolaan sampah kearah yang lebih baik lagi. Adaptasi dapat diharapkan menjadi masukan penting untuk jalannya praktik pengelolaan sampah kedepannya sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dimasa yang akan datang.

5.1.3 Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Sampah di Kabupaten Buton Utara

5.1.3.1 Faktor Penghambat

Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara Terdapat Faktor Penghambat dan Pendukung Adapun faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah adalah;

5.1.3.1.1 Aspek Teknis Operasional

Kendala utama dalam operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara adalah terletak pada tingkat dan daerah pelayanan serta timbunan sampah dan pewadahan. Pewadahan merupakan salah satu permasalahan dalam teknis operasional dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Pewadahan sampah masih menggunakan pola individual yang disediakan oleh masyarakat, untuk pola komunal hanya tersedia untuk wilayah komersil. Namun tidak semua wilayah komersil seperti toko dan lainnya mendapatkan pewadahan, hanya pasar mina-minanga yang berada di kelurahan lakonea yang mempunyai TPS. Karena banyak TPS yang taersedai telah dirusak oleh masyarakat sendiri.

Tempat pembuangan sampah yang seharusnya menjadi sangat sulit untuk ditemukan, masyarakat kebingungan dimana harus membuang sampah terutama yang dihasilkan dari sampah rumah tangga. Wawancara dengan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai berikut:

“Fokus kami daerah pelayanan masih sebatas untuk sampah di sekitar pasar, karena untuk melayani ditempat lain masih sangat terbatas dari sarana dan prasarana yang kami miliki. Kami akui bahwa pewadahan sampah masih sangat berkurang untuk melayani masyarakat. Karena belum memadainya pewadahan dan pelayanan sampah maka masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Selama ini masyarakat membuang sampah dekat rumah mereka, seperti lahan kosong, tepi jalan, dibakar, dan ditimbun. Kalau masyarakat yang tinggal didekat pasar masih ada TPS yang digunakan untuk tempat membuang sampah. Selebihnya dibuang kelaut karena masyarakat kecamatan kulisusu pada umumnya bertempat tinggal di dekat pantai. Kami juga tidak bisa berbuat lebih karena kerbatasan sumberdaya, sarana dan prasarana yang kami miliki. (Wawancara dengan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan Bapak Na, Tanggal 3 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara)

Banyaknya timbunan sampah yang berada di TPS maupun sampah yang berada di lingkungan masyarakat tidak terangkut menjadi masalah dalam pengelolaan sampah. Sebagaimana yang diungkapkan dalam hasil wawancara diatas karena kurangnya sarana dan prasarana serta sumberdaya yang dimiliki. Sehingga pengelolaan sampah mengalami hambatan mulai dari pengangkutan sampai pada pengelolaan sampah di TPA. Pengelolaan di TPA masih menggunakan sistim open dumping karena TPA di Kabupaten Buton Utara masih sebatas penyediaan lahan belum ada pengelolaan dengan system *controlled landfill*. Selain itu belum adanya TPA yang definitif membuat TPA sementara menjadi kendala dalam teknis operasional ini. Hasil observasi dari penulis, keberadaan TPA juga sangat dekat dengan pemukiman warga sehingga akan mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga setempat.

5.1.3.1.2 Aspek Kelembagaan dan Organisasi

Saat ini instansi pengelolaan kebersihan berada pada Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari beberapa bidang pelayanan. Selain itu dalam perda Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) pembentukan Dinas Lingkungan Hidup belum menyebutkan tugas pokok dan fungsi dinas dalam pengelolaan sampah sehingga pengelolaan sampah seakan terabaikan. Dalam upaya peningkatan kelembagaan dengan sumberdaya yang terbatas maka perlu adanya peningkatan status dan

kapasitas lembaga pengelolaan kebersihan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup bahwa:

“Jadi gini mas, dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara kami menghadapi beberapa masalah, salah satunya yaitu masalah kelembagaan. Kami agak susah dalam pelaksanaan kelembagaan karena saat ini pengelolaan sampah berada pada Dinas Lingkungan Hidup yang menaungi beberapa bidang. Sangat tidak leluasa dalam pengelolaan sumberdaya yang sangat terbatas karena semenjak bergabungnya Dinas Kebersihan dengan Dinas Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah hanya menjadi bagian kecil dalam struktur organisasi. Selain itu kualitas SDM lembaga pengelola kebersihan yang kami miliki saat ini sangat minim”. (Wawancara dengan Sekretaris DLH Bapak MN, Tanggal 4 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara)

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan sampah yang saat ini dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup perlu adanya upaya yang dapat mengatasi masalah kelembagaan yang ada dengan keterlibatan lembaga formal maupun non formal untuk meningkatkan peran kelembagaan yang merupakan kebutuhan dari masyarakat. Saat ini peningkatan kinerja lembaga pengelola persampahan sangat dibutuhkan dengan kebutuhan SDM yang memadai dan perlu pemisahan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai regulator dan operator.

5.1.3.1.3 Aspek Peraturan Hukum

Aspek pengaturan memegang peranan penting dalam pengelolaan sampah untuk mengatur jalannya proses pengelolaan sampah yang baik dan teratur sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan kerjasama yang baik dengan berbagai *stakeholders* dalam menangani persoalan sampah.

Peraturan daerah ketentuan penanganan persampahan dan peraturan daerah retribusi

belum ada, masih sebatas diusulkan namun belum terealisasi sampai saat ini. Sesuai dengan penjelasan wawancara dari Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai berikut ini:

“Saat ini belum ada aturan yang jelas tentang sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat dan aturan tentang penarikan retribusi persampahan. Seharusnya saat ini sangat dibutuhkan aturan untuk mengatasi berbagai masalah tentang perlunya pengelolaan sampah dan membentuk masyarakat sadar dan peka terhadap aturan/hukum”. (Wawancara dengan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Bapak Na, Tanggal 3 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara)

Perlu ada penataan kembali perangkat hukum dan peraturan disesuaikan dengan rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan embangun tatanan hukum di masyarakat bersamaan dengan pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat

5.1.3.1.4 Aspek Pembiayaan

Penyebab lemahnya sistem pengelolaan sampah antara lain karena minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan kebersihan kota. Harus segera disadari Kabupaten Buton Utara adalah wilayah yang akan berkembang dan memerlukan biaya pembangunan yang cukup tinggi. Pembiayaan berasal dari dana anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) maupun retribusi dari pelayanan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah. Pembiayaan pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara berasal dari APBD dengan menggunakan pos pasal pengelolaan sampah. Namun anggaran yang disediakan sangat terbatas jumlahnya. Sementara itu retribusi

kebersihan dari masyarakat yang diharapkan menjadi sebagian besar sumber pembiayaan pengelolaan ternyata belum ada. Sesuai hasil wawancara dengan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan:

“Permasalahan yang kami rasakan yang berkaitan dengan aspek pembiayaan adalah adanya keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan baik untuk investasi maupun biaya operasi dan pemeliharaan. Sementara itu penarikan iuran sulit dilakukan mas karena belum ada peraturan daerah yang berkaitan dengan besaran retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Ada lagi mas, misalnya kalau ada kerusakan mobil atau kendaraan operasional pengangkut sampah sangat sulit untuk diperbaiki karen anggaran yang sangat minim dengan biaya kerusakan sangat tidak sepadan”. (Wawancara dengan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Bapak Na, Tanggal 3 Februari 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara)

Kurang siapnya sistem penarikan retribusi termasuk kesiapan aparat pelaksana dalam memberikan pelayanan yang memadai adalah hal yang harus dipikirkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya penarikan teribusi. Keinginan besar pengelola sampah dalam menggunakan APBD tidak bisa diharapkan, karena sistem kelembagaan yang ada sekarang ini tidak cukup mendukung dalam aspek pembiayaan pengelolaan sampah.

5.1.3.1.5 Aspek Peran Serta Masyarakat.

Penyebab lain kurangnya pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara adalah karena kurangnya partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat yang sangat rendah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara;

“Dalam pengelolaan sampah kami sudah cukup maksimal dengan segala keterbatasan yang ada. Akan tetapi masalah lain yang timbul dilapangan adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat. Partisipasi masyarakat masih rendah seperti kesadaran akan pentingnya penggunaan kembali barang yang telah dipakai, daur ulang, dan pemilahan sampah dari tingkat sumber sampah. Masyarakat menganggap sampah sebagai sisa buangan yang tidak berguna lagi sehingga perlakuan terhadap sampah dikumpul, diangkut dan dibuang begitu saja disembatang tempat”. (Wawancara dengan Kepala UPTD DLH Bapak ES, Tanggal 6 Februari 2020 di Kantor UPTD Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Buton Utara).

Penuturan yang berbeda disampaikan oleh warga kelurahan lemo yang mengatakan bahwa;

“kami sebagai masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan, memang betul bahwa sebagian masyarakat tidak peduli dengan keberadaan sampah yang sangat mengganggu tetapi tidak semua seperti itu. Masih banyak kok masyarakat di kelurahan lemo yang peduli dengan kebersihan dan tidak suka dengan bau yang tidak sedap disekitar rumah warga. Menurut saya ini sangat penting dari DLH untuk meningkatkan kapasitas armada dan alat angkut supaya sampah tidak menumpuk setiap hari seperti ini. Atau kalau DLH tidak mampu sebaiknya ada kerjasama yang intens antara DLH dengan aparat kelurahan yang melibatkan warga kelurahan lemo untuk membersihkan lingkungan sekitar. Menurut saya DLH harus melibatkan masyarakat Kelurahan lemo dengan memberikan himbauan dan kerja bersama-sama dalam membersihkan sampah setiap hari” (Wawancara dengan ibu Ev, Tanggal 7 Februari 2020 di Kelurahan Lemo, Kabupaten Buton Utara).

Peran aktif masyarakat sangat diharapkan untuk itu masyarakat bukan lagi hanya sebagai obyek tetapi lebih sebagai mitra yang mengandung makna keselarasan.

Tanpa ada peran aktif masyarakat akan sangat sulit mewujudkan kondisi kebersihan yang memadai. Masyarakat perlu terus dilibatkan dan berperan aktif dalam memberikan input, saran dan monitoring dalam pengelolaan sampah.

5.1.3.2 Faktor Pendukung Pengelolaan Sampah

Adapun beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara dapat diketahui dari beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan peluang yang ada di masyarakat dalam pengelolaan sampah. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup antara lain adalah pemerintah Kabupaten Buton Utara telah menyediakan lahan rencana TPA seluas 10 Ha di Kecamatan Kulisusu. Komitmen pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara dalam pengelolaan sampah dapat terlihat seperti keberadaan lahan TPA seluas 10 Ha. Peluang yang ada di masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung untuk terlaksananya pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Peluang tersebut antara lain peluang ekonomi dengan sistem daur ulang sampah untuk kerajinan tangan, pemanfaatan sampah untuk pupuk kompos. Peluang penerapan tenaga kerja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja, dan peluang adanya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dan membayar retribusi dalam pengelolaan sampah sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari sampah. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan penduduk Kelurahan Lipu yang memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos bahwa:

“Kami sebagai masyarakat sangat ingin mendapatkan pelayanan yang baik agar lingkungan menjadi bersih, tidak seperti sekarang ini banyak sampah yang bertebaran dimana-mana bau, kotor, dan pencemaran dimana-mana sehingga merusak keindahan dalam kota. Saya senang untuk dilibatkan dalam pengelolaan sampah dan setuju untuk membayar retribusi sesuai yang ditentukan oleh pemerintah asalkan kami mendapatkan pelayanan yang baik. Saya sebagai masyarakat sangat sadar bahwa sampah itu harus dikelola dengan baik, makanya saya mengolah sampah menjadi pupuk kompos dengan

karyawan sebanyak 2 orang saja”. (Wawancara Bapak Naim, Tanggal 9 Februari 2020 di Kelurahan Lipu).

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah seorang masyarakat di Kelurahan Lakonea bapak Al, bahwa sangat antusias jika pemerintah melibatkan masyarakat secara langsung dengan pemberdayaan masyarakat untuk peluang ekonomi dan kesejahteraan dalam pengelolaan sampah

“Saya sangat antusias jika pemerintah melibatkan saya dan masyarakat lain dalam daur ulang sampah menjadi pupuk, kerajinan, dan bentuk lainnya yang dapat menghasilkan uang. Selain itu saya percaya bahwa dengan adanya daur ulang yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat akan sadar betapa pentingnya membersihkan lingkungan yang dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan bernilai ekonomis” (Wawancara Bapak Al, Tanggal 9 Februari 2020 di Kelurahan Lakonea).

Dengan adanya peluang tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat memkasimalkan potensi yang ada untuk meminimalisir segala hambatan dan kekurangan yang ada saat ini. Peluang yang ada pada masyarakat berpotensi untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah dan melibatkan seluruh masyarakat dan *stakeholders* lainnya untuk berkolaborasi dalam pengelolaan sampah

5.2 Pembahasan

5.2.1 Pengelolaan Sampah di Kabupaten Buton Utara

5.2.1.1 Pola Penanganan Sampah dan Cakupan Wilayah

Perkembangan jumlah populasi manusia menuntut adanya perubahan jumlah konsumsi dan gaya hidup yang diiringi dengan bertambahnya jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. Banyaknya sampah yang dihasilkan disebabkan oleh beberapa

faktor yang perlu diamati dan membutuhkan penanganan yang cukup serius. Dalam menangani suatu persoalan yang pertama harus mengetahui sumber permasalahan itu berasal dan diperlukan kerjasama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Usaha kerjasama tersebut dikenal dengan istilah administrasi, seperti yang dikatakan Siagian (2002: 2) administrasi adalah, keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Masalah sampah bersumber dari hasil sisa buangan masyarakat yang tidak digunakan lagi, sehingga persoalan sampah merupakan persoalan yang menyangkut banyak orang atau *public*.

Dalam usaha menyelesaikan persoalan publik beberapa pendekatan yang selalu digunakan oleh pelayan publik. Pendekatan *Old Public Administration* menekankan pada nilai-nilai utama dari administrasi publik yaitu efisiensi dan rasionalitas dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik (Thoha, 2008: 73-74). Pengelolaan persampahan di Kabupaten Buton Utara masih mengalami banyak persoalan sehingga hasil kinerja pemerintah tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara dengan leading sector DLH mempunyai dua fungsi yaitu sebagai regulator dan operator, sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik. Selain itu penyelenggaraan pelayanan masih sangat berpusat pada pemerintah belum melibatkan masyarakat maupun pihak swasta sebagai eksekutor dan pengawasan dalam menjaga lingkungan yang bersih dan bebas sampah. Sangat nampak bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH masih sangat fokus pada pengelolaan sektor publik dengan

paradigma lama yaitu *Old Public Administration* yang terkesan kaku dan sangat hirarki dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan sampah.

Untuk mengatasi persoalan dalam pelayanan publik selain *Old Public Administration* beberapa konsep muncul dalam pengelolaan sektor publik seperti *New Public Management* (NPM) dan juga *New Public Service* (NPS) yang terus dikaji dari waktu-kewaktu. Dengan adanya beberapa konsep dalam pengelolaan sektor publik diharapkan dapat menambah wawasan dalam menjalankan pengelolaan sektor publik kearah yang lebih baik.

Salah satu yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah dengan menerapkan konsep pelayanan yang maksimal sesuai kepada masyarakat dan melibatkan langsung masyarakat dalam pengelolaan sampah dan *stakeholders* lain guna mengatasi masalah yang dihadapi. Kegiatan sistem operasional dan pengolahan sampah akan dapat terwujud jika peran serta masyarakat terus berkembang didalam kehidupan masyarakat. Dimana masyarakat adalah faktor penyebab penghasil sampah dan tujuan utama dalam pengelolaan sampah. untuk itu bagi pemerintah daerah dan seluruh *stakeholders* yang terlibat selalu melakukan pengawasan didalam masyarakat dan memberlakukan aturan sanksi pelanggaran, dan retribusi pengelolaan sampah.

Ditinjau dari teknik pengelolaan sampah DLH masih menggunakan paradigma lama yaitu pola kumpul, angkut, buang yang mengakibatkan semakin bertambahnya volume sampah di TPA. Selain itu belum ada upaya pemilahan sampah dari sumbernya sehingga dalam proses pengangkutan sampah masih tercampur dengan berbagai jenis sampah. Tidak bisa dipungkiri bahwa sumber timbulan sampah

terbesar di Kabupaten Buton Utara Khususnya di Kecamatan Kulisusu berasal dari sampah rumah tangga berupa *sawage* dan *refuse* dari kegiatan rumah tangga sehingga pemilahan sampah sebaiknya dilakukan dari sumbernya pada tingkat terkecil yaitu RT/RW. Setelah itu ke tahap pengangkutan oleh petugas sampah yang didukung dengan sarana pengangkut seperti gerobak sampah dan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah masing-masing lingkungan disetiap kelurahan dengan personil yang memadai. Petugas pengangkut sampah berasal dari masing-masing lingkungan/kelurahan yang ditugaskan untuk menangani sampah sesuai dengan hasil kesepakatan pada semua kalangan masyarakat. Kesepakatan juga termasuk retribusi pengangkutan sampah untuk biaya operasional pengangkutan sampah setiap bulan. Tahapan pengangkutan sampah akan terus berlanjut ke TPSS kelurahan untuk dilakukan pengumpulan dan pemilahan sesuai dengan jenis sampah yang akan diolah. Selanjutnya akan diangkut ke tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) kecamatan untuk dilakukan pengumpulan dan pengolahan sampah.

Selain pemilahan upaya daur ulang sampah penting untuk dilakukan agar tingkat untuk meminimalisir penumpukan sampah di TPA. Untuk itu kegiatan pengelolaan sampah hendaknya dibagi dalam dua bentuk kegiatan yaitu kegiatan pemilahan dan kegiatan daur ulang sampah dengan menerapkan konsep 3-R. Pengolahan sampah yang baik adalah dengan memanfaatkan sampah, mendaur ulang menjadi barang yang mempunyai nilai lebih (Alex, 2012: 40). Dengan adanya daur ulang selain mengurangi beban angkut dan beban di TPA juga dapat bernilai ekonomis yang dapat berguna bagi masyarakat. Sampah yang akan diolah berupa

sampah organik dicacah untuk keperluan pengemposan, makanan ternak, atau untuk dijadikan biogas atau energi listrik. Sementara itu sampah anorganik seperti botol plastik dan kaca, logam, kardus dapat dijual kembali atau dijadikan bahan kerajinan tangan sehingga sangat sedikit sampah yang dibuang ke TPA. Sisa atau residu yang tidak berguna lagi di buang ke TPA untuk dilakukan penimbunan agar tidak mencemari lingkungan setempat. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh jika sampah dapat dikelola yaitu : (1) sampah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan, (2) sampah tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku membuat barang-barang yang jauh lebih bermanfaat, Said (1987: 11).

Cakupan wilayah yang mampu dilayani oleh Dinas Lingkungan Hidup sangat terbatas hanya fokus pada Kecamatan Kulisusu pada beberapa Kelurahan dan Desa saja. Pada umumnya pengelolaan sampah ditinjau dari fungsi perwilayahan masih menggunakan pola individual dan individual langsung. Hal ini mengakibatkan penumpukan sampah di beberapa tempat umum dan jalanan yang dapat menimbulkan pencemaran udara berupa bau yang tidak sedap, dan menurunnya estetika kota. Pemerintah harus melakukan pembenahan dari berbagai aspek guna mengejar ketertinggalan dengan perubahan yang terus berlangsung.

5.2.1.2. Analisis Sumberdaya Pengelolaan sampah Kabupaten Buton Utara

Permasalahan pokok pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara berasal dari sumber timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Pada umumnya sampah yang dihasilkan berasal dari sampah rumah tangga. Sehingga fokus

pemerintah adalah layanan pengelolaan sampah terhadap masyarakat. Namun pemerintah belum menyediakan sepenuhnya kebutuhan warga untuk pengelolaan sampah. Salah satunya adalah pewadahan sampah di masyarakat seperti tong sampah belum ditemukan yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga sebagian besar masyarakat membuang sampahnya dengan cara individual yaitu di bakar, ditimbun, maupun dibuang pada lahan terbuka dan disekitar pantai, hal ini bisa mencemari lingkungan menimbulkan bau yang tidak sedap. Untuk mengatasi hal tersebut harus ada upaya penyediaan pewadahan sampah, karena pengelolaan sampah harus dimulai dari sumber timbunan sampah yaitu dari pemukiman masyarakat. Seperti yang dikemukakan Sejati (2009: 24) pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Persepsi ini menegaskan bahwa untuk dapat mengelola sampah dengan baik harus diatasi dari sejak awal ditimbulkan sampah atau dari sumbernya sebelum diproses lebih lanjut. Penyediaan pewadahan sampah seperti tong sampah perlu diadakan di setiap rumah tangga agar pelayanan sampah dapat dilakukan dengan baik.

Selain itu kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti ketersediaan TPS yang tidak ditemukan lagi. TPS banyak yang dirusak oleh masyarakat karena sampah tidak terangkut yang menyebabkan bau tidak sedap. Pengadaan TPS dilakukan sampai pada tahun 2018 dan sampai saat ini belum ada pengadaan TPS baru. Pengadaan TPS seharusnya ada keterlibatan masyarakat tentang lokasi yang tepat dibangunnya TPS dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama. Permasalahan kebersihan sangat nampak sekali tumpukan sampah yang ada dipasar dan di sekitar

pantai yang dijadikan tempat pembuangan sebagai sasaran sampah dari pemukiman masyarakat karena adanya keterbatasan pewadahan dan TPS yang tersedia. Kondisi ini sangat memperburuk turunya kondisi lingkungan sekitar dan estetika kota nampak semakin buruk.

Solusi jangka panjang harus mengadakan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk pembangunan kembali TPS di tahun yang akan datang. Pembangunan TPS harus sesuai dengan hasil keputusan bersama dan memenuhi kriteria seperti sedekat mungkin dengan sumber sampah, tidak mengganggu, diujung gang kecil, dihalaman depan dan penempatan tidak mengganggu keindahan (estetika). Dengan adanya hasil keputusan bersama diharapkan kedepannya TPS bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga sampah tidak lagi menimbulkan pencemaran bau tidak sedap dan mengganggu ketenangan masyarakat.

Demikian halnya dari Tingkat keterangkutan sampah masih sangat kurang, karena minimnya peralatan teknis seperti kendaraan operasional yang sedikit. Kualitas operasional yang masih rendah terlihat dari tingkat kebersihan di seluruh TPS yang ada masih jauh dari kondisi bersih. Disamping itu tingkat kebersihan di permukiman, sarana kota, badan air dan fasilitas lainnya, menunjukkan rendahnya kualitas pelayanan yang ada. Untuk dapat memenuhi tingkat keterangkutan sampah yaitu dengan menambah kendaraan operasional yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah. Selain itu harus ada upaya daur ulang sampah dengan menerapkan pola penanganan konsep 3-R untuk meminimalisir tingkat keterangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA). Alex (2012: 40)

mengatakan bahwa pengolahan sampah yang baik adalah dengan memanfaatkan sampah, mendaur ulang menjadi barang yang mempunyai nilai lebih. Dengan adanya daur ulang selain mengurangi beban angkut dan beban di TPA juga dapat bernilai ekonomis yang dapat berguna bagi masyarakat.

Sementara itu TPA yang ada belum bisa digunakan, sehingga menumpuk disekitar area TPA dan terus bertambah dari tahun ketahun. Diperlukan penanganan yang cepat untuk menggunakan TPA yang sudah siap pakai sehingga sampah tidak lagi menumpuk disekitar TPA. Apalagi pembuangan di TPA dengan cara open dumping membuat sampah yang ada bisa menggunung dan menimbulkan pencemaran lingkungan dengan bau yang tidak sedap yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit dan dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Gambaran tersebut diatas mencerminkan bahwa sampah belum bisa dikelola dengan baik. sementara itu daya dukung lahan untuk lokasi TPA yang relatif besar maka pengurangan potensi sampah sampai di lokasi TPA tidak terlalu berpengaruh terhadap kebutuhan lahan karena ada gap yang besar antara kebutuhan dengan lahan yang tersedia yakni 10 Ha. Sehingga yang harus diperbaiki adalah bagaimana mengelola sampah sehingga pembuangan akhir di TPA hanya residu sampah yang tidak berguna lagi.

Selain kondisi sarana dan prasaran pengelolaan sampah juga diperburuk dengan keberadaan sumberdaya manusia yang tidak sesuai dengan saranan dan prasarana yang ada. Seperti pengoperasian alat angkut yang ada tidak sesuai dengan jumlah tenaga pengangkut sampah dan jumlah kendaraan yang difungsikan, sehingga

mengakibatkan kelebihan tenaga pengangkut pada kondisi alat angkut yang masih sangat sedikit. Hal tersebut dapat memperburuk kondisi keuangan dimana tenaga kerja memerlukan gaji setiap bulan, yang mengakibatkan sebagian tenaga angkut tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Disisi lain dalam menjalankan tupoksi pengelolaan sampah DLH masih kekurangan pegawai struktural, sehingga masih membutuhkan tenaga kerja ahli dan staf dibidang pengelolaan sampah.

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasaran serta sumberdaya manusia akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Khususnya di Kabupaten Buton Utara Kecamatan Kulisusu masih banyak membutuhkan biaya dalam pengelolaan sampah. Permasalahan biaya merupakan persoalan klasik yang selalu menjadi kendala dalam setiap pengelolaan kegiatan sektor publik. Beberapa alasan utama kurangnya biaya dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya pagu anggaran yang dialokasikan setiap tahun. Biaya pengelolaan sampah setiap tahun turun drastis tidak sesuai dengan perencanaan yang ada untuk memaksimalkan pengelolaan sampah. Apalagi belum ada bantuan dari pihak lain seperti swasta dan belum adanya retribusi pengelolaan sampah. Untuk itu upaya yang harus dilakukan oleh DLH dengan mengoptimalkan kemampuan untuk mendapatkan tambahan anggaran dari luar daerah seperti anggaran dari pusat maupun dari lembaga organisasi lainnya serta mengupayakan adanya retribusi dalam pengelolaan sampah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya struktur organisasi DLH Kabupaten Buton Utara masih nampak cukup hirarki yang sudah menjadi ciri khas sebagian besar pengelolaan sektor publik diberbagai daerah di Indonesia. Selain itu

ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen menunjukkan bahwa perencanaan dan pengawasan belum cukup baik. Unit yang ada hanya pada sebatas seksi penanganan sampah dan limbah B3 sehingga ruang lingkup dalam struktur organisasi terkesan sangat sempit dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sampah. Sehingga DLH perlu meninjau ulang tentang keberadaan fungsi pengelolaan sampah untuk meningkatkan kapasitas secara kelembagaan dengan menjadi dinas tersendiri dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya peningkatan kapasitas secara kelembagaan diharapkan pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan luas dan anggaran dalam pengelolaan sampah akan maksimal yang akan berdampak pada terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Ditinjau dari hubungan organisasi secara internal sudah cukup baik walaupun tidak didukung dengan sumberdaya yang memadai, namun hubungan secara eksternal terkait dengan keterlibatan dinas atau pihak lain belum menunjukkan adanya kerjasama dalam pengelolaan sampah. Seperti yang nampak saat ini Dinas Lingkungan Hidup belum melibatkan pihak manapun dalam mengelola sampah di Kabupaten Buton Utara. Khususnya di Kecamatan Kulisusu. Kodoatie (2003: 217) mengungkapkan sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat dari komponen-komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain serta saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih sehat dan teratur. Hal tersebut mengungkapkan bahwa selain tersedianya sumberdaya, sarana dan prasarana perlu adanya interaksi yang baik secara internal maupun eksternal dalam pengelolaan sampah.

5.2.1.3 Capaian Hasil Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Jumlah Produksi

Sampah dan Sampah Terlayani di Kabupaten Buton utara

Persoalan sampah di Kabupaten Buton Utara khususnya dikecamatan kulisusu adalah tingginya beban pengelolaan yang tidak diimbangi dengan kemampuan teknis operasional dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis kegiatan pengelolaan sampah. Jumlah penduduk dan pola konsumtif memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan volume sampah dari kapasitas penyediaan layanan. Kapasitas sampah yang terangkut masih jauh dari harapan untuk menjadikan lingkungan menjadi bersih dan indah. Sampah yang terangkut tidak sebanding dengan produksi sampah yang sangat banyak setiap tahun. Walaupun belum ada data yang jelas tentang besaran jumlah sampah yang terangkut untuk tahun ini namun produksi sampah dari tahun ketahun semakin bertambah terlihat cukup jelas penumpukan sampah di sekitar pemukiman masyarakat, jalanan, kompleks perkantoran, pasar dan ditempat umum lainnya semakin bertambah. Selain persoalan teknis partisipasi dan kesadaran masyarakat sangat rendah sehingga menambah beban pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Dengan adanya berbagai macam persoalan timbunan sampah yang begitu besar yang meningkat setiap tahun akan mengakibatkan berbagai pencemaran hingga menyebabkan berbagai penyakit dan dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global. Dapat terlihat di lahan kosong, fasilitas umum dan pinggir jalan penumpukan sampah mengakibatkan munculnya masalah lingkungan fisik seperti bau tidak sedap, menurunnya estetika pemandangan kota.

Dari berbagai uraian diatas dapat diketahui selain pertumbuhan penduduk ada berbagai macam faktor penyebab meningkatnya volume sampah di Kabupaten Buton Utara. Meningkatnya volume sampah tidak diimbangi dengan kapasitas penyediaan layanan sarana dan pasaran yang ada, sumberdaya yang sangat kurang, serta masalah internal dan eksternal organisasi dalam pengelolaan sampah. Nampak jelas bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara masih menggunakan paradigma lama kumpul angkut buang, dan belum ada keterlibatan masyarakat serta pengelolaan dengan konsep 3-R. Pemerintah dan masyarakat belum memandang sampah sebagai suatu sumberdaya yang dapat memiliki nilai ekonomis yang dapat mengatasi masalah sampah itu sendiri serta dapat menyerap tenaga kerja yang dapat mengatasi masalah sosial dan kelestarian lingkungan. Seperti yang dikatakan Said (1987: 10) bahwa masalah penanganan sampah ternyata tidak mudah, melibatkan banyak pihak, memerlukan teknologi, memerlukan dana yang cukup besar dan memerlukan keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Dengan adanya berbagai keterbatasan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara dibutuhkan suatu konsep yang jelas dan terobosan serta paradigma baru dalam pengelolaan sampah dengan menerapkan konsep pengelolaan 3-R dan teknis pengelolaan sampah yang melibatkan langsung dan membedakan masyarakat serta upaya peningkatan kapasitas sumberdaya dalam pengelolaan sampah.

5.2.2. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perspektif *Collaborative Governance*

5.2.2.1 Identifikasi *Stakeholders* yang Terlibat Dalam Pengelolaan Sampah

Konsep lain yang banyak dibahas dalam ilmu administrasi publik adalah *New Public Management* dalam pengelolaan sektor publik. NPM dikritik oleh Denhardt dan Denhardt sebagai paradigma yang melupakan siapa sebenarnya pemilik kapal sehingga konsep ini menganggap masyarakat adalah *customer* bukan sebagai warga negara yang memiliki nilai dan kepentingan penuh untuk dilayani. Pola pendekatan dalam pelayanan publik yang menjadikan masyarakat sebagai tujuan utama pelayanan adalah konsep *New Public Service*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Denhardt (2003: 15) bahwa administrasi publik dalam *New Public Service* harus memenuhi kriteria yakni melayani warga masyarakat, bukan pelanggan, Mengutamakan kepentingan publik, lebih menghargai kewarganegaraan daripada kewirausahaan, berpikir strategis dan bertindak demokratis, menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah, lebih menitikberatkan pada pelayanan daripada mengendalikan, Menghargai publik bukan dari produktivitas semata.

Perspektif *New Public Service* (NPS) melihat dari sudut pandang atas warga negara dan posisinya sangat penting bagi pemerintahan demokratis dan warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan yang terlibat dalam berbagai tindakan secara bersama-sama untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Masyarakat mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat atau dikenal dengan istilah *Governance*. *Governance* hanya akan terwujud jika muncul kolaborasi, kemitraan, dan jejaring antar elemen-elemen *governance*, yaitu negara, sektor swasta dan masyarakat sipil. Salah satu bentuk

konsep penyelenggaraan *governance* disebut konsep *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. *Collaborative governance* muncul di era paradigma *governance* dimana masyarakat pada saat itu semakin berkembang sehingga pemerintah memiliki masalah yang lebih kompleks. Disisi lain pemerintah memiliki banyak keterbatasan sehingga membutuhkan kolaborasi dengan aktor lain. Margerum dalam Nabatchi dan Emerson (2015: 16) mendefinisikan kolaborasi sebagai sebuah pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks oleh beragam *stakeholders* yang otonom dengan musyawarah untuk menghasilkan suatu konsensus dan mengembangkan *network* atau jejaring.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara yang tidak efektif dengan segala keterbatasan yang ada perlu mempelajari dan memahami kekurangan yang dimiliki untuk menjadikan pengelolaan sampah yang maju dan bebas sampah. Untuk memenuhi segala keterbatasan yang ada harus dilakukan kerjasama dengan pihak lain dan meninggalkan konsep paradigma lama dalam pengelolaan sampah yang digunakan selama ini. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya, maupun jaringan, yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan (Purwanti, 2016: 174).

Sebelum membahas lebih jauh tentang kerjasama kolaboratif ada baiknya untuk memahami dan mengidentifikasi *stakeholders* yang akan terlibat dalam

pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Upaya keterlibatan pihak lain dalam upaya penerapan konsep *collaborative governance* di Kabupaten Buton Utara harus diamati terlebih dahulu. Secara umum pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah adalah terdiri dari stakeholder internal dan eksternal. *Stakeholders* internal yaitu unit pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan pelayanan publik mulai dari kepala daerah, organisasi perangkat daerah, dan unit pelaksana. *Stakeholders* eksternal terdiri dari kelompok sasaran yaitu masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan publik, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, media massa dan swasta.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut dalam usaha pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara tidak semua *stakeholders* terlibat langsung berkolaborasi dalam pengelolaan sampah. Ada yang berpengaruh tetapi tidak terkait secara langsung dalam kolaborasi pengelolaan sampah, dan disesuaikan dengan kondisi existing kemajuan Kabupaten Buton Utara saat ini. Adapun *stakeholders* yang terlibat langsung dalam kolaborasi pengelolaan sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan sampah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah ditingkat kelurahan/desa sebagai mitra dalam pelaksana kegiatan, tim penggerak PKK, dan masyarakat yang ada di seluruh Kecamatan Kulisusu di tingkat kelurahan dan desa sebagai sasaran atau target utama pelayanan pengelolaan sampah.

Keterlibatan berbagai *stakeholders* dalam konsep *collaborative governance* karena masing-masing *stakeholders* mempunyai kemampuan dan sumberdaya yang

dimiliki untuk saling mendukung satu sama lain, dan mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana mengelola sampah dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara untuk mempunyai andil yang cukup besar, namun dengan berbagai keterbatasan yang ada harus melibatkan aktor lain dalam pengelolaan sampah.

Keterlibatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) karena terkait dengan kegiatan pelatihan, pendampingan usaha, permodalan, dan juga pemasaran hasil usaha dari hasil kegiatan pelatihan yang dilakukan. Dengan melibatkan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) diharapkan dapat diajak bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan yang berkualitas dan mempunyai nilai ekonomis. Sementara itu Pemerintah lokal Kelurahan, desa berperan sebagai mitra pemerintah daerah yang dapat membantu pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah dalam kegiatan pengurangan sampah, daur ulang, maupun sebagai pelaksana pengelola sampah.

Kelompok penggerak PKK dilibatkan karena terlibat langsung dalam pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan yang dapat bekerjasama dengan Dinas Koperasi UKM. Sementara itu masyarakat berperan sebagai pelaku pengelolaan sampah yang sebenarnya. Masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah yaitu ibu rumah tangga serta para pemuda kreatif yang berkecimpun dalam kegiatan usaha yang berpotensi memproduksi sampah setiap hari.

Dalam mewujudkan usaha kolaborasi pengelolaan sampah semua *stakeholders* dilibatkan walaupun tidak secara langsung. Seperti keterlibatan

pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang berperan dalam koordinasi dan regulasi tingkat lokal, pemerintah provinsi terkait koordinasi dan regulasi tingkat provinsi, pemerintah pusat terkait dengan upaya koordinasi dan regulasi tingkat nasional, dan pemerintah daerah lain terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam pengelolaan sampah. Lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, DPRD, media, dan swasta juga turut dilibatkan dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah. Keterlibatan mereka dalam rangka fungsi pengawasan, meningkatkan riset dan teknologi, upaya meningkatkan kontrol regulasi dan penganggaran, serta sebagai mitra dalam sosialisasi dan menambah keuntungan dalam mengembangkan terwujudnya pengelolaan sampah.

Dengan adanya keterlibatan berbagai *stakeholders* diharapkan sampah dapat dikelola dengan baik, lingkungan menjadi bersih, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu DLH harus terus berupaya untuk menjalin kerjasama yang baik dengan beberapa *stakeholders* yang bisa dilibatkan dalam pengelolaan sampah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DLH saat ini adalah dengan membuat lembaga pengelola sampah dalam bentuk UPTD kebersihan yang sangat membantu dalam pengelolaan sampah Dinas lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan oleh UPTD kebersihan adalah mengajak peran serta *stakeholders* dalam pengelolaan sampah. Walaupun saat ini belum banyak yang dilakukan oleh UPTD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya namun diharapkan usaha harus terus dilakukan guna menjalin kerjasama dalam mewujudkan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah.

Tujuan diadakan kolaborasi karena adanya tujuan yang tidak tercapai sehingga dibutuhkan peran *stakeholders* untuk melakukan suatu perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuan tersebut tidak akan tercapai kalau tidak tercipta dinamika interaksi antar *stakeholders*. Menurut Emerson dan Nabatchi (2015: 27) Komponen dari model *collaborative governance* terdiri atas dinamika kolaborasi, kegiatan kolaborasi, hasil kolaborasi, dan adaptasi. Keseluruhan aspek tersebut saling mempengaruhi kinerja dari kolaborasi yang dilaksanakan oleh para aktor atau *stakeholder* yang terlibat.

5.2.2.2 Komponen Model *Collaborative Governance*

Model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007: 8) terdiri dari empat variabel utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaboratif. Tahapan pada proses kolaboratif meliputi dialog *face-to-face*, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, memahami bersama dan hasil sementara. Dalam proses kolaborasi berlangsung satu siklus dengan hasil sementara yang terjadi selama proses kolaborasi sebelum hasil akhir dari kolaborasi. Sementara menurut Emerson dan Nabatchi (2015: 27) Komponen dari model *collaborative governance* terdiri atas dinamika kolaborasi, kegiatan kolaborasi, hasil kolaborasi, dan adaptasi. Perbedaan yang menonjol terletak pada dinamika kolaborasi yaitu dinamika dalam proses kolaborasi sebagai siklus yang dinamis dan terus berlanjut dalam proses kolaborasi yang digambarkan terpisah dengan kegiatan kolaborasi

hingga memperoleh hasil dari kolaborasi, tetapi masih satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam konteks pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara dari perspektif *collaborative governance* pengelolaan sampah seharusnya berlangsung dari adanya keinginan yang kuat dari Dinas Lingkungan Hidup yang dapat mendorong terlaksananya kolaborasi pengelolaan sampah karena pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik. Menurut Emerson dan Nabatchi (2015: 43-44) Ada empat hal penting yang mendorong (*drivers*) inisiasi *Collaborative Governance Regime* (CGR) dimana tanpanya seruan untuk berkolaborasi kemungkinan tidak akan diindahkan dan tata kelola kolaboratif tidak akan terungkap: (1) ketidakpastian (*Uncertainty*), (2) saling ketergantungan (*Interdependence*), (3) insentif konsekuensial (*Consequential Incentives*), dan (4) memulai kepemimpinan (*Initiating Leadership*). Ketidak pastian dalam menyelesaikan persoalan sampah memunculkan ide atau gagasan baru dalam menyelesaikannya. Beberapa alasan karena kurangnya sarana dan prasarana dan sumberdaya yang dimiliki oleh DLH yang berdampak pada teknis pengelolaan sampah yang tidak maksimal sehingga program dan kegiatan pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik. Saat ini belum ada kepastian dalam penambahan sumberdaya maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan kolaborasi.

Adanya keterbatasan *stakeholders* dalam pengelolaan sampah menimbulkan adanya saling ketergantungan seperti seperti DLH membutuhkan dukungan sumberdaya anggaran, tetapi dalam kegiatan sosialisasi dan daur ulang sampah masih kelompok penggerak PKK dan Dinas Koperasi UMKM masih membutuhkan

membutuhkan kehadiran *stakeholders* lain yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya kolaborasi akan ada peluang keberhasilan dengan saling mendukung kekurangan masing-masing yang akan mengatasi krisis yang terjadi dalam pengelolaan sampah. Yang paling terakhir adalah memulai kepemimpinan yang akan mendorong pembentukan CGR yang mengacu pada tindakan seseorang untuk memulai diskusi awal tentang upaya kolaborasi. Kepemimpinan merupakan pendorong terakhir dan paling penting untuk pembentukan CGR. Dalam CGR terdapat *initiating leadership* atau memulai kepemimpinan yang merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya kolaborasi. Seseorang yang menjadi pimpinan harus bisa memahami dengan baik ketiga faktor pendorong CGR sebelumnya, selain itu harus bisa memotivasi peserta yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan sampah. Pada dasarnya dalam teori Emerson dan Nabatchi (2015: 17) bahwa *collaborative governance* tidak menekankan pada pemerintah sebagai inisiator khususnya dalam kegiatan pengelolaan sampah, tetapi dengan adanya inisiatif dari DLH untuk bekerjasama dengan beberapa *stakeholders* lain akan mendorong terlaksananya proses kolaborasi. Inisiatif dari DLH ini akan memulai CGR yang akan mendorong terlaksananya proses kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam model *collaborative governance* menurut Emerson dan Nabatchi (2015: 27) yang terdiri atas dinamika kolaborasi, kegiatan kolaborasi, hasil kolaborasi, dan adaptasi.

5.2.2.2.1 Dinamika Kolaborasi

Dinamika dalam kolaborasi menjadi komponen sentral dalam proses kolaborasi. Dalam dinamika kolaborasi Emerson dan Nabatchi fokus pada tiga komponen interaksi. Komponen tersebut adalah; penggerakan prinsip bersama (*Principle engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*), dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*). Penggerakan prinsip bersama terkait dengan dialog dan pertemuan antar *stakeholder* merupakan awal dalam proses kolaborasi. Dialog dan bertatap muka langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang, kendala, dan keuntungan bersama. Seperti yang dikatakan Emerson dan Nabatchi (2015: 59), bahwa proses ini memungkinkan orang-orang dengan tujuan-tujuan substantif, relasional, dan identitas yang berbeda untuk berkolaborasi lintas batas-batas institusional, yurisdiksi, atau sektoral mereka untuk memecahkan masalah, menyelesaikan konflik, atau menciptakan nilai bersama.

Dinas Lingkungan Hidup sebaiknya bertindak sebagai inisiator mengundang semua *stakeholder* yang teridentifikasi sebagai aktor dalam pengelolaan sampah. Namun Emerson dan Nabatchi (2015: 17) mengemukakan bahwa *collaborative governance* tidak menekankan pada pemerintah sebagai inisiator. Ide dan atau gagasan bisa saja datang dari masyarakat atau dari pihak manapun sehingga inisiator bisa saja berasal dari luar pemerintah. Dalam tahapan ini Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan kegiatan untuk berdialog secara langsung dengan beberapa *stakeholders* yang akan terlibat dalam kolaborasi pengelolaan sampah. Dialog dan

pertemuan dilakukan dalam upaya mengajak dinas lain dan masyarakat untuk kesediaan dalam pengelolaan sampah.

Setelah koordinasi dan dialog tatap muka diawal pertemuan, dialog dan pertemuan antar *stakeholder* selanjutnya bisa dilakukan secara formal maupun informal. Dalam hal ini peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai inisiator tidak harus mengadakan pertemuan secara formal dan dialog bisa kapan saja terjadi dengan berbagai *stakeholder* lainnya guna membahas langkah kedepan yang harus dilakukan untuk mengatasi pengelolaan sampah. Dialog dalam pertemuan dilakukan untuk mengetahui kewenangan, kepentingan, dan motivasi masing-masing *stakeholders* sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki dalam pengelolaan sampah.

Selain itu dalam pertemuan harus ada pembagian tupoksi yang jelas serta mengemukakan persoalan, konflik yang dihadapi semua *stakeholders* yang terlibat guna mencari solusi secara bersama-sama. Dengan adanya dialog tatap muka diawal pertemuan diharapkan akan ditemukan cara pengelolaan sampah yang baik saling menguntungkan terutama untuk kesejahteraan dan kebersihan lingkungan masyarakat, sehingga visi, misi bersama akan dapat dicapai. Dalam kegiatan pertemuan dialog secara langsung perlu melibatkan *stakeholders* lain, seperti DPRD, LSM, perguruan tinggi, media dan swasta. Dengan kehadiran dan dialog bersama diharapkan akan mendapatkan dukungan dalam hal regulasi dan penganggaran, pengawasan, pengetahuan, serta diharapakan dukungan anggaran dari swasta dalam pengelolaan sampah.

Selain dialog dan tatap muka langsung perlu adanya motivasi bersama (*shared motivation*). Dalam proses ini *stakeholder* yang terlibat harus saling membangun kepercayaan sehingga akan terbentuk situasi dimana adanya saling kesepahaman antar *stakeholder*. Emerson dan Nabatchi (2015: 66) mengatakan bahwa *stakeholder* yang terlibat harus saling membangun kepercayaan, saling pengertian dan pemahaman satu dengan yang lain, dan komitmen bersama. Tanpa ada kepercayaan di awal, maka kolaborasi tidak akan terwujud sehingga kolaborasi tidak akan berjalan dengan optimal. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan di Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan informasi bahwa masih tetap antusias dan percaya dengan adanya kerjasama dengan pihak lain maka pengelolaan sampah akan berjalan dengan baik. Sebaliknya pihak yang diajak kerjasama dalam pengelolaan sampah beberapa lurah mengatakan bahwa walaupun pengelolaan sampah masih kurang tetapi kalau diajak bekerjasama akan ikut serta dan aktif dalam pengelolaan sampah.

Dalam upaya kolaborasi pengelolaan sampah transparansi terhadap persoalan internal dan eksternal pada setiap *stakeholder* perlu diidentifikasi dan dipaparkan secara jelas, guna membangun kepercayaan dalam melangsungkan kegiatan kolaborasi. Penting untuk mengemukakan sumberdaya dan kemampuan yang pada saat awal kolaborasi dalam membangun kepercayaan, agar semua *stakeholder* memahami dan yakin akan kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga diketahui apakah bisa mendukung atau menghambat jalannya kolaborasi yang akan dilakukan.

Setiap *stakeholders* yang terlibat perlu memiliki komitmen yang tinggi dalam pengelolaan sampah. Komitmen menunjukkan upaya kuat pelaksanaan kolaborasi dari semua pihak sehingga mampu menghilangkan berbagai hambatan-hambatan yang seringkali muncul. Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai kendala yang ada khususnya menyangkut minimnya sumber daya anggaran tetap terus aktif dan mempunyai komitmen yang kuat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Salah satu bentuk komitmen yang dilakukan adalah dengan membentuk UPTD sebagai perpanjangan tangan untuk bisa memaksimalkan kerjasama dengan pihak lain. Beberapa pihak meragukan kinerja Dinas Lingkungan Hidup selama ini. Salah seorang Lurah meragukan komitmen yang dikukuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yang terlihat tidak maksimal dan mengalami kemunduran dari tahun ketahun.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus terus berupaya untuk mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi dan komitmen yang tinggi untuk mengajak pihak lain bekerjasama dalam pengelolaan sampah. Bentuk lain perwujudan dari komitmen DLH yaitu fokus terhadap tupoksi dan meningkatkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki untuk tetap menjadikan masyarakat sebagai tujuan pelayanan dalam pengelolaan sampah. Komitmen menunjukkan upaya kuat pelaksanaan kolaborasi dari semua pihak sehingga mampu menghilangkan berbagai hambatan-hambatan yang seringkali muncul sehingga timbul rasa percaya satu sama lain.

Dalam dinamika kolaborasi perlu memperhatikan kapasitas yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan kolaborasi yang dilakukan bersama-sama. Kapasitas ini merupakan kombinasi dari empat aspek yaitu aspek prosedural, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumberdaya. Dilihat dari aspek prosedural dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara yang dilaksanakan oleh DLH memiliki beberapa regulasi mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Regulasi tersebut merupakan regulasi yang saat ini mendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Buton utara dari aturan nasional tentang pengelolaan sampah sampai pada tahap penyelenggara pengelolaan sampah di daerah.

Saat ini yang perlu diperhatikan terkait dengan regulasi pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara adalah aturan tentang retribusi dan aturan yang tegas tentang pelanggaran dan sanksi tentang pengelolaan sampah. Selama ini belum ada regulasi dan ketetapan tentang sanksi dan tarif tertribusi pengelolaan sampah. Retribusi sangat penting untuk dapat menunjang aspek keuangan yang sangat kurang pada saat ini. Sanksi dan aturan yang tegas tentang pelanggaran pengelolaan sampah juga dapat membuat efek jera terhadap pelanggar sehingga sampah dapat dikelola dengan baik. Dalam proses pembuatan aturan tersebut tentunya melalui kesepakatan yang dibuat bersama antara DLH sebagai perwakilan dari pemerintah dan masyarakat sebagai sasaran dalam pelayanan dan aktor utama dalam pengelolaan sampah.

Dalam upaya pengelolaan sampah berkolaborasi dengan berbagai *stakeholders* diperlukan adanya aturan yang menjadi acuan dalam menjalankan kolaborasi pengelolaan sampah. Selain dari peraturan yang telah disebutkan diatas

juga diperlukan SK untuk melegalkan kegiatan kolaborasi pengelolaan sampah yang dapat menunjang jalannya kolaborasi agar terarah dan tertata dengan baik. Selain itu aturan tersebut tidak lain adalah menyangkut urgensi tentang pengelolaan sampah yang perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga melibatkan berbagai *stakeholders*. Diharapkan keberadaan regulasi dapat menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah dengan berkolaborasi dengan pihak lain dan memberikan motivasi bagi semua *stakeholder* yang terlibat untuk semakin komitmen dalam pengelolaan sampah. Kolaborasi yang akan diadakan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara memiliki beberapa regulasi mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan SK. Aturan tersebut menjadi dasar dalam melaksanakan pengelolaan sampah sehingga dukungan untuk melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya bisa terlaksana dengan baik.

Selain aspek prosedural pelaksanaan kolaborasi sangat dipengaruhi sosok pemimpin yang tepat dan kompeten. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah secara teknis yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup masih banyak kendala yang dihadapi, sehingga perlu upaya ide atau gagasan yang besar dan tindakan yang cepat dan tepat dari seorang pemimpin untuk mengatasi masalah yang ada. Aspek kepemimpinan dalam proses kolaborasi menunjukkan adanya peran seorang pemimpin dalam beberapa hal dimana mampu menjadi fasilitator dan mediator, mampu merepresentasikan aktor yang terlibat, mampu mendistribusikan pengetahuan kepada anggotanya, mendorong adanya penggunaan teknologi, dan aspek-aspek lainnya. Konsep kepemimpinan seperti ini telah banyak diketahui oleh banyak orang

termasuk pihak pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi dalam pelaksanaannya masih membutuhkan kerja keras dan hasil yang berguna untuk masyarakat.

Aspek pengetahuan berupa keterampilan yang dimiliki dan sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi. Terkait dengan pengelolaan sampah dituntut adanya sumber daya manusia yang ahli untuk menunjang kegiatan terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah. Kapasitas sumberdaya terutama pengetahuan dan kompetensi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah saat ini masih sangat minim. Begitu juga dengan masyarakat masih sangat kurang kesadaran dan pengetahuan tentang ketrampilan dalam pengelolaan sampah. Sehingga masyarakat perlu mendapatkan bimbingan dan ketrampilan tentang mafaat yang diperoleh dari sampah. Disisi lain DLH belum mampu memberikan bimbingan yang baik kepada masyarakat sehingga perlu adanya kerjasama atau kolaborasi dengan dinas lain.

Salah satu paya yang dilakukan adalah melalui kegiatan Dinas Koperasi UKM yang dapat memberikan pelatihan untuk memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat, untuk menambah wawasan kepada masyarakat bahwa sampah dapat dijadikan kerajinan tangan. Namun selain dari itu diberikan pengetahuan bagaimana menjaga agar sampah yang terbungkalai dapat dimanfaatkan dan dikeolola dengan baik sehingga tidak lagi mencemari lingkungan. Dalam upaya kolaborasi kapasitas untuk melakukan tindakan bersama dalam pengelolaan sampah adalah adanya sumberdaya yang dimiliki. Kapasitas sumberdaya dapat berupa sumber daya anggaran, sumberdaya manusia, dan fasilitas atau teknologi yang tersedia. Sumber

daya manusia menyangkut pelaksana teknis kegiatan atau pegawai yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Pada dasarnya kebutuhan sumberdaya manusia masih menjadi persoalan di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas lainnya baik dari segi kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan sampah. Begitupun di dalam masyarakat sendiri masih sangat nampak kesadaran dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah. Terpenuhinya sumberdaya manusia dari segi kualitas dan kuantitas sangat penting untuk mewujudkan terlaksananya pengelolaan sampah yang baik.

Sumber daya anggaran berupa penganggaran atau aspek finansial yang dibutuhkan untuk membiayai proses atau kegiatan kolaborasi. Dalam prakteknya anggaran pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sangat minim sehingga sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pengelolaan sampah juga sangat terbatas. Walaupun minimnya anggaran adalah menjadi persoalan klasik dalam pengelolaan sektor publik tetapi hal tersebut tidak menjadi kendala utama untuk tetap berusaha dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Dengan adanya kerjasama yang nyata dan komitmen untuk menjalankan kegiatan kolaborasi diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari masalah keterbatasan anggaran yang ada. Untuk itu penting juga aturan tentang penarikan retribusi dalam pengelolaan sampah karena hasil dari penarikan retribusi juga digunakan untuk kegiatan operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara.

Selain sumberdaya manusia dan anggaran perlu adanya fasilitas atau teknologi yang mendukung pengelolaan sampah. Fasilitas atau teknologi yang digunakan dapat berupa sarana dan prasarana pendukung seperti teknologi komputer, jaringan,

yang digunakan dalam kegiatan administrasi perkantoran dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan operasional teknis dilapangan dalam pengelolaan sampah.

Penggunaan teknologi sarana dan prasarana administrasi perkantoran seperti penggunaan jaringan *wifi* belum tersedia. Selain itu sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah banyak yang rusak dan perlu penambahan dan perbaikan beberapa unit untuk operasional dilapangan. Beberapa alat yang perlu diadakan oleh DLH dalam pengelolaan sampah yang menyangkut sarana dan prasarana operasional pengelolaan sampah adalah pengadaan eskapator dan bulldoser, serta penggunaan teknologi alat daur ulang sampah plastik dan komposter juga perlu diadakan guna mendukung pengelolaan sampah secara maksimal. Mengolah sampah diperkotaan menjadi tantangan bagi pemerintah kota. Untuk itu perlu adanya kerjasama dengan menggunakan teknologi tepat guna pengolahan sampah. Keberadaan masing-masing sumberdaya saling memengaruhi dan saling menunjang satu sama lain sehingga ketersediaan sumberdaya diharapkan dapat mendukung jalannya pengelolaan sampah dengan baik. Diharapkan dengan adanya kolaborasi yang akan diadakan kebutuhan sumberdaya manusia, anggaran, dan teknologi, bukan menjadi kendala utama dalam melaksanakan pengelolaan sampah.

5.2.2.2.2 Kegiatan Kolaborasi Pengelolaan Sampah

Kegiatan kolaborasi menurut Emerson dan Nabatchi (2015: 83) dapat dilakukan dari beberapa kegiatan yang tergantung pada konteks tertentu. Kegiatan kolaborasi dapat berupa pembuatan perencanaan strategis, menetapkan suatu

kebijakan, penyusunan sumberdaya khususnya mengenai kebutuhan sumber daya anggaran dan fasilitas, pelaksanaan kebijakan atau program dan proses monitoring.

Untuk itu perlu adanya upaya pengelolaan sampah yang yang tepat mulai dari perencanaan sampai pada monitoring evaluasi kegiatan. Masyarakat Buton Utara di Kecamatan Kulisusu masih sangat sedikit yang memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah. Serta dampak positif akibat pengelolaan sampah yang tepat dan dampak negatif yang dirasakan akibat pengelolaan sampah yang tidak baik dalam jangka waktu yang cukup lama. Kondisi saat ini masyarakat Buton Utara khususnya di Kecamatan Kulisusu membutuhkan pengetahuan dan kesadaran tentang pengelolaan sampah yang tepat untuk dilakukan bersama. Dengan pengetahuan dan kesadaran yang baik masyarakat akan mengetahui apa yang harus dilakukan dalam mengelola sampah. Untuk dapat mencapai hal tersebut melalui sebuah proses yaitu diadakan pelatihan dan sosialisasi pengelolaan sampah dan kegiatan pelaksanaan hasil pelatihan yaitu daur ulang sampah dengan melibatkan berbagai *stakeholders*

Kegiatan sosialisasi berupa bakti sosial dengan secara bersama-sama bekerja bergotong-royong membersihkan tempat-tempat umum. Kegiatan bakti sosial ini pernah dilakukan oleh DLH dalam kegiatan jum'at bersih, tetapi kegiatan ini hanya dilakukan dalam beberapa minggu saja karena keterbatasan anggaran sehingga tidak efektif dan tidak memberikan hasil yang baik pada masyarakat. Sosialisasi pengelolaan sampah juga bisa berupa edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya, penggunaan plastik yang tidak berlebihan, dan penggunaan kemasan yang ramah lingkungan. Dalam kegiatan edukasi pengelolaan

sampah dapat dilakukan diberbagai tempat, dan berbagai kalangan. Seperti melakukan sosialisasi dan seminar dengan mengedukasi anak sekolah mulai dari tingkat dasar sampai pada perguruan tinggi. Kegiatan sosialisasi ini juga pernah dilakukan oleh DLH pada tahun 2019 di SMPN I Kulisusu dengan memberikan edukasi kepada murid tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Edukasi ini sangat penting untuk dilakukan setiap tahun yang juga bisa dilakukan pada masyarakat ditingkat kelurahan dan desa untuk mengelola sampah dari sumbernya, seperti memilah sampah organik dan anorganik serta manfaat dan kerugian yang akan diperoleh dalam pengelolaan sampah. Karena keterbatasan anggaran maka kegiatan yang serupa tidak bisa lagi dilakukan tahun ini.

Kegiatan lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan tahunan melalui festival kegiatan karnaval yang bertema lingkungan khususnya tentang sampah untuk menghimpun masyarakat banyak dan memberikan pesan yang baik pentingnya menjaga lingkungan dengan mengelola sampah dengan baik. Dalam melaksanakan kegiatan ini bisa mengajak tim penggerak PKK untuk mengikuti festival tahunan. Karena tim penggerak PKK mempunyai anggaran yang disediakan untuk mengikuti festival di tingkat Provinsi maupun Nasional. Upaya yang dilakukan kedepanya adalah dengan mengadakan kegiatan serupa ditingkat Kabupaten dengan menggandeng dari pihak swasta untuk sponsor dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat serta media massa dalam mendukung terlaksananya kegiatan festival dan karnaval. Sehubungan dengan kegiatan sosialisasi menggunakan media massa cetak maupun elektronik belum pernah dilakukan oleh DLH.

Media massa cetak maupun elektronik berperan penting untuk menyebarluaskan informasi tentang pemahaman dan peningkatan kesadaran tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan mempunyai nilai terutama bagaimana bersikap terhadap sampah untuk kepentingan lingkungan masyarakat. Sosialisasi yang diadakan bertujuan agar masyarakat dapat menerapkan konsep 3-R dengan mengurangi, dan menggunakan kembali sampah plastik atau kemasan yang telah digunakan. Serta penting untuk menyampaikan tentang pengolahan sampah yang dapat didaur ulang yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas lingkungan masyarakat. Inti pesan diadakan kegiatan sosialisai adalah bagaimana menggiring opini masyarakat bahwa sampah juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hasil sisa buangan rumah tangga sampah organik maupun non organik bisa bermanfaat dengan menerapkan konsep 3-R.

Saat ini yang perlu dilakukan adalah perencanaan yang baik dan konsisten dalam melakukan suatu kegiatan. Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan perencanaan yang strategis dengana kebijakan yang dapat mendorong terlaksananya pengelolaan sampah yang baik. Beberapa permasalahan pokok kegiatan sosialisasi yang telah di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hudup karena minimnya anggaran yang disediakan, sehingga kegiatan tersebut tidak dilanjutkan lagi. Kekurangan anggaran yang ada pada DLH bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah yang lain dan juga pihak swasta sehingga kegiatan dalam bentuk sosialisasi terus berjalan dimasa yang akan datang. Melihat karakteristik masyarakat yang masih dominan tidak peduli terhadap sampah maka dalam sosialisasi

pengelolaan sampah perlu penyuluhan yang intensif, terpadu dan terus menerus dalam upaya meningkatkan peran sertanya dalam kegiatan 3-R. Keberhasilan penerapan program-program tersebut dapat tercapai tentu melalui koordinasi yang baik dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/ Kelurahan, masyarakat, LSM, media massa, dan swasta.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah perlu adanya tindakan yang nyata untuk memberikan contoh terhadap pengelolaan sampah yang baik. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan pelatihan untuk mengedukasi masyarakat dalam memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran terhadap dampak dan manfaat yang diperoleh dari sampah. Kegiatan pelatihan ini diadakan untuk mengatasi persoalan sampah yang terus menumpuk sehingga dibutuhkan inovasi dengan memanfaatkan sampah menjadi barang yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh Fauziah (2018: 8) dibutuhkan solusi yang inovatif dalam mengurangi volume sampah dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang membutuhkan peran pemerintah, pihak swasta dan aktor utama yaitu masyarakat.

Kegiatan pelatihan yang akan dilakukan dapat bekerjasama antara DLH dengan Dinas Koperasi UMKM atau dengan tim penggerak PKK yang melibatkan langsung masyarakat untuk mengolah sampah menjadi kerajinan tangan. Dinas koperasi UMKM dan tim penggerak PKK mempunyai anggaran untuk pelatihan.

Kegiatan pendampingan dan pengawasan bisa dilakukan bersama-sama antara Dinas Koperasi UMKM dan tim penggerak PKK. Untuk itu sangat penting melibatkan Dinas koperasi UMKM dan tim penggerak PKK dalam kegiatan kolaborasi dalam kegiatan pemanfaatan sampah, sementara itu Dinas Lingkungan Hidup dapat memantau dan ikut berpartisipasi mengikuti jalannya kegiatan pelatihan yang bertindak sebagai pelaksana teknis kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam kegiatan pelatihan ini perlu melibatkan beberapa *stakeholders* lain seperti pihak akademisi sebagai pemateri dalam memberikan bimbingan dan praktek mendaur ulang sampah, bisa juga melibatkan pemerintah pusat dan daerah lain dalam upaya memberikan contoh konkrit tentang keberhasilan daerah lain dalam mengelola sampah dengan baik. Untuk kegiatan jangka panjang perlu memperhatikan pengelolaan kegiatan pelatihan ini agar pelatihan yang diadakan akan terus berlanjut sampai pada pemasaran hasil produk pelatihan yang telah dilakukan.

Setelah diadakan pelatihan peserta dibagi menjadi beberapa kelompok agar peserta bisa dipantau, diawasi, dan dibina dengan baik. Setelah itu dibentuk komunitas pengrajin agar kegiatan pengelolaan sampah dapat terus dilakukan dalam masyarakat. Dalam prakteknya daur ulang sampah dapat diproduksi dalam skala rumah tangga maupun dalam bentuk kelompok dan membentuk koperasi produksi sehingga kedepannya dapat diproduksi barang dalam skala industri. Kegiatan pelatihan ini diharapkan agar pemerintah dapat terus berinovasi dengan memberdayakan masyarakat sehingga ada transfer pengetahuan dan kemampuan perihal pengelolaan sampah. Dengan adanya pengetahuan yang memadai dari

masyarakat maka sampah yang dihasilkan akan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan terus dikembangkan dalam upaya *capacity building* atau pengembangan kapasitas untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Kegiatan selanjutnya diharapkan pelatihan yang diadakan bukan hanya mengolah sampah menjadi kerajinan tangan tetapi juga pelatihan bentuk lain seperti daur ulang sampah menjadi kompos dan biogas yang mempunyai nilai ekonomis.

Kegiatan kolaborasi dapat dilakukan baik dalam kegiatan yang bersifat jangka panjang seperti pelatihan yang diadakan dapat bermanfaat bagi masing-masing individu berupa pengetahuan baru yang dapat dikembangkan untuk membuat usaha sendiri maupun berkelompok dalam masyarakat. Sementara itu kegiatan sosialisasi dapat berupa kegiatan yang bersifat jangka pendek seperti kegiatan gotong-royong membersihkan lingkungan setiap minggu atau kegiatan karnaval dan festival yang bersifat tahunan hanya memberikan manfaat jangka pendek bagi masyarakat, karena hasil yang diperoleh berupa kesan yang dirasakan saat diadakan kegiatan dan pesan yang diperoleh untuk terus menjaga lingkungan tetap bersih.

5.2.2.2.3 Hasil Kolaborasi Pengelolaan Sampah

Usaha yang dilakukan dalam kegiatan kolaborasi diharapkan berjalan dengan maksimal sesuai dengan harapan yang dapat membuahkan hasil untuk kepentingan masyarakat. Keberhasilan dan kepuasan masyarakat merupakan tujuan utama dari pelayanan dan sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Emerson dan Nabatchi (2015: 84) lebih menekankan bahwa hasil suatu

proses kolaborasi dapat berupa adanya perubahan kualitas dan kuantitas barang publik dari segi fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. Hasil kolaborasi dapat memberikan kebermanfaatan bagi *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan sampah.

Hasil yang diperoleh dalam kegiatan kolaborasi pengelolaan sampah dapat meningkatnya kesejahteraan yang berdampak pada sektor ekonomi masyarakat. Dengan adanya penerapan metode pengelolaan sampah dengan daur ulang yang dilakukan oleh kelompok masyarakat maka sampah dapat memiliki nilai guna yang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Kegiatan daur ulang dapat menghasilkan kerajinan tangan atau produk lain berupa kompos. Hasil daur ulang sampah dapat dijual secara langsung atau melalui kegiatan pameran yang dipajang di stand pameran oleh Dinas Koperasi, UMKM ketika ada even dari dalam daerah maupun di luar daerah.

Masyarakat terus bekerjasama dengan Dinas terkait dalam inovasi produk dan pemasaran produk kerajinan tangan maupun kompos yang dihasilkan. Dalam melakukan distribusi atau penjualan perlu adanya riset pasar dan penyesuaian harga agar barang yang diproduksi bisa laku dipasaran dan tidak merugikan para pengrajin.

Untuk kegiatan jangka panjang selain ketrampilan yang dimiliki sangat penting untuk memperhatikan faktor biaya atau anggaran yang tersedia untuk keberlangsungan produksi yang akan datang. Hasil kolaborasi pengelolaan sampah dapat membuka lahan kerja baru bagi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain masyarakat pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan sampah juga dapat meraskana manfaat dari kolaborasi.

Kolaborasi dalam pengelolaan sampah juga dapat merubah kehidupan sosial dalam masyarakat kearah yang lebih baik. Ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untu mengatasi kondisi sosial masyarakat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Upaya yang dilakukan adalah memberikan ketrampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi dan ketrampilan dari kegiatan pelatihan daur ulang sampah dapat menambah pengetahuan baru dan memotivasi untuk hidup lebih bersih dan sejahtera dengan memanfaatkan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan dan pengetahuan yang memadai akan menambah kualitas sumberdaya manusia yang siap untuk bekerja dan pengelolaan sampah akan terus bejalan dengan baik sehingga akan memberikan sumbangsih pada kondisi sosial masyarakat. Dengan adanya peningkatan kondisi sosial masyarakat diharapkan pola pikir tentang pengelolaan sampah yang baik akan tertanam dalam diri masing-masing individu sebagai imbas dari hasil kolaborasi pengelolaan sampah yang baik.

Adanya perubahan kondisi sosial masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan sehingga lingkungan akan menjadi bersih dan pola kehidupan masyarakat menjadi aman dan bebas sampah. Dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan maka diharapkan pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak terutama masyarakat sebagai salah satu penyumbang sampah

yang besar. Sehingga pengelolaan sampah kedepannya yang diharapkan akan merubah kesadaran masing-masing individu untuk peduli tentang kebersihan lingkungan. Kolaborasi pengelolaan sampah yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dapat memberikan manfaat yang positif bagi pembentukan budaya menjaga kebersihan lingkungan termasuk salah satunya yaitu budaya membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak mengotori lingkungan. Dengan kata lain, budaya ini dapat menciptakan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan dari sampah.

Hasil dalam kolaborasi juga mempunyai sumbangsih dalam aspek politik. Keberhasilan dalam melakukan kolaborasi dapat membangun legitimasi politik masyarakat terhadap kepala daerah dan pemerintah. Untuk membangun legitimasi politik harus ada pencapaian yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa upaya yang dilakukan dapat menyentuh dan mensejahterakan masyarakat. Kolaborasi pengelolaan sampah adalah upaya yang tepat dalam mengatasi persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara untuk membangun kepercayaan terhadap masyarakat bahwa pemerintah mempunyai kepedulian untuk memperbaiki pelayanan khususnya dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya keberhasilan yang nampak kepada masyarakat maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sehingga legitimasi politik masyarakat terhadap pemerintah akan terus berkembang dengan pencapaian keberhasilan yang diperoleh.

5.2.2.2.4. Adaptasi

Setelah beberapa tahapan proses kolaborasi sampai mendapatkan hasil yang diinginkan ada komponen *collaborative governance* yang tidak kalah penting dibandingkan dengan beberapa komponen yang telah dibahas sebelumnya. Komponen tersebut adalah adaptasi yang membahas tentang evaluasi dalam proses kolaborasi.

Menurut Emerson dan Nabatchi (2015:85) adaptasi merupakan konsep yang kurang begitu menonjol dalam pengelolaan kolaboratif. Akan tetapi, akan menjadi penting untuk konsep ini yang digunakan dalam rangka memahami kinerja kolaborasi.

Dengan harapan kedepannya akan ada perubahan yang transformatif atau bahkan perubahan kecil, namun signifikan dalam merespon hasil dari kegiatan kolaborasi.

Adaptasi merupakan sebuah proses dalam komponen *collaborative governance* yang tidak bisa terpisahkan guna memahami keberhasilan dan kegagalan yang dialami dalam proses kolaborasi. Dalam tahapan ini semua *stakeholders* internal maupun eksternal berkumpul dalam dialog secara langsung maupun tidak langsung untuk mengevaluasi kegiatan kolaborasi pengelolaan sampah untuk meninjau kembali dan memastikan keberhasilan yang diraih dan kegagalan untuk meningkatkan prestasi dan memperbaiki kekurangan dalam kolaborasi pengelolaan sampah.

5.2.3 Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Sampah di Kabupaten

Buton Utara

5.2.3.1 Faktor Penghambat

Pengelolaan sektor publik selalu mengalami hambatan dan dukungan di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Buton Utara. Pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara tidak berjalan lancar seperti apa yang diharapkan. Berbagai kendala yang dapat membuat terhambatnya pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara dapat dikelompokkan dalam dalam aspek teknis operasional, aspek kelembagaan organisasi, aspek peraturan hukum, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat. Ditinjau dari aspek teknis operasional kendala utama dalam operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara adalah terletak pada tingkat dan daerah pelayanan serta timbunan sampah dan pewadahan. Menurut SK SNI 19-2454-2002 teknik operasional pengelolaan sampah terdiri dari 6 Komponen yaitu pewadahan, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengolahan dan pemilahan, pengangkutan, pembuangan akhir.

Kegiatan pelayanan sampah hanya sebatas sebagian wilayah komersil, sementara sumber sampah yang berasal dari rumah tangga belum dilayani. Akibatnya masyarakat yang tidak terlayani sebagai penghasil sampah rumah tangga akan membuang sampah pada tempat yang tidak semestinya. Pewadahan merupakan salah satu permasalahan dalam teknis operasional dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Pewadahan sampah masih menggunakan pola individual yang disediakan oleh masyarakat, untuk pola komunal hanya tersedia untuk kegiatan komersil. Namun tidak semua kegiatan komersil seperti toko dan lainnya mendapatkan pewadahan, hanya pasar mina-minanga yang berada di kelurahan lakonea yang mempunyai TPS. Karena banyak TPS telah dirusak oleh masyarakat

sendiri. Tempat pembuangan sampah yang seharusnya menjadi sangat sulit untuk ditemukan, masyarakat kebingungan dimana harus membuang sampah terutama yang dihasilkan dari sampah rumah tangga.

Ditinjau dari keterangkatan sampah, masih banyak ditemukan sampah di berbagai sudut kota maupun dipemukiman masyarakat tidak terangkut dan menjadi masalah dalam pengelolaan sampah. Akibat dari tidak terangkutnya sampah dapat menimbulkan pencemaran udara berupa bau tidak sedap dan yang paling mengkhawatirkan bisa saja menimbulkan penyakit. Pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara Khususnya di Kecamatan Kulisusu masih menggunakan pola pengelolaan yang masih sangat klasik yaitu pola kumpul, angkut, buang. Paradigma lama kumpul, angkut, buang harus segera ditinggalkan karena kondisi sekarang ini dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi yang tidak bijak terhadap lingkungan akan memperparah keadaan kalau tidak diimbangi dengan pengelolaan yang sesuai yaitu penerapan konsep 3-R sebagai upaya dalam penerapan pengelolaan sampah secara moderen. Salah satu contoh upaya yang dilakukan penerapan konsep tersebut adalah dengan memisahkan antara sampah kering dan sampah basah dari sumbernya dan mengolah sampah menjadi kompos akan mengurangi volume sampah dengan residu yang sangat kecil. Upaya tersebut harus ditingkatkan dengan sosialisasi dan pelatihan dalam kolaborasi pengelolaan sampah, mengingat masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dari sumbernya dan mengolah sampah menjadi bernilai ekonomis. Dengan adanya pengetahuan yang baik akan mengurangi beban pengangkutan dan hasil buangan di TPA akan berkurang.

Sementara itu pembuangan akhrit di TPA masih menggunakan sistim open dumping belum menggunakan *controlled landfill*. Selain itu belum adanya TPA yang definitif membuat TPA sementara menjadi kendala dalam teknis operasional ini.

Hasil observasi dari penulis, keberadaan TPA juga sangat dekat dengan pemukiman warga sehingga akan mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga setempat. Dari aspek kelembagaan dan organisai pengelolaan kebersihan berada pada Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari beberapa bidang pelayanan. Yang menjadi kendala adalah bidang yang menaungi dalam pengelolaan sampah hanya menjadi bagian kecil dalam struktur organisasi sehingga pengelolaan sampah terabaikan. Sehingga perlu perlu pengkajian ulang untuk kembali menjadi Dinas tersendiri, mengingat semakin tingginya beban pengelolaan sampah yang saat ini butuh perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Selain itu untuk mengatasi masalah kelembagaan yang ada dengan keterlibatan lembaga formal maupun non formal untuk meningkatkan peran kelembagaan dalam upaya mengatasi masalah persampahan di Kabupaten Buton Utara.

Adapun dari aspek hukum secara nasioanal Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjadi payung hukum pengelolaan sampah di Indonesia dan sebagai pedoman tekhnis pemerintah pusat yang diteruskan kepada pemerintah daerah. Menurut Damanhuri (2010: 11) manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Yang menjadi kendala sehubungan dengan aturan pemungutan retribusi persampahan belum diterapkan di

Kabupaten Buton Utara. Peraturan daerah ketentuan penanganan persampahan dan peraturan daerah retribusi belum ada, masih sebatas diusulkan namun belum terealisasi sampai saat ini. Sehingga belum ada dukungan biaya dari masyarakat untuk menunjang pengelolaan sampah.

Dari aspek pembiayaan sumber dana berasal dari dana anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) belum ada retribusi dan dukungan anggaran dari pihak lain. Menurut Damanhuri (2010: 12) Aspek pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar roda sistem pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Lemahnya ketersediaan anggaran menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Terlihat jelas pada hasil penelitian pos anggaran hanya mencukupi untuk biaya operasional perkantoran tidak mencakup untuk biaya teknis operasional dilapangan. Sumber APBD tidak bisa diharapkan, karena sistem kelembagaan yang ada sekarang ini tidak cukup mendukung dalam aspek pembiayaan pengelolaan sampah, sehingga upaya kerja sama dengan masyarakat dan penarikan retribusi adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah anggaran yang tidak mencukupi saat ini.

Dari aspek peran serta masyarakat sangat nampak dari hasil penelitian belum ada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Menurut Damanhuri (2010: 12) Tanpa adanya partisipasi masyarakat penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah

dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program itu. Hal ini antara lain menyangkut : (1).

Bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib dan teratur, (2). Faktor-faktor sosial, struktur, dan budaya setempat, (3). Kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini.

Berdasarkan (SNI 19-2454-2002: 5) faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah perkotaan diantaranya timbulan dan karakteristik sampah selain itu budaya sikap dan perilaku masyarakat dapat mempengaruhi sistem pengelolaan sampah. Tampak jelas sebagian besar perilaku masyarakat setempat membuang sampah dengan tidak memilah dan memisahkan jenis sampah, selian itu diperparah dengan banyaknya TPS yang dirusak oleh masyarakat. Hal ini akan mempersulit petugas sampah dalam mengangkut sampah dari sumbernya, sehingga memperlambat kerja dari petugas sampah. Masih rendahnya kesadaran dalam menjaga kebersihan terlihat pada perilaku membuang sampah disembarang tempat masih menjadi ciri khas yang sangat sulit untuk dihilangkan pada semua lapisan masyarakat.

Untuk merubah persepsi masyarakat, faktor sosial budaya, dan Kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini, diperlukan pemahaman bahwa masyarakat bukan lagi hanya sebagai obyek tetapi lebih sebagai mitra yang mengandung makna keselarasan. Menurut Louise et.al dalam Irman (2004: 51) peran serta masyarakat adalah melibatkan masyarakat dalam tindak-tanduk administrator yang mempunyai pengaruh langsung terhadap mereka. Tanpa ada peran aktif masyarakat akan sangat sulit mewujudkan kondisi kebersihan yang memadai. Disamping itu, pihak lain yang

tergabung dalam kolaborasi pengelolaan sampah juga memiliki potensi yang besar untuk dapat berperan serta menyediakan pelayanan publik ini.

5.2.3.2 Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung diatranranya adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara telah menyediakan lahan rencana TPA seluas 10 Ha di Kecamatan Kulisusu. Walaupun lahan tersebut belum bisa dikelola sebagai TPA definitif namun hal tersebut memberikan peluang untuk membangun TPA dalam skala luas kedepannya dalam mendukung pengelolaan sampah. Selain itu peluang yang ada dimasyarakat merupakan salah satu faktor pendukung untuk terlaksananya pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Peluang tersebut diantaranya adalah, peluang ekonomi dalam pemanfaatan sampah melalui pengembangan sampah untuk daur ulang, peluang dalam penerapan tenaga kerja, peluang adanya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, kesediaan masyarakat untuk membayar retribusi

Peluang ekonomi dapat berupa kegiatan pelatihan yang diadakan dengan mendaur ulang sampah menjadi kerajinan tangan dan pupuk kompos serta bentuk lain yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya ketrampilan yang diperoleh tidak menutup kemungkinan untuk memproduksi barang dalam skala rumah tangga atau dalam skala industri yang memproduksi barang lebih banyak.

Dengan adanya produksi yang banyak akan menyerap tenaga kerja sehingga peluang adanya lapangan kerja akan tersedia bagi masyarakat. Dalam beberapa kesempatan

dengan masyarakat di Kecamatan Kulisusu, beberapa orang yang diwawancarai sangat bersedia untuk diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah hanya sekedar membersihkan lingkungan maupun kegiatan dalam pelatihan mengolah sampah menjadi kompos maupun kerajinan tangan. Serta masyarakat bersedia dalam membayar retribusi dalam pengelolaan sampah se sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut menjadi peluang yang sangat besar dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Peluang yang ada pada masyarakat berpotensi untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah dan melibatkan seluruh masyarakat dan *stakeholders* lainnya untuk berkolaborasi dalam pengelolaan sampah.

5.3 Implikasi Penelitian

Dalam sebuah penelitian mempunyai implikasi sebagai dampak dari temuan yang dihasilkan dari suatu penelitian baik secara teoritik, regulasi, maupun secara praktik. Adanya implikasi penelitian akan bisa membandingkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian terdahulu yang dapat berkontribusi dan bermanfaat dalam ilmu pengetahuan. Penggunaan teori *collaborative governance* sudah banyak dibahas dalam berbagai penelitian baik dalam pengelolaan sampah maupun *collaborative governance* dalam penelitian lainnya. Pada penelitian terdahulu banyak membahas tentang pengelolaan sampah dengan cara kolaborasi dimana proses kolaborasi sudah dilaksanakan. Hasil yang dicapai adalah tentang kegagalan dan keberhasilan dalam kolaborasi serta pencapaian di beberapa bagian dalam aspek

kolaborasi yang maksimal dan belum maksimal yang menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan secara kolaborasi.

Perbedaan nampak pada penelitian ini karena proses kolaborasi belum dilaksanakan dan berusaha untuk mencari solusi pengelolaan sampah dari perspektif *collaborative governance*. Walaupun sama dalam teori dan beberapa analisis yang digunakan tetapi dalam penelitian ini khusus membahas bagaimana menghasilkan pengelolaan sampah yang baik dari perspektif *collaborative governance* dari segi teknis pengelolaan sampah maupun proses kolaborasi yang akan diadakan sehingga akan terlaksana pengelolaan sampah dengan cara kolaborasi dengan berbagai *stakeholders* yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Sehingga unsur pembaharuan dalam penelitian ini adalah menemukan suatu cara pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama dari perspektif *old public administration* dengan cara kolaborasi dimana proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah belum dilaksanakan di Kabupaten Buton Utara. Sehingga diupayakan untuk mencari peluang kolaborasi dengan mengidentifikasi berbagai *stakeholders* yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses kolaborasi pengelolaan sampah dengan menggunakan pendekatan *collaborative governance* yang bisa memberikan implikasi baik dari segi teoritik, kebijakan, maupun secara praktik dalam pengelolaan sampah yang akan memiliki kontribusi dan berdampak langsung bagi masyarakat dari segi kebersihan, kesehatan, keindahan, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Buton Utara.

Pergeseran paradigma pengelolaan sektor publik membawa perubahan yang sangat besar dalam upaya mengatasi segala persoalan yang dihadapi oleh pemerintah.

Ditinjau dari segi teori pengelolaan sektor publik pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara masih menggunakan paradigma lama yaitu *Old Public Administration*.

Paradigma lama pengelolaan sampah dengan pola kumpul, angkut, buang, merupakan suatu konsep yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mengatasi persoalan sampah. Tetapi konsep seperti ini sudah seharusnya ditinggalkan mengingat semakin kompleks dari tahun ketahun yang membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan pengelolaan sektor publik saat ini yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pada titik inilah DLH sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam menangani permasalahan sampah mulai mempertimbangkan dalam mengatasi segala persoalan yang ada dengan memaksimalkan segala potensi dan membuat kebijakan yang dapat mengatasi persoalan sampah yang semakin parah.

Didalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah secara jelas menjelaskan asas dan tujuan dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Sementara itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedomanan pengelolaan sampah, acuan bagi Pemerintah Daerah untuk pengelolaan sampah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota telah memberikan wewenang untuk melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan ini membawa angin segar dimana pemerintah daerah dan kota mempunyai wewenang dalam menetapkan kebijakan dan strategi

pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, yang berimplikasi pada tujuan utama pengelolaan sampah.

Didalam Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara instansi yang berwenang dalam pengelolaan kebersihan/persampahan di Kabupaten Buton Utara adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bernaung dibawah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya selalu mengalami hambatan seperti masalah teknis, sumberdaya, dan organisasi kelembagaan yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Untuk itu diperlukan adanya upaya kebijakan dan pendekatan yang dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik dengan meningkatkan kapasitas lembaga organisasi dan peningkatan teknis pengelolaan sampah serta peningkatan kapasitas sumberdaya. Peningkatan lembaga organisasi dengan mengusahakan bagian pengelolaan sampah menjadi dinas tersendiri sehingga mempunyai keleluasaan dalam mengatur anggaran dan mengelola sumberdaya lain dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah. Pendekatan kebijakan yang dapat mendukung peningkatan teknis dan sumberdaya dalam pengelolaan sampah yaitu dengan menggadeng masyarakat sebagai penghasil utama sampah dan memaksimalkan segala potensi yang ada khususnya bagi DLH masih mempunyai lahan TPA yang luas untuk dikelola secara maksimal. Selain itu keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah sangat besar seperti kesediaan masyarakat dalam membayar retribusi dalam pengelolaan sampah, dan

daur ulang sampah yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan menjadi bersih merupakan faktor pendukung yang harus dimaksimalkan oleh DLH dalam pengelolaan sampah.

Selain masyarakat, DLH perlu menggandeng *stakeholders* lain untuk turut membantu meringankan beban tanggung jawab tersebut. Tergabungnya beberapa *stakeholders* yang terdiri dari instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan upaya *collaborative governance* dalam menghadapi persoalan sampah di Kabupaten Buton Utara. *Collaborative governance* dapat dikatakan salah satu tipe yang muncul di era paradigma *governance* dimana masyarakat pada saat itu semakin berkembang sehingga pemerintah menghadapi banyak masalah yang sangat kompleks. Disisi lain pemerintah memiliki keterbatasan untuk mengatasi masalah sehingga dibutuhkan kolaborasi. Kolaborasi sangat penting karena dalam hal pengelolaan sampah yang sangat kompleks tidaklah mungkin mampu dikelola DLH Kabupaten Buton Utara secara mandiri, mengingat keterbatasan kemampuan dan berbagai sumberdaya yang dimiliki. Kerjasama pengelolaan sampah antara DLH dan *stakeholders* lain dilakukan dalam suatu model kolaborasi melalui konsep *collaborative governance*. Konsep ini dapat menjadi alternatif dalam konteks kolaborasi tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan sampah.

Kegiatan kolaborasi tidak terjadi begitu saja, karena ada tujuan yang tidak tercapai sehingga perlu adanya upaya untuk menyelesaikan pengelolaan sampah sebagai faktor pendorong terjadinya kolaborasi. Menurut Emerson dan Nabatchi

(2015: 43-44) Ada empat hal penting yang mendorong (*drivers*) inisiasi CGR dimana tanpanya seruan untuk berkolaborasi kemungkinan tidak akan diindahkan dan tata kelola kolaboratif tidak akan terungkap: (1) ketidakpastian (*Uncertainty*), (2) saling ketergantungan (*Interdependence*), (3) insentif konsekuensial (*Consequential Incentives*), dan (4) memulai kepemimpinan (*Initiating Leadership*). Ketidak pastian dalam menyelesaikan persoalan sampah memunculkan ide atau gagasan baru dalam menyelesaikannya. Beberapa alasan karena kurangnya sarana dan prasarana dan sumberdaya yang dimiliki oleh DLH. Masing-masing *stakeholders* memiliki keterbatasan sehingga ada saling ketergantungan satu sama lain untuk berkolaborasi dalam pengelolaan sampah.

Menurut Emerson dan Nabatchi (2015: 27) Komponen dari model *collaborative governance* terdiri atas dinamika kolaborasi, kegiatan kolaborasi, hasil kolaborasi, dan adaptasi. Keseluruhan aspek tersebut saling mempengaruhi kinerja dari kolaborasi yang dilaksanakan oleh para aktor atau *stakeholder* yang terlibat.

Model kolaborasi pengelolaan sampah antara DLH, Dinas Koperasi UMKM, Kelompok penggerak PKK, Pemerintah Kelurahan/Desa dan masyarakat terdiri atas beberapa komponen yang antara lain yaitu komponen *collaboration Dinamic*, kegiatan kolaborasi dan hasil dari proses kolaborasi. Dinamika dalam kolaborasi terdiri atas beberapa aspek-aspek yaitu dialog dan pertemuan antar *stakeholder* dalam penentuan prinsip kolaborasi. Motivasi bersama terdiri dari membangun kepercayaan dan saling pengertian antar *stakeholders* serta komitmen terhadap proses. Kapasitas kolaborasi yang terdiri atas aspek prosedur, kepemimpinan,

pengetahuan, dan sumber daya kolaborasi. Setelah menganalisis komponen dinamika kolaborasi, maka akan dilanjutkan pada komopenen selanjutnya yaitu penjelasan menyangkut kegiatan kolaborasi dan hasil proses kolaborasi. Dalam menjalankan kolaborasi pengelolaan sampah selain dari *stakeholders* internal dapat pula melibatkan *stakeholders* eksternal seperti DPRD, lembaga institusi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan swasta. Karena dalam pengelolaan sampah perlu dukungan regulasi, anggaran, pengawasan, sosialisasi, pengembangan riset dan teknologi, dan upaya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi, pusat dan instansi daerah lain untuk kelangsungan kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam usaha menjalankan kegiatan kolaborasi pengelolaan sampah di Kabuapten Buton Utara mengembangkan model pelayanan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan sistem pengelolaan sampah yang berbasis pelayanan teknis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara. Kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara teknis berada pada DLH bekerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM, dan tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Dinas Koperasi UMKM dan tim penggerak PKK berperan sebagai pembina, pendamping, memberikan modal usaha, serta dapat memasarkan hasil produk yang akan diolah dengan membentuk koperasi usaha bersama. Kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat sebagai penghasil utama sampah di Kabupaten Buton Utara. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan dampak yang akan ditimbulkan sampah kalau tidak dikelola dengan baik. Untuk itu dalam kegiatan

kolaborasi pengelolaan sampah perlu adanya sosialisasi, pelatihan dan pengelolaan sampah dengan menerapkan konsep 3-R yaitu upaya pengurangan sampah (*Reduce*), pemanfaatan kembali (*Reuse*) dan daur ulang (*Recycle*).

Sebagai *leading sector* kegiatan teknis pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara DLH berperan sebagai inisiator dan mendukung penuh terlaksananya proses kolaborasi, khususnya teknis pengelolaan sampah dari sumber timbulan sampah sampai di tempat pembuangan akhir. Teori proses kolaborasi atau *Collaborative Governance Regime* (CGR) menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus, dengan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara, sebelum mengarah pada dampak utama. Maka dari itu masing-masing *stakeholders* harus bekerja dengan maksimal dalam upaya mempertahankan dan memajukan kegiatan kolaborasi pengelolaan sampah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Adanya kolaborasi pengelolaan sampah dengan memberdayakan masyarakat langsung diharapkan akan memberikan manfaat yang berdampak langsung kepada masyarakat dan meminimalisir keterbatasan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH saat ini. Keterbatasan DLH terhadap sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, anggaran, kurang optimalnya dari sisi kelembagaan dapat diatasi dengan cara kolaborasi dengan berbagai *stakeholders*.

Diharapkan implikasi praktik pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara akan terlaksana berdasarkan perspektif *collaboratif governance* sehingga semua *stakeholders* mendapatkan manfaat positif baik *stakeholders* internal maupun eksternal. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan *stakeholders* internal sebagai pelayan

masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat menjalankan tupoksi dengan baik, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Begitu pula dengan *stakeholders* eksternal sebagai institusi dan mitra dalam pengelolaan sampah dapat memberikan subangsi dan kotribusi yang nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai tujuan utama dalam pengelolaan sektor publik. Disisi lain bagi sektor swasta dan media massa yang tergabung dalam pengelolaan sampah akan mendapatkan keuntungan dari hasil kolaborasi yang dilaksanakan. Lebih dari itu semua yang terpenting adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai tujuan pelayanan yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat merubahan kondisi sosial masyarakat, meningkatnya kesadaran kebersihan lingkungan, dan membangun legitimasi politik masyarakat terhadap pemerintah.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Teknik pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buton Utara dengan pola kumpul, angkut, buang, sudah tidak

relevan lagi dalam mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Buton Utara.

Sehingga nampak belum maksimal dan sangat lambat dalam mengatasi masalah sampah. Selain persoalan teknis, tingkat pelayanan juga belum maksimal sehingga produksi sampah terus meningkat. Dalam menjalankan tugas sebagai pengelola sampah DLH juga masih terkendala dengan kurangnya sarana dan prasarana dan sumberdaya seperti, sumberdaya manusia, anggaran, dan organisasi kelembagaan sehingga sulit dalam mengatasi masalah persampahan di Kabupaten Buton Utara.

2. Adanya berbagai persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara dibutuhkan suatu terobosan untuk dapat mengatasi masalah yang dihadapi dengan bekerjasama dengan pihak lain. Pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara menunjukkan adanya peluang yang baik dipandang dari perspektif *collaborative governance*. Identifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan sampah menunjukkan adanya peluang yang besar untuk berkolaborasi dengan instansi lain dan masyarakat. Seperti yang nampak dalam dinamika kolaborasi menunjukkan adanya upaya kolaborasi yang dilakukan oleh DLH untuk bekerjasama dengan instansi lain dengan mengadakan pertemuan awal bersama

Lurah di Kecamatan Kulisusu dan Tim penggerak PKK. Peluang yang baik dalam upaya kolaborasi juga nampak pada kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masing-masing instansi yaitu DLH, Dinas Koperasi UMKM, tim penggerak PKK dan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi pengelolaan sampah diharapkan hasil yang akan diperoleh berupa perubahan kualitas dan kuantitas dalam aspek ekonomi, lingkungan hidup, sosial masyarakat, dan politik.

3. Faktor penghambat dalam teknis operasional terdapat pada tingkat dan daerah pelayanan serta timbunan sampah dan pewadahan. Ditinjau dari aspek kelembagaan status dan kapasitas lembaga pengelolaan kebersihan masih belum memadai sehingga perlu ditingkatkan lagi. Dari aspek hukum peraturan daerah ketentuan penanganan persampahan dan peraturan daerah retribusi belum ada, masih sebatas diusulkan namun belum terealisasi sampai saat ini. Disisi lain anggaran salah satu penyebab lemahnya sistem pengelolaan sampah antara lain karena minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan kebersihan kota. Minimnya peran serta dan tingkat kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sampah. Beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan sampah adalah, tersedianya lahan TPA yang luas, peluang ekonomi dengan daur ulang sampah, peluang penerapan tenaga kerja, peluang peningkatan kesehatan masyarakat, peluang kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dan membayar retribusi pengelolaan sampah.

6.2 Saran

1. Pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara kedepan harus bisa menjangkau seluruh wilayah kecamatan dan lapisan masyarakat di Kabupaten Buton Utara.

Secara teknis perlu adanya penambahan serta pemeliharaan sarana dan prasarana dan peningkatan pola penanganan sampah dari sumber timbulan sampah sampai pengangkutan ke TPA. Untuk dapat memenuhi kekurangan sarana dan prasarana serta sumberdaya lain perlu suatu terobosan dengan meningkatkan pola pengelolaan sampah dari berbagai aspek dengan menerapkan konsep 3-R dan bekerjasama dengan pihak lain yang dapat meningkatkan nilai ekonomi, perubahan kondisi sosial, budaya, kesehatan.

2. Melihat peluang yang ada saat ini pengelolaan sampah dengan perspektif *collaborative governance* adalah upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan melibatkan semua *stakeholders* seperti instansi lain didalam pemerintahan, diluar pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dipandang dari perspektif *collaboratif governance* beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam upaya kolaborasi adalah peningkatan dalam aspek dinamika khususnya pada kapasitas kolaborasi yang akan diadakan untuk memenuhi berbagai aspek seperti aspek prosedural, kepemimpinan, pengetahuan dan sumberdaya. Selain itu perlu peningkatan pada kegiatan kolaborasi untuk terus berinovasi sehingga hasil kolaborasi yang akan capai dapat memperoleh hasil yang maksimal.

3. Terkait dengan hambatan dalam pengelolaan sampah dari segi teknik operasional Pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan cakupan layanan dan peningkatan keterangkutan sampah sampai ke TPA. Dari segi kelembagaan perlu adanya peningkatan status dan kapasitas lembaga pengelolaan sampah dengan membidangi atau menjadi Dinas tersendiri. Upaya lain yang harus dilakukan adalah dengan keterlibatan lembaga formal maupun non formal untuk meningkatkan peran kelembagaan yang merupakan kebutuhan dari masyarakat. Untuk itu perlu pembenahan peraturan daerah pembentukan institusi, peraturan daerah ketentuan penanganan persampahan dan peraturan daerah retribusi. Dari aspek pembiayaan tidak hanya mengharapkan penuh dari anggaran daerah, tetapi harus meningkatkan pendapatan dari segi retribusi dan dukungan anggaran dari instansi lain dan pemerintah pusat



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Alex, S. 2012. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Amos, Noelaka. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: PT Rinika Cipta
- Ansel, C., Gash, A. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Berkeley: University of California.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Standarisasi Nasional. 2002. *Tata Cara Teknik Operasional Sampah Perkotaan SNI 19-2454-2002*. Jakarta
- BPS Kabupaten Buton Utara. 2018. *Buton Utara Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Utara.
- Damanhuri, Erni dan Tri Padmi. 2010. *Diktat Kuliah Pengelolaan Sampah*. Bandung : Institut Teknologi Bandung
- Denhardt, J.V., dan Denhardt, R.B., 2003. *The New Public Service*, M.E. Sharpe, New York.
- Donahue, John D. and Richard J. Zeckhauser. 2011. *Collaborative Governance: Private Roles For Public Goals In Turbulent Times*. Princeton: Princeton University Press
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Emerson, Kirk dan Tina Nabatchi. 2015. *Collaborative Governance Regime*. Washington: Georgetown University.
- Haris Herdiansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika

Hoelman, B. Mickael dkk. 2016. *Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah* (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah.

Irman, 2004. *Peran Serata Masyarakat Dalam Teknik Operasional Sampah di Kota Padang*. Semarang: Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, UNDIP.

Karden Edy Sontang Manik. 2007. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.

Kodoatie, Robert J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kuncoro Sejati. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.

Manik, K.E.S. 2003. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Djambatan

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications Inc.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Moleong, Lexy, J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nugroho Panji. 2013. *Panduan Membuat Kompos Cair*. Jakarta: Pustaka baru Press

O'Flynn, J. & Wanna, J. 2008. *Collaborative Government: Meanings, imensions, Drivers, and Outcomes*. ANU Press.

Purwanti, Nurul D. 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*, Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM

Said, E. Gumbira. 1987. *Sampah Masalah Kita Bersama*. Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju

- Sjamsuddin, sjamsiar. 2016. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing
- Slamet, Juli Soemirat. 2011. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Syafruddin, 2006, *Buku Ajar Pengelolaan limbah Padat (Sampah) Perkotaan*, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik UNDIP, Semarang.
- Statistik lingkungan hidup Indonesia, 2018. *Katalog/Catalog*: 3305001. Badan Pusat Statistik
- Statistik lingkungan hidup Indonesia, 2017. *Katalog/Catalog*: 3305001. Badan Pusat Statistik
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwerda, Bambang. 2012. *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*. Yogyakarta: Pustaka Rihama
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana
- Tuti Kustiah. 2005. *Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat*. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum.
- Ulum, M.Chazienul dan Rispa Ngindana. 2017. *Environmental Governance: Isu, Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Malang: UB Press.
- Utomo, Warsito. 2005. *Administrasi Publik Baru di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wintoko, Bambang. 2013. *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah: Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemapanan Fianancial*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Jurnal

Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. 2012. *An Integrative Framework for Collaborative Governance.* *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol 22 No 1

Junaidi. 2015. *Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjung Pinang*. Naskah Publikasi Fisip Umrah

Kurniasih, D. et al. 2017. *Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) Di Kabupaten Banyumas*. *Sosiohumaniora*, Vol 19 No. 1: 1 – 7

Kurniawan Muhammad. 2017. *Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol.2, No. 2

Mahyudin, R.Puteri. 2017. *Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA*. *Jakung Jurnal Teknik Lingkungan*. 3 (1). 66-74

Mutiarawati. T, Sudarmo. 2017. *Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan*. *Jurnal Wacana Publik* Vol 1 No 2.hlm 48 - 62

Rizal, M. 2011. *Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)*. *Jurnal Sipil Mesin Arsitektur Elektro (SMARTek)*. Vol. 9, No. 2: 155-172

Sahil, J et al. 2016. *Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa Dufa Kota Ternate*. *Jurnal Bioedukasi*. Vol. 4, No. 2

Setyowati, K, Et al. *Capacity Building Unit Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Governance di Pasar Bunder Kabupaten Sragen*. *Spirit Publik* Vol. 10, No. 2 Oktober 2015 Hal.137-152

Subandriyo, Anggoro, D., Hadiyanto. 2012. *Optimasi Pengomposan Sampah Organik Rumah Tangga Menggunakan Kombinasi Aktivator Em4 Dan Mol Terhadap Rasio C/N*. *Jurnal Ilmu Lingkungan UNDIP*, Volume 10 issue 2:70-75.

Sudarmo. 2006. *Perspectives on Governance: Towards an Organizing Framework For Collaborative and Collective Actions*. Jurnal Spirit Publik. Vol.2, No.2, hlm: 113-120, ISSN 1907- 0489

Yustikarini, R, et al. 2017. *Evaluasi dan Kajian Penanganan Sampah dalam Mengurangi Beban Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di TPA Milangasri Kabupaten Magetan*. Proceeding Biology Education Conference Vol. 14 , No. 1 Hal 177-185

Undang-Undang

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedomanan pengelolaan sampah

